

# **Bab I**

## **Pendahuluan**

---

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.5. Sistematika Penulisan



Segara Anak, danau di puncak Rinjani

# Bab I

## Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terbentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 64 Tahun 1958 yang mengatur tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT. Pada awal pembentukannya, penyelenggaraan pemerintahan NTB masih merujuk kepada dua UU. *Pertama*, UU Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950. *Kedua*, UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Setelah melalui proses penyesuaian peraturan perundang-undangan, barulah sejak 17 Desember 1958 Provinsi NTB terbentuk secara nyata. 17 Desember kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Provinsi NTB.

Sejak 17 Desember 1958, tiang pancang pembangunan NTB dimulai. Selama 1958-1968, pembangunan NTB menghadapi keterbatasan dalam hampir segala bidang. Terutama bidang ekonomi yang menyangkut hajat hidup langsung masyarakat. Keterbatasan ini tidak terlepas dari begitu lambatnya pemerintah pusat menyelesaikan konsolidasi pemerintahan. Ketika itu sejumlah daerah bergejolak sebagai isyarat ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat. Suhu politik nasional juga kian memanas dengan tarik-ulur kekuatan politik Nasionalis-Agama-Komunis (Nasakom).

Sementara nilai tukar rupiah terus merosot dan harga-harga kebutuhan pokok rakyat melambung tinggi. Kesulitan kian memuncak menjelang peristiwa G-30-S/PKI tahun 1965 dan terus berlangsung sampai menjelang awal 1970. Pada era gejolak politik nasional ini, masyarakat NTB hidup dalam serba keterbatasan. Bahkan di Lombok bagian selatan, tidak sedikit penduduk menemui ajal akibat kekurangan pangan.

Setelah haru-biru peristiwa G-30-S-PKI berlalu, ditandai dengan transisi pemerintahan orde lama ke orde baru, pembangunan ekonomi menjadi panglima. Pada kurun waktu 1969-1984, pemerintah daerah NTB dengan dukungan penuh pemerintah pusat berhasil menyusun Rencana

---

Pembangunan Lima Tahun (Repelita) daerah yang mengacu pada Repelita nasional. Melalui tahapan Repelita daerah, pembangunan NTB menjadi lebih fokus dan terarah. Hasilnya tampak nyata pada sektor pertanian yang merupakan tumpuan hidup mayoritas rakyat. Pada 1984, NTB keluar dari bayang-bayang rawan pangan dengan mewujudkan swasembada beras. Sebuah prestasi monumental yang kemudian memberikan sumbangan besar bagi terbitnya penghargaan lembaga pangan dunia (FAO) kepada Presiden Soeharto.

Berikutnya pada periode 1985–1997, mulai mencuat kepermukaan kritik terhadap sistem pembangunan sentralistik ala orde baru. Sistem ini dianggap melahirkan ketimpangan pembangunan. Baik berupa ketimpangan pusat dengan daerah, Jawa dengan luar Jawa maupun ketimpangan kawasan barat dengan kawasan timur Indonesia. Atas nama pembangunan hampir semua potensi daerah terserap habis ke pusat. Sementara yang pusat berikan kepada daerah hanya potongan kecil dari “kue” ekonomi nasional. Saat itu NTB masuk dalam kategori daerah yang tertinggal dan mengalami kesulitan mengentaskan dirinya dari keterpurukan. Selama 30 tahun lebih pemerintah orde baru berkuasa, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB hampir selalu terpukul di papan bawah.

Pada 1997 terjadi krisis ekonomi nasional yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi. Puncaknya Mei 1998, rezim orde baru tumbang digantikan orde reformasi. Pada awal tahun 2000, otonomi daerah dimulai. Sejumlah perangkat undang-undang disusun sebagai landasannya. Seperti UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. Ada lagi UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004. Dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan dikeluarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

---

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintahan Daerah NTB menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk waktu 20 tahun. RPJP Daerah diniatkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai penjabaran RPJP Daerah, disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan peraturan daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat kebijakan umum pembangunan daerah, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan. Dalam RPJMD juga termaktub rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD merupakan perwujudan komitmen pemerintah, swasta dan masyarakat secara simultan dan komprehensif yang menjadi pedoman dan rujukan bersama selama kurun waktu lima tahun berjalan.

---

## 1.2 Maksud dan Tujuan

RPJMD Provinsi NTB 2009-2013, ditetapkan sebagai rambu, pedoman dan arah bagi pemerintah daerah khususnya dan masyarakat NTB umumnya untuk bersama mewujudkan visi-misi daerah dalam program pembangunan yang terpadu, fokus dan responsif terhadap tantangan dan perubahan zaman. Adapun tujuan RPJMD dibuat sebagai acuan dan panduan dalam penyusunan rencana strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan dokumen perencanaan detail lainnya.

---

### 1.3 Landasan Hukum

---

Landasan hukum penyusunan RPJMD Provinsi NTB 2009-2013 merujuk kepada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

---

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

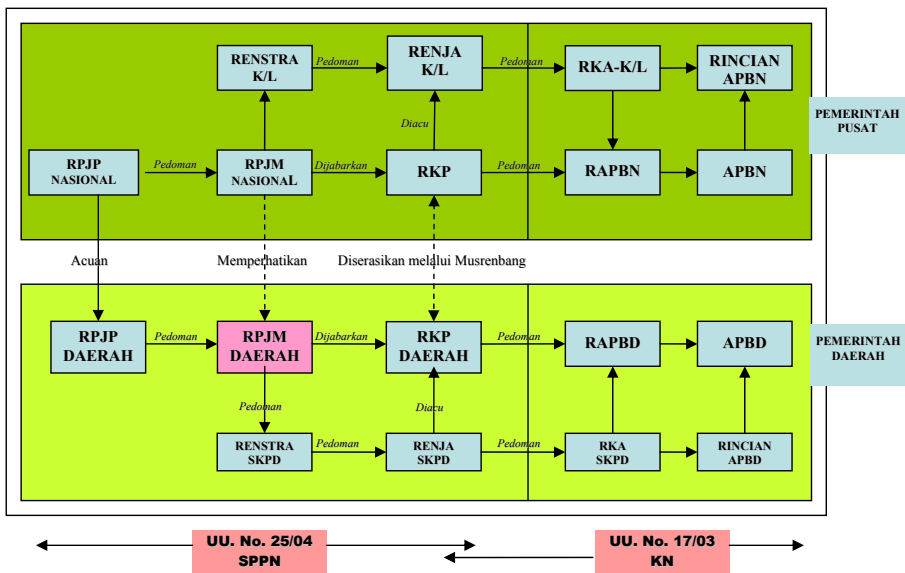
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009;
14. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 -2025;

#### **1.4 Kaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Antara RPJMD Provinsi NTB 2009-2013 dengan dokumen perencanaan lainnya memiliki keterkaitan yang erat. Keterkaitan tersebut secara ringkas bisa diuraikan sebagai berikut:

1. RPJMD Provinsi NTB merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan mengacu kepada RPJP Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 serta Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB.
2. RPJMD Provinsi NTB 2009-2013 selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk jangka waktu lima tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada setiap tahunnya.
3. RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPA) pada setiap tahun anggaran dalam periodisasi 2009-2013.
4. RPJMD Provinsi NTB 2009-2013 menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota se-NTB dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

Keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya:



---

## 1.5 Sistematika Penulisan

---

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan
- Bab IV : Analisis Isu-Isu Strategis
- Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- Bab VI : Strategi, Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.
- Bab VII : Indikasi Rencana Pembangunan Daerah dan Kebutuhan Pendanaan.
- Bab VIII : Pentahapan Pembangunan dan Penetapan Indikator Kinerja.
- Bab IX : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.



## **Bab II**

# **Gambaran Umum Kondisi Daerah**

---

- 2.1. Kondisi Geografis
- 2.2. Ekonomi Daerah
- 2.3. Kependudukan, Sosial dan Budaya
  - A. Pendidikan
  - B. Kesehatan
  - C. Tenaga Kerja
  - D. Kesejahteraan Sosial
  - E. Pariwisata
- 2.4. Sarana dan Prasarana Daerah
- 2.5. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup



Pantai Meninting Lombok Utara  
*LSPC (Lombok Sumbawa Photo Club)*

## Bab II

# Gambaran Umum Daerah

### 2.1 Kondisi Geografis

Secara geografis NTB terletak antara 08° 10'-09° 05' Lintang Selatan dan 115° 46'-119° 05' Bujur Timur. Di sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan Laut Flores, di sebelah timur terhadap Selat Sape, di sebelah selatan terbentang Samudera Hindia dan di sebelah barat berhadapan dengan Selat Lombok. NTB merupakan provinsi kepulauan dengan dua pulau utama: Lombok dan Sumbawa. Terdapat pula sekurangnya 332 pulau-pulau kecil dengan panjang garis pantai yang terbentang seluas 2.333 kilometer. Dari 332 pulau-pulau kecil tersebut, sekitar 282 pulau diantaranya telah memiliki nama.

Luas daratan NTB terbentang sepanjang lebih dari 20 ribu kilometer persegi. Sementara luas perairan lautnya terhampar hampir 30 ribu kilometer persegi. Luas daratan Pulau Lombok hampir mencapai 5 ribu kilometer persegi. Ini sekitar 23,51 persen dari luas total daratan NTB. Sementara daratan Pulau Sumbawa terbentang hingga 15 ribu kilometer persegi atau hampir mencapai 77 persen dari luas total daratan NTB. Luas daratan Pulau Sumbawa hampir empat kali luas daratan Pulau Lombok. Di NTB terdapat delapan kabupaten dan dua kota, dengan 116 kecamatan dan 910 desa atau kelurahan. Kabupaten Lombok Utara merupakan kabupaten terbaru yang terbentuk pada awal 2009.

Ditilik dari letak geografisnya, NTB mempunyai posisi strategis karena sejumlah alasan. *Pertama*, NTB berada pada jalur lintas transnasional Banda Aceh-Kupang yang secara ekonomis menguntungkan. *Kedua*, NTB terapat dua alur pelayaran internasional: alur pelayaran Selat Lombok dan alur pelayaran Selat Timor. *Ketiga*, NTB persis berada pada lintasan tujuan wisata utama dunia: Bali-Komodo dan Tana Toraja yang sering juga disebut “segitiga emas pariwisata Indonesia”.

Kondisi topografi NTB bervariasi dari nol sampai dengan 3.726 meter dari permukaan laut untuk Pulau Lombok, sedangkan Pulau Sumbawa

**Tabel 2.1**  
Banyaknya Kecamatan dan Desa/Kelurahan menurut Kabupaten/Kota

NO	KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LUAS WILAYAH (HA)
1	Lombok Barat	10	88	1.863,40
2	Lombok Utara	5	33	
3	Lombok Tengah	12	139	1.208,40
4	Lombok Timur	20	119	1.605,55
5	Sumbawa	24	164	6.643,98
6	Dompu	8	63	2.324,60
7	Bima	18	168	4.389,40
8	Sumbawa Barat	8	48	1.849,02
9	Kota Mataram	6	50	61,30
10	Kota Bima	5	38	207,50
	<b>Jumlah</b>	<b>116</b>	<b>910</b>	<b>2.015,15</b>

Sumber: BPM-PD Provinsi NTB 2008

mulai dari nol sampai 2.755 dari permukaan laut. Berdasarkan ketinggian wilayah, fisiografi NTB dapat diklasifikasikan datar, landai, bergelombang dan bergunung-gunung. Di Pulau Lombok terdapat jajaran gunung Rinjani, Mareje, Timanuk, Nangi, Perigi, Plawangan, Baru. Sedangkan di Pulau Sumbawa terhampar deretan Gunung Batu Lanteh, Tukan, Jaran Pusang, Soromandi/Donggo, Tambora, Dadu, Pajo dan Gunung Sambi.

Potensi sumberdaya air NTB sebesar 10.748,13 mega kubikmeter (*mcm*), sedangkan kebutuhan air sekitar 6.826,22 *mcm*. Artinya NTB surplus ketersediaan air. Kondisi ini akan lebih mantap dan stabil jika tersedia dukungan prasarana pengairan yang cukup memadai, sehingga distribusi air baku untuk kebutuhan irigasi, rumah tangga dan industri dapat terpenuhi. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret-April sebesar 13,8–15,2 milimeter. Curah hujan tertinggi pada periode tersebut meliputi 50 persen luas wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah sebelah utara.

Curah hujan tertinggi sebesar 158,1–130,3 milimeter juga terjadi pada bulan September–Mei yang mencakup 50 persen luas wilayah Kabupaten Lombok Selatan, Sumbawa Besar, Dompu dan Bima. Sementara pada musim kemarau, curah hujan tertinggi sebesar 15,9 milimeter pada bulan Agustus yang mencakup 50 persen wilayah Kabupaten Lombok

---

Selatan dan Dompu serta hampir seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Kabupaten Bima.

Iklim NTB mendapat pengaruh besar dari angin *Monsoon*. Pada Oktober sampai Maret, terasa pengaruh Monsun Pasifik yang melalui Laut Jawa dan Samudra Indonesia. Dua lautan ini mempengaruhi karakteristik curah hujan di seluruh wilayah NTB. Pengaruhnya menyebabkan pola hujan yang tidak seragam, terutama di Pulau Lombok. Pengaruh tingginya Suhu Permukaan Laut (SPL) di dua laut tersebut mendorong *evaporasi* yang intensif dan pembentukan awan pada musim Angin Barat. Ini membuat curah hujan yang tinggi pada November sampai Februari. Sebaliknya pada musim Angin Timur, suhu permukaan laut di Samudera Hindia menurun dan mencapai suhu terendah pada Agustus, menyebabkan terjadinya musim kering dengan curah hujan yang sangat rendah.

Potensi tangkapan ikan terbesar terjadi pada saat Musim Angin Timur dengan suhu permukaan laut rendah dan konsentrasi *klorofil-a* yang tinggi pada Juli sampai September. Angin Timur menyebabkan terjadinya *upwelling* di sepanjang Pantai Selatan, menyebabkan *nutrient* naik ke permukaan laut dari kedalaman sekitar 50 meter, sehingga menyebabkan tingginya konsentrasi *klorofil-a*. Kemudian potensi tangkapan ikan akan menurun seiring dengan berubahnya musim ke Musim Angin Barat dengan naiknya suhu permukaan laut dan menurunnya konsentrasi *klorofil-a* dari Oktober sampai Maret.

Suhu permukaan laut di sepanjang pantai Pulau Lombok dan Sumbawa berkaitan erat dengan variasi El Nino dan La Nina. Suhu permukaan laut turun 1 sampai 1,5 derajat celsius pada saat terjadinya El Nino, dan naik sebesar 1 sampai 2 derajat celsius pada saat terjadinya La Nina. Peristiwa La Nina terbesar terjadi pada 1999 dan 2000. Kenaikan dan penurunan suhu permukaan laut yang drastis dapat menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem pantai, terutama terumbu karang. Pengaruh El Nino dan La Nina juga terlihat jelas pada karakteristik Tinggi Muka air Laut (TML). Pada saat terjadi El Nino, TML akan terdepresi sebesar 20 centimeter di bawah normal, dan pada periode La Nina akan terelevasi sebesar 10-20 centimeter. Hal ini berpengaruh terhadap resiko erosi, abrasi dan genangan air laut.

## 2.2 Ekonomi Daerah

Jika dilihat dari perkembangan PDRB, baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 (ADHK 2000), kinerja perekonomian NTB dari tahun ke tahun relatif mengalami perbaikan. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumberdaya alam dan faktor-faktor produksi lainnya untuk memberikan nilai tambah. PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah yang diciptakan seluruh aktifitas perekonomian di suatu daerah.

**Tabel 2.2**  
PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi NTB Tahun 2003–2007  
(Tidak Termasuk Sub Sektor Pertambangan Non Migas)

Uraian	2003	2004	2005	2006	2007
PDRB ADHB (Miliar Rp)	13.137,23	14.563,96	16.828,63	18.977,32	21.401,43
PDRB ADHK 2000 (Miliar Rp)	10.342,23	10.855,77	11.295,77	11.852,96	12.526,09
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,41	4,97	4,05	4,93	5,68

Sumber: BPS Provinsi NTB- NTB Dalam Angka 2008

Nilai PDRB NTB setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Pada 2007 mencapai Rp 33,52 trilyun, meningkat 17,22 persen dibanding Rp 28,59 pada 2006. Nilai PDRB ADHK pada 2007 mencapai Rp 16,36 trilyun, mengalami pertumbuhan sebesar 4,89 persen dibanding 2006 yang mencapai nilai Rp 15,60 trilyun. Pertumbuhan ekonomi 2007 menunjukkan *trend* percepatan bila dibanding 2006 yang tumbuh sebesar 2,76 persen. Kondisi ini ditunjang pertumbuhan nilai tambah bruto pada subsektor pertambangan non migas yang meningkat sebesar 2,41 persen. Nilai PDRB NTB memang sangat bergantung pada sektor pertambangan non migas yang pada 2007 saja menunjang PDRB sebesar 36,15 persen.

Pertumbuhan PDRB NTB 2007 lebih tinggi dibandingkan 2006 yang mencapai 4,93 persen. Semua sektor mengalami pertumbuhan positif. Sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,96 persen, Sementara sektor pertanian tumbuh sebesar 2,90 persen. Sektor pertanian memang memberikan sumbangan besar untuk PDRB

diluar sektor pertambangan non migas. Jika dipilah lagi, subsektor kehutanan mengalami pertumbuhan tertinggi pada sektor pertanian sebesar 6,27 persen. Sedangkan yang terendah subsektor tanaman bahan makanan sebesar 1,50 persen.

Penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi NTB pada 2007 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Kedua sektor tersebut masing-masing memberikan kontribusi sebesar 18,46 persen dan 11,48 persen serta mengalami pertumbuhan sebesar 7,99 persen dan 7,15 persen. Sedangkan sektor industri pengolahan yang diharapkan berperan lebih, pada 2007 baru mampu memberikan kontribusi sebesar 5,06 persen dengan pertumbuhan cukup tinggi sebesar 9,96 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, diharapkan sektor industri semakin berperan dalam meningkatkan kinerja perekonomian NTB di masa mendatang.

**Tabel 2.3**  
PDRB (ADHB 2000) dan PDRB per Kapita NTB 2003-2007

NO	URAIAN	TAHUN				
		2003	2004	2005	2006*	2007**
1.	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	13.137.232	14.563.959	16.828.627	18.977.319	21.401.431
2.	Jumlah Penduduk (ribu Jiwa)	4.005,36	4.076,04	4.143,29	4.257,31	4.292,49
3.	PDRB Per Kapita (Rupiah)	3.279.913,01	3.573.065,67	4.061.657,93	4.457.584,46	4.985.784,82

Sumber : BPS Provinsi NTB

**Tabel 2.4**  
Pertumbuhan PDRB Sektoral 2003-2007 (ADHK 2000)

NO	SEKTOR	2003	2004	2005	2006	2007
1	Pertanian	4,64	2,63	0,96	2,88	2,90
2	Pertambangan dan Penggalian	4,76	5,15	6,02	5,67	6,76
3	Industri Pengolahan	6,49	6,35	7,29	2,82	9,96
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	3,05	8,11	5,31	7,82	6,97
5	Konstruksi	5,86	5,61	5,31	7,82	6,97
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	5,35	5,75	6,22	7,78	7,99
7	Pengangkutan dan Komunikasi	5,83	6,72	7,30	7,49	7,15
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Usaha	20,77	16,07	5,70	7,90	9,01
9	Jasa-jasa	1,59	3,40	3,63	2,84	3,32
	<b>PDRB</b>	<b>5,41</b>	<b>4,97</b>	<b>4,05</b>	<b>4,93</b>	<b>5,68</b>

Sumber : BPS Provinsi NTB

---

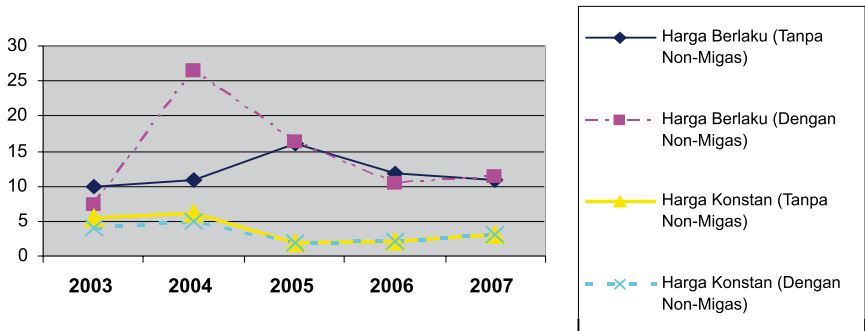
Berdasarkan PDRB (ADHK 2000), pertumbuhan ekonomi NTB terus mengalami peningkatan. Pada 2007 mengalami pertumbuhan sebesar 5,68 persen, lebih tinggi dibanding 2006 yang tumbuh sebesar 5,14 persen. Pada 2009 pertumbuhan ekonomi diprediksi mencapai 5,86 persen, dengan asumsi akan ada kontribusi signifikan dari investasi raksasa PT. EMAAR di sektor pariwisata, pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Sektor-sektor tersier kecuali sektor jasa, memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor primer dan sekunder. Secara umum sektor tersier tumbuh diatas 5 persen, kecuali sektor jasa. Sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh sebesar 7,99 persen pada 2007, meningkat dari 7,82 persen pada tahun sebelumnya. Sementara sektor bangunan tumbuh 7,59 persen, juga meningkat dari 6,45 persen pada 2006. Demikian pula sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh mencapai 9,01 persen. Ini merupakan pertumbuhan tertinggi dibanding sektor-sektor lainnya.

Dilihat dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi NTB pada 2007 masih digerakkan komponen konsumsi masyarakat, ekspor barang dan jasa, serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan distribusi masing-masing 44,47, 41,66, dan 22,25 persen. Konsumsi masih merupakan faktor pendorong utama terjadinya pertumbuhan perekonomian NTB pada 2007 yang menyumbang hingga mencapai 5,68 persen.

Selama lima tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi NTB mengalami fluktuasi searah dengan perkembangan perekonomian nasional dan global. Secara internal faktor yang paling menonjol mempengaruhi fluktuasi pertumbuhan ekonomi NTB adalah produksi pertambangan non-migas, yaitu beroperasinya PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) sejak awal 2000.

Secara lebih terinci pertumbuhan ekonomi/PDRB Provinsi NTB selama 2003-2007 dapat dilihat pada grafik berikut:



**Gambar.2.1.**  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB  
Berdasarkan Harga Berlaku dan Konstan 2003-2007

**Tabel 2.5**  
Pertumbuhan Ekonomi/PDRB NTB Tahun 2003-2007  
(Tanpa Pertambangan Non-Migas)

NO	SEKTOR	2003	2004	2005	2006	2007
1	Pertanian	4,64	2,63	0,94	3,11	0,96
2	Pertambangan dan Penggalian	4,76	5,15	(3,81)	(5,26)	1,34
3	Industri Pengolahan	6,49	6,35	7,29	6,35	5,75
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	3,05	8,11	7,35	9,77	5,42
5	Konstruksi	5,86	5,61	5,31	5,16	6,55
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	5,35	5,75	6,84	7,80	6,88
7	Pengangkutan dan Komunikasi	5,83	6,72	7,30	6,92	5,50
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Usaha	20,77	16,07	5,70	7,90	6,17
9	Jasa-jasa	1,59	3,40	3,57	2,70	1,44
	<b>Pertumbuhan NTB</b>	<b>5,41</b>	<b>4,97</b>	<b>1,79</b>	<b>2,19</b>	<b>3,16</b>

Sumber Data: Kerjasama Kantor Bank Indonesia Mataram dengan BPS NTB, 2008

## 2.3 Kependudukan, Sosial dan Budaya

Menurut data BPS, penduduk NTB pada 2007 berjumlah 4.292.491 jiwa. Kepadatan rata-ratanya 211 jiwa perkilometer persegi. Tingkat pertumbuhan penduduk 1,29 persen per tahun.

**Tabel 2.6**  
Jumlah Penduduk Provinsi NTB Tahun 2005–2007

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)		
		2005	2006	2007
1	Lombok Barat	762.376	782.943	796.107
2	Lombok Tengah	812.176	825.772	831.286
3	Lombok Timur	1.039.994	1.053.347	1.056.312
4	Sumbawa	396.179	403.500	406.888
5	Dompu	201.971	206.414	208.867
6	Bima	407.716	410.275	412.504
7	Sumbawa Barat	93.739	95.837	97.013
8	Kota Mataram	346.783	353.183	356.141
9	Kota Bima	123.477	126.035	127.373
<b>Provinsi NTB</b>		<b>4.184.411</b>	<b>4.257.306</b>	<b>4.292.491</b>

Sumber : BPS – NTB Tahun 2008

Pada 2007 terpampang fakta mayoritas penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, tingkat pendidikannya rendah. Berpendidikan SD sebesar 79,35 persen, SMP sebesar 20,65 persen. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.7**  
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja  
Menurut Tingkat Pendidikan 2003–2007

Tahun	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan (orang)							Jumlah
	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Tdk/Blm Tamat SD	SD/MI	SMP / MTs	SMA/ MA/SMK	Diploma	PT	
2003	456.563	399.930	451.382	224.949	244.382	21.419	39.556	1.838.181
2004	427.188	375.224	469.459	229.399	265.934	30.294	47.138	1.844.636
2005	410.943	363.260	453.554	222.031	257.262	31.027	45.122	1.783.199
2006	301.856	309.618	613.309	289.468	290.995	47.445	54.125	1.906.816
2007	320.092	323.294	603.875	300.995	298.151	49.137	55.638	1.951.182

Sumber : BPS – NTB Tahun 2008

Fakta lainnya, penduduk usia produktif yang sejak 2004 bekerja pada sektor pertanian, pelan-pelan mulai bergeser ke sektor industri, perdagangan dan jasa. Sekalipun demikian, sektor pertanian masih menyerap tenaga kerja terbesar mencapai 47,41 persen atau setara dengan 924.975 jiwa, kemudian sektor perdagangan menyerap angkatan kerja 17,95 persen atau 350.279 jiwa, lalu sektor jasa 11,13 persen atau 217.239 jiwa dan sektor industri 10,01 persen atau 195.357 jiwa. Sisanya 13,5 persen atau 263.332 jiwa bekerja pada sektor lainnya.

**Tabel 2.8**  
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja  
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2003–2007

Tahun	Lapangan Usaha (orang)					
	Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa	Lainnya	Total
2003	1.125.746	117.564	253.373	171.547	169.951	1.838.181
2004	908.072	194.200	324.568	175.300	242.496	1.844.636
2005	913.006	184.967	276.801	192.687	215.738	1.783.199
2006	899.526	190.271	346.017	232.080	238.922	1.906.816
2007	924.975	195.357	350.279	217.239	263.332	1.951.182

Sumber : BPS – NTB Tahun 2008

Hasil penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 2006 dan 2007, menempatkan NTB sebagai daerah yang nilai pembangunan manusianya berada pada level menengah bawah. Skornya di bawah 66. Memang dari waktu ke waktu, skor IPM NTB mengalami peningkatan. Hanya saja peningkatannya tidak cukup signifikan. Pada 2004 skor IPM NTB 60,6. Pada 2006, skornya naik menjadi 63. Dengan skor ini pada 2004 peringkat IPM NTB berada pada rangking 33 dari 33 provinsi. Pada 2006 naik satu tingkat menjadi rangking 32. Sebuah peningkatan yang tidak terlalu membanggakan. Bahkan pada 2007, rangking IPM NTB stagnan tetap pada peringkat 32.

**Tabel 2.9**  
Perkembangan IPM Nasional dan Provinsi NTB

NO	URAIAN	1999	2002	2004	2005	2006	2007
1	Nasional	64.3	65.8	68.7	69.6	70.1	*
2	NTB	54.2	57.8	60.6	62.4	63.04	63.71
3	Ranking NTB secara nasional	26/26	30/30	33/33	32/33	32/33	32/33

Sumber: BPS Provinsi NTB

**Tabel 2.10**  
Perkembangan Indikator IPM Provinsi NTB 1999–2007

INDIKATOR IPM	1999	2002	2004	2006	2007
Angka Harapan Hidup	57.8	59.3	59.4	60.9	61.2
Angka Melek Huruf	72.8	77.8	78.3	80.1	80.1
Rata-rata Lama Sekolah	5.2	5.8	6.4	6.7	6.7
Paritas Daya Beli (dalam Rp.'000)	565.9	583.1	611.0	623.9	630.48

Sumber: BPS Provinsi NTB

**Tabel 2.11**

IPM Menurut Kabupaten/Kota dan Peringkat IPM Provinsi NTB 2004-2007

KABUPATEN/KOTA	IPM (0-100)				PERINGKAT IPM			
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
Lombok Barat	57,0	57,8	58,7	59,3	431	432	445	444
Lombok Tengah	56,9	57,9	58,5	59,0	432	431	446	446
Lombok Timur	58,7	59,6	60,3	61,1	428	429	441	439
Sumbawa	63,2	64,0	64,8	64,9	391	389	408	416
Dompu	62,3	63,3	63,9	64,0	400	398	418	424
Bima	60,2	61,7	63,1	63,8	419	413	424	427
Sumbawa Barat	61,9	63,4	65,0	65,5	403	397	404	407
Mataram	68,8	69,4	69,8	70,7	188	192	209	196
Kota Bima	63,5	64,2	65,9	67,1	383	385	379	365
<b>PROVINSI NTB</b>	<b>60,6</b>	<b>62,4</b>	<b>63,0</b>	<b>63,7</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>

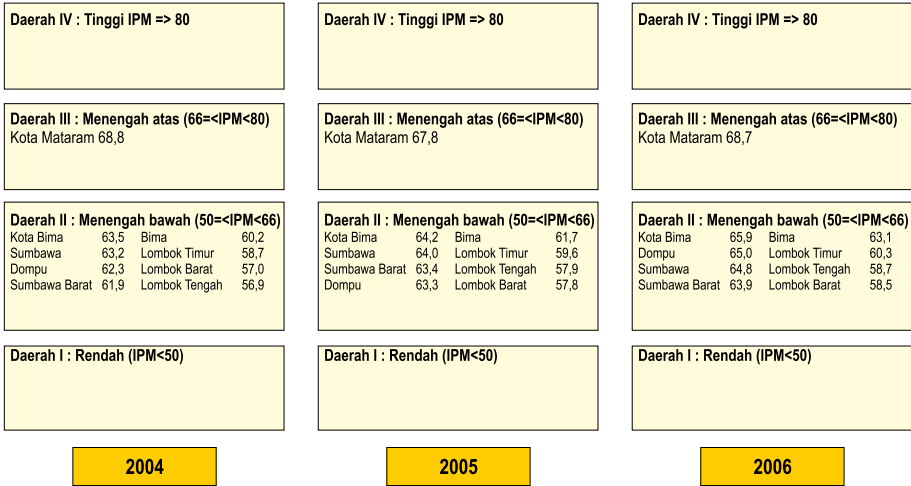
Sumber: BPS Provinsi NTB

Jika melihat tabel IPM menurut kabupaten-kota, jelas terpampang fakta selama periode 2004-2007, IPM tertinggi selalu digenggam Kota Mataram dengan nilai di atas rata-rata nilai IPM NTB secara keseluruhan. Berdasarkan kriteria UNDP, hanya Kota Mataram yang masuk kategori “menengah atas” dengan skor 69,8. Kabupaten-kota lainnya di NTB masuk kategori “menengah bawah” karena skornya hanya berkisar 50-65 saja. Melihat deretan fakta ini, jika ingin NTB berdiri sama tinggi dengan daerah lainnya, diperlukan percepatan, inovasi dan nilai tambah dalam proses pembangunan daerah. Pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten-kota harus mulai membangun kemitraan strategis, menyamakan visi dan misi serta melakukan investasi sosial-ekonomi secara lebih proporsional dalam membangun manusia.

## A. Pendidikan

Akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dasar di NTB meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Pada 2003/2004, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI mencapai 94,91 persen, meningkat menjadi 97,66 persen pada 2007/2008. Akses masyarakat untuk memasuki SMP/MTs juga mengalami peningkatan secara signifikan. Tahun 2003/2004 angka APM baru mencapai 62,62 persen, pada 2007/2008 meningkat menjadi 79,57 persen. Di tingkat Sekolah Menengah Atas

**Bagan 1**  
**Posisi Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi NTB Tahun 2004-2006**



(SMA/MA), angka partisipasi murni pada 2007/2008 sebesar 48,89 persen, meningkat dari 36,91 persen pada 2003/2004.

Sementara itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) melebihi 100 persen. Artinya, masih banyak siswa yang berumur di bawah tujuh tahun (*underage*) dan di atas 12 tahun (*overage*) yang masih mengikuti pendidikan di tingkat SD/MI. Tahun 2005/2006, jumlah anak usia dibawah 7 tahun dan diatas 12 tahun yang masih mengikuti sekolah di SD/MI mencapai 25.573 siswa. Pada level Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTS) angka APK juga meningkat dari 78,43 persen pada 2003/2004, menjadi 97,82 persen pada 2007/2008. Sementara angka APK pada SMA/MA pada 2007/2008 sebesar 58,64 persen, meningkat dari 46,64 persen pada 2003/2004

Terjadi variasi pencapaian APM antar Kabupaten-Kota. Pencapaian APM untuk tingkat SD/MI tertinggi dicapai Kabupaten Lombok Tengah, diikuti Sumbawa Barat dan Sumbawa. Sedangkan APM terendah dicapai Kota Bima diikuti Kabupaten Dompu, Lombok Barat, Lombok Timur, Bima dan Kota Mataram. Untuk APM tingkat SMP/MTs, Kabupaten Sumbawa Barat dan Lombok Barat menempati rangking tertinggi dengan nilai masing-masing 86,88 persen dan 86,85 persen. Sedangkan terendah dicapai Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa Barat dan Lombok Tengah.

**Tabel 2.12**

Perkembangan APK, APM dan APS Provinsi NTB Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun Pelajaran 2003/2004 s.d 2007/2008

NO	JENJANG PENDIDIK	TAHUN	JUMLAH PUS	APK		APM		APS	
				N	%	N	%	N	%
1	TK/RA	2003/2004	235.706	36.046	15,29	na	na	na	Na
		2004/2005	149.858	41.075	15,38	na	na	na	Na
		2005/2006	147.310	42.237	33,42	na	na	na	Na
		2006/2007	165.272	49.361	29,87	na	na	na	Na
		2007/2008	166.630	57.949	34,78	na	na	na	Na
2	SD/MI	2003/2004	575.154	614.753	104,59	547.233	94,91	564.807	98,20
		2004/2005	573.975	617.841	107,64	556.476	96,95	564.380	98,33
		2005/2006	583.079	608.652	104,39	568.812	97,55	580.189	99,50
		2006/2007	579.646	615.246	106,14	565.693	97,59	576.563	99,47
		2007/2008	571.410	628.709	110,08	557.757	97,66	*	*
3	SMP/MTs	2003/2004	272.254	217.477	78,43	173.953	62,62	211.703	77,76
		2004/2005	284.317	234.438	83,04	203.551	72,10	235.284	84,69
		2005/2006	290.575	246.960	84,99	221.206	76,13	248.343	85,47
		2006/2007	302.331	246.427	90,68	235.012	77,73	262.588	86,85
		2007/2008	281.363	275.231	97,82	281.363	79,57	*	*
4	SMA/MA	2003/2004	268.456	125.221	46,64	99.100	36,91	112.267	41,82
		2004/2005	263.164	127.415	48,70	101.622	38,84	112.127	42,85
		2005/2006	273.470	138.987	50,82	114.017	41,69	127.465	46,61
		2006/2007	265.840	167.798	63,12	138.705	52,18	155.825	58,62
		2007/2008	295.701	173.400	58,64	144.567	48,89	*	*

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB

**Tabel 2.13**

APM Jenjang SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota se-NTB 2007/2008

No	Kabupaten/Kota	APM			
		SD/MI		SMP/MTs	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Lombok Barat	98.624	96,72	41.710	86,85
2	Lombok Tengah	112.371	98,80	43.609	76,57
3	Lombok Timur	135.752	97,53	53.216	79,31
4	Sumbawa	52.158	97,98	17.789	79,98
5	Dompu	32.033	96,39	13.487	79,17
6	Bima	61.900	97,89	24.507	77,08
7	Kota Mataram	38.616	97,93	16.748	75,15
8	Kota Bima	14.750	96,28	7.904	76,98
9	Sumbawa Barat	11.543	98,05	4.918	86,88
	<b>NTB</b>	<b>557.757</b>	<b>97,66</b>	<b>223.888</b>	<b>86,88</b>

Sumber: Dinas Dikpora NTB, 2008

Merujuk pada data nasional (Susenas, 2007) Angka Partisipasi Sekolah (APS) di NTB umur 7-12 tahun (SD/MI) mencapai 96,96 persen, mendekati angka rata-rata nasional yang 97,60 persen, sedangkan APS umur 13-15 tahun (SMP/MTs) mencapai 84,82 persen, yang berarti diatas rata-rata nasional yang 84,26 persen. Posisi pencapaian APS Provinsi NTB dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia dapat dilihat pada Tabel berikut

**Tabel 2.14**  
APS Menurut Usia Sekolah di Indonesia 2007/2008

No	Provinsi	APS (%)		No	Provinsi	APS (%)	
		SD/MI (7-12 Th)	SMP/MTs (13-15 Th)			SD/MI (7-12 Th)	SMP/MTs (13-15 Th)
1	Nangro Aceh Darussalam	98,93	93,90	18	Nusa Tenggara Barat	96,96	84,82
2	Sumatera Utara	98,31	90,72	19	Nusa Tenggara Timur	93,67	77,32
3	Sumatera Barat	97,78	88,35	20	Kalimantan Barat	96,71	83,74
4	R i a u	97,92	91,11	21	Kalimantan Tengah	98,23	86,14
5	Jambi	97,28	84,30	22	Kalimantan Selatan	97,21	78,50
6	Sumatera Selatan	97,43	83,85	23	Kalimantan Timur	97,99	90,47
7	Bengkulu	98,11	86,49	24	Sulawesi Utara	97,55	87,79
8	Lampung	97,90	84,70	25	Sulawesi Tengah	96,82	80,59
9	Kep. Bangka Belitung	96,30	79,11	26	Sulawesi Selatan	95,26	78,42
10	Kepulauan Riau	97,88	90,83	27	Sulawesi Tenggara	97,31	85,22
11	DKI Jakarta	98,73	90,36	28	Gorontalo	93,62	76,47
12	Jawa Barat	97,82	79,91	29	Sulawesi Barat	94,13	74,56
13	Jawa Tengah	98,65	83,54	30	Maluku	97,24	91,03
14	DI Yoyakarta	99,29	92,15	31	Maluku Utara	96,71	88,94
15	Jawa Timur	98,35	86,11	32	Irian Jaya Barat	93,17	88,24
16	Banten	97,45	80,30	33	Papua	83,34	77,84
17	B a l i	98,29	87,44		Indonesia	97,60	84,26

Sumber: Susenas, 2007

Selanjutnya, angka kelulusan siswa, melanjutkan dan tidak melanjutkan, serta siswa mengulang dan *drop out* pada setiap jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.15**

Data Kelulusan, Melanjutkan Tidak Melanjutkan, Mengulang dan DON Berdasarkan Jenjang Pendidikan periode 2003/2004 s.d 2006/2007

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN PELAJARAN	JUMLAH MURID	KELAS AKHIR	LULUSAN		MENGULANG		DO	
					N	%	N	%	N	%
1	SD/MI	2003/2004	539,456	90,398	87,687	97.00	35,631	6.60	41,387	7.67
		2004/2005	549,574	89,760	87,067	97.00	38,187	6.95	4,081	0.74
		2005/2006	544,096	91,965	89,287	97.09	32,679	6.01	4,178	0.77
		2006/2007	546,385	89,354	88,601	99.16	31,095	5.69	4,921	0.90
2	SMP/MTs	2003/2004	133,503	62,757	61,201	97.52	775	0.58	6,855	5.13
		2004/2005	135,867	63,773	61,860	97.00	790	0.58	3,901	2.87
		2005/2006	155,205	67,198	58,923	87.69	757	0.49	3,612	2.33
		2006/2007	162,561	72,695	63,929	87.94	627	0.39	8,536	5.25
3	SMA/MA/SMK	2003/2004	87,026	69,233	35,850	51.78	447	0.51	3,835	4.41
		2004/2005	91,475	72,421	37,115	51.25	366	0.40	4,532	4.95
		2005/2006	98,027	77,729	32,996	42.45	314	0.32	3,712	3.79
		2006/2007	107,532	44,831	37,034	82.61	828	0.77	5,247	4.88

Sumber : Dinas Dikpora Provinsi NTB

Angka melek huruf penduduk kelompok umur 10 tahun ke atas, dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Secara umum dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai angka 90 persen, angka melek huruf di NTB masih terbilang rendah.

**Tabel 2.16**

Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas Menurut Kemampuan Baca Tulis 2002-2007

No	Tahun	Melek Aksara	Buta Aksara
1	2007	82,44	17,56
2	2006	81,65	18,35
3	2005	81,70	18,30
4	2004	80,06	19,94
5	2003	78,68	21,32
6	2002	80,89	19,08

Sumber: BPS NTB, 2002-2008

Merujuk data BPS 2006 tentang indikator kesejahteraan, jumlah penduduk kelompok umur 15 tahun keatas yang melek huruf sekitar 83,7 persen untuk laki-laki dan 71,0 persen untuk perempuan. Angka ini jauh

dibawah rata-rata nasional sebesar 94,0 persen untuk laki-laki dan 86,8 persen untuk perempuan. Dibandingkan provinsi lainnya, angka melek huruf NTB hampir berada paling bawah, hanya satu tingkat lebih baik dibandingkan Papua saja.

**Tabel 2.17**  
Penduduk NTB Yang Masih Buta Aksara 2008  
Usia 15 Tahun Keatas

No	Kabupaten/Kota	Jumlah (orang)
1	Kabupaten Lombok Barat	69.961
2	Kabupaten Lombok Tengah	88.568
3	Kabupaten Lombok Timur	64.161
4	Kota Mataram	22.531
5	Kabupaten Sumbawa	28.719
6	Kabupaten Sumbawa Barat	6.023
7	Kabupaten Dompu	21.143
8	Kabupaten Bima	11.725
9	Kota Bima	3.369
<b>Jumlah</b>		<b>322.223</b>

Sumber: Dinas Dikpora NTB, 2008

Kecuali di kota Mataram, angka buta aksara kabupaten/kota di Pulau Lombok jauh lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota di Pulau Sumbawa. Angka buta aksara tertinggi terdapat di kabupaten Lombok Barat (16,48 persen) dan Lombok Tengah (10,77 persen). Sedangkan Kabupaten Sumbawa (2,33 persen) dan Dompu (4,56 persen) tercatat sebagai kabupaten yang paling berhasil mengentaskan buta aksara. Fakta ini sebenarnya cukup menggelitik, mengingat dari sisi aksesibilitas pendidikan, termasuk keberadaan dan kontribusi mayoritas lembaga kependidikan seperti pondok pesantren, Pulau Lombok jauh lebih baik dibandingkan dengan Pulau Sumbawa.

Jika ditilik dari komponen rata-rata lama sekolah, prestasi NTB terhitung terendah di Indonesia. Data BPS pada 2006 menyebutkan rata-rata lama sekolah di NTB hanya mencapai 6,5 tahun untuk laki-laki dan 5,2 tahun untuk perempuan. Jauh di bawah rata-rata nasional yang sudah mencapai 7,8 tahun untuk laki-laki dan 6,7 tahun untuk perempuan. Sebuah fakta yang kian meneguhkan pembangunan manusia NTB selama ini memang berjalan di tempat, hampir tanpa perubahan yang signifikan.

**Tabel 2.18**

Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin pada Beberapa Provinsi

No	Provinsi	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	
		Laki-laki	Perempuan
1	Bali	8,1	6,4
2	<b>Nusa Tenggara Barat</b>	<b>6,5</b>	<b>5,2</b>
3	Nusa Tenggara Timur	6,6	5,8
4	Gorontalo	6,6	6,9
5	Maluku	8,8	8,1
6	Maluku Utara	8,1	6,9
7	Papua	6,8	5,3
	<b>Indonesia</b>	<b>7,8</b>	<b>6,7</b>

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS 2006

## B. Kesehatan

Persoalan kesehatan, terutama masalah kematian bayi dan balita menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi pemerintah daerah NTB. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang meninggal dalam usia kurang dari setahun sejak kelahiran dihitung tiap 1.000 kelahiran hidup. sedangkan Angka Kematian Balita adalah jumlah anak yang meninggal dalam 1.000 kelahiran hidup di bawah usia lima tahun.

**Tabel 2.19**

Angka Kematian Bayi Provinsi NTB, 2005-2007

No	Kabupaten/Kota	Angka Kematian Bayi (1/1.000 KH)		
		2005	2006	2007
1	Lombok Barat	80,1	79,1	77,8
2	Lombok Tengah	81,9	77,3	76,4
3	Lombok Timur	81,3	80,5	75,9
4	Sumbawa	79,2	75,0	72,8
5	Dompu	72,7	72,7	70,5
6	Bima	76,7	73,2	66,5
7	Sumbawa Barat	*	76,8	74,5
8	Kota Mataram	56,7	55,5	50,2
9	Kota Bima	**	62,1	57,1
	<b>NTB</b>	<b>73,5</b>	<b>73,2</b>	<b>61,2</b>

Sumber BPS NTB, 2008

Pada 2002, rata-rata nasional AKB berkisar 45 dalam 1.000 kelahiran hidup, sedangkan AKB pada tahun yang sama di NTB mencapai

---

73,5 dalam 1.000 kelahiran hidup. Pada 2007, AKB tertinggi terjadi di Kabupaten Lombok Barat, menyusul Lombok Tengah dan Lombok Timur. Kota Mataram sebagai ibukota provinsi dengan fasilitas kesehatan paling lengkap dan tingkat pendidikan masyarakatnya rata-rata paling tinggi, wajar jika Indeks Kesehatan Masyarakat juga tinggi.

Yang menarik untuk dianalisis antara kabupaten Lombok Barat dengan kabupaten Bima. Dari segi infrastruktur kesehatan, rasio jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu dengan jumlah desa di kabupaten Lombok Barat 1 berbanding 1.287, sedangkan di Kabupaten Bima 1 berbanding 1.759. Namun fakta menunjukkan AKB di Bima pada 2005 hanya 66,5 jauh lebih rendah dibandingkan Lombok Barat yang sebesar 77,8. Ini menunjukkan infrastruktur kesehatan yang lebih baik bukan jaminan rendahnya AKB di sebuah daerah. Faktor perilaku kesehatan yang justru dominan membuat Lombok Barat menjadi begitu besar angka kematian bayinya.

Faktor yang menyebabkan tingginya AKB di NTB masih didominasi adanya gangguan *perinatal*, gangguan sistem pernafasan dan diare. Dari hasil survei diketahui kematian *neonatal* banyak terjadi di daerah pedesaan. Lebih dari 70 persen kematian bayi terjadi pada minggu pertama kelahiran (0-7 hari) dan sisanya sebesar 20,6 persen terjadi pada usia kelahiran 8-28 hari (*prenatal*). Persoalan kematian bayi tersebut sangat dipengaruhi keberhasilan program imunisasi dan manajemen penanggulangan bayi sakit. Terungkap fakta 54,2 persen kasus kematian *neonatal* melahirkan di rumah, artinya tidak dibawa ke puskesmas atau polindes.

Dari segi perawatan kesehatan pasca melahirkan, sebagian besar bayi yang mengalami *neonatal*, tidak dibawa berobat ke sarana kesehatan yang ada, dengan kata lain hanya mengandalkan perawatan tradisional di rumah tanpa memeriksakan kesehatan bayinya ke puskesmas atau polindes. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang lahir kurang dari 2.500 gram menjadi faktor yang cukup menonjol sebagai penyebab kematian bayi. Hal ini terjadi akibat gizi buruk, anemia, malaria, dan penyakit menular seksual sebelum konsepsi atau ketika hamil.

Setelah AKB, Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) adalah salah satu indikator utama mengetahui derajat kesehatan masyarakat dalam suatu wilayah. AKI adalah jumlah kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Secara nasional, berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), AKI Indonesia sebesar 307 pada setiap 100.000 kelahiran hidup. Sementara di NTB, AKI mencapai 370 pada setiap 100.000 kelahiran hidup. Ini merupakan AKI tertinggi di Indonesia, bahkan juga di kawasan Asia.

Penyebab tingginya AKI ini disinyalir bersumber dari penyakit akut atau kronis yang menyertai kehamilan, nutrisi yang jelek dan anemia. Kebiasaan “empat terlalu”, yaitu terlalu muda hamil, terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak kelahiran, dan terlalu tua melahirkan juga menjadi faktor tidak langsung dari besarnya AKI di NTB. Ditambah lagi perilaku masyarakat yang belum mempraktekkan pola hidup sehat sebagai pengaruh budaya atau tradisi, pendidikan yang relatif rendah, dan akses terhadap air bersih dan sanitasi lingkungan yang masih kurang memadai.

**Tabel 2.20**  
Jumlah Kasus Komplikasi dan Kematian Maternal 2005

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Komplikasi Maternal	Jumlah Kematian Maternal	
			Total	% dari Total Kasus
1	Lombok Barat	1.270	21	1,7
2	Lombok Tengah	2.119	15	0,7
3	Lombok Timur	2.107	17	0,8
4	Sumbawa	398	12	3,0
5	Dompu	577	15	2,6
6	Bima	675	17	2,5
7	Sumbawa Barat	66	0	0
8	Kota Mataram	649	3	0,5
9	Kota Bima	616	8	1,3
	<b>NTB</b>	<b>8.477</b>	<b>108</b>	<b>1.3</b>

Sumber: Dinas Kesehatan NTB, 2006

**Tabel 2.21**  
Jumlah Kasus dan Kematian Penyakit Menular di Provinsi NTB

NO	JENIS PENYAKIT	2006		2007		2008	
		KASUS	MATI	KASUS	MATI	KASUS	MATI
1	Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) Balita	283.147	53	264.979	64		
2	Diare			198.550	4	137.686	-
	Diare Balita	96.032	8	96.824	3		
3	TBC PARU	3.756	174	3.003	*)	3.112	*)
4	Malaria	79.958	0	90.767	16**)	99.004	5**)
5	Kasus HIV ditemukan	23	0	112	0	137	*)
6	Kasus AIDS ditemukan	15	7	21	23***)	83.000	51.000
7	DBD			730	2	777	4

Sumber: Dinas Kesehatan NTB Tahun 2008

Ket : \*)Laporan belum masuk; \*\*) Kematian saat KLB di Kab. Lotim ; \*\*\*) Termasuk kematian dari kasus yang ditemukan tahun sebelumnya

Terkait dengan sumberdaya kesehatan, baik tenaga kesehatan maupun sarana prasarana kesehatan harus diakui kebutuhan di NTB masih jauh dari memadai. Terlebih lagi jika memperhitungkan rasio kebutuhan sesuai dengan pencapaian visi Indonesia Sehat 2010. Secara rinci keberadaan sumberdaya kesehatan NTB tergambar pada Tabel 2.22 dan Tabel 2.23

### C. Tenaga Kerja

Jumlah penduduk NTB yang bekerja pada 2007 mencapai 1.951.182 jiwa. Sektor Pertanian menyerap tenaga kerja terbesar. Sektor ini umumnya tidak banyak membutuhkan tenaga kerja terdidik dan terampil. Lebih banyak melibatkan pekerja tradisional atau marjinal (buruh tani) dengan tingkat upah yang rendah. Pada 2007 terdapat sekurangnya 135 ribu penduduk NTB yang menganggur. Termasuk didalamnya angkatan kerja yang masih mencari pekerjaan atau biasa disebut "pengangguran terbuka".

Dari angkatan kerja yang ada, sebanyak 34.684 orang (25,65 persen) diantaranya masih mencari pekerjaan. Ada kecenderungan kesenjangan yang semakin besar antara angkatan kerja baru dengan penyerapan tenaga kerja. Rendahnya daya saing dan jiwa kewirausahaan berakibat pada rendahnya penyerapan tenaga kerja. Persentase penyerapan tenaga kerja di NTB pada 2007 mencapai 19.440 Orang (68,55 persen), dimana

**Tabel 2.22**  
**Rekapitulasi Sarana Kesehatan di Provinsi NTB Tahun 2008**

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Jml RS	Jumlah Puskesmas & Kondisi Bangunan			Jenis Puskesmas		Jml Apotik	Jumlah Pustu & Kondisi Bangunan			Sarana UKBM				Rumah Dinas			Sarana Transportasi PUSK.								
				B	RR	RB	Jml	Pwrtm		Non Pwrtm	B	RR	R B	Pos-yandu	Polin des	POD	Dr/ Drg	Para- medis	Pusing R-4	P B	Amb ulan	Spd Motor	Lain					
																								7	1	15	2	0
1	Kota Mataram	356.141	4	7	1	0	8	7	1	11	15	2	0	17	322	15	0	12	17	0	0	0	0	0	0	0	78	0
2	Kab. Lombok Barat	796.107	1	12	4	3	19	11	8	74	54	19	2	75	926	86	17	0	0	0	0	0	0	0	0	23	125	0
3	Kab. Lombok Tengah	831.286	2	12	10	0	22	22	0	12	50	15	5	70	1.356	99	99	41	84	24	0	0	0	0	0	0	164	0
4	Kab. Lombok Timur	1.056.312	1	9	0	0	29	29	0	23	50	26	0	76	1.279	104	57	42	53	33	1	0	0	0	0	103	0	0
5	Kab. Sumbawa	406.888	1	20	1	0	21	5	16	4	58	5	21	84	580	69	8	21	39	17	0	0	0	0	0	86	0	0
6	Kab. Sumbawa Barat	97.013	-	8	0	0	8	5	3	14	16	19	0	17	150	15	0	8	10	8	0	0	0	0	0	23	0	0
7	Kab. Dompu	208.867	1	4	5	0	9	4	5	9	9	23	14	46	310	44	5	14	47	15	0	0	0	0	0	98	0	0
8	Kab. Bima	412.504	1	16	3	1	20	20	0	13	29	26	13	68	522	82	23	22	41	20	2	0	0	0	0	78	0	0
9	Kota Bima	127.373	-	5	0	0	5	2	3	1	25	0	0	25	135	17	0	0	0	0	0	0	0	0	11	107	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>4.292.491</b>	<b>10</b>	<b>113</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>141</b>	<b>105</b>	<b>36</b>	<b>182</b>	<b>306</b>	<b>117</b>	<b>55</b>	<b>478</b>	<b>5.580</b>	<b>531</b>	<b>209</b>	<b>160</b>	<b>291</b>	<b>144</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber: Dinas Kesehatan NTB, 2008

**Tabel 2.23**  
Rekapitulasi Tenaga Kesehatan di Provinsi NTB 2008

No	Jenis Tenaga	Ratio Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk	Ratio Sekarang	Jumlah Tenaga Kesehatan (orang)		
				Kebutuhan s.d Tahun 2010	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
1	Dokter Spesialis	6	1.54	258	66	192
2	Dokter Umum	40	8.50	1717	365	1352
3	Dokter Gigi	11	2.63	472	113	359
4	Perawat	117	59.99	5022	575	2447
5	Bidan	100	28.79	4292	1236	3056
6	Perawat Gigi	30	4.03	1288	173	1115
7	Apoteker	10	1.35	429	58	371
8	Ass. Apoteker	30	2.87	1288	123	1165
9	SKM	40	6.87	1717	295	1422
10	Sanitarian	40	9.25	1717	397	1320
11	Nutrisionis/Ahli Gizi	22	9.02	944	387	557
12	Keterampilan Fisik	4	0.54	172	23	149
13	Keteknisian Medis	15	8.32	644	357	287
<b>Jumlah</b>		<b>465</b>	<b>1.437</b>	<b>1.960</b>	<b>6.168</b>	<b>1.3792</b>

Sumber: Dinas Kesehatan NTB, 2008

---

penyerapan tertinggi terjadi di Kabupaten Lombok Tengah yang mencapai 25,58 persen. Sedangkan penyerapan terendah di Kota Bima, sebesar 0,12 persen.

#### **D. Kesejahteraan Sosial**

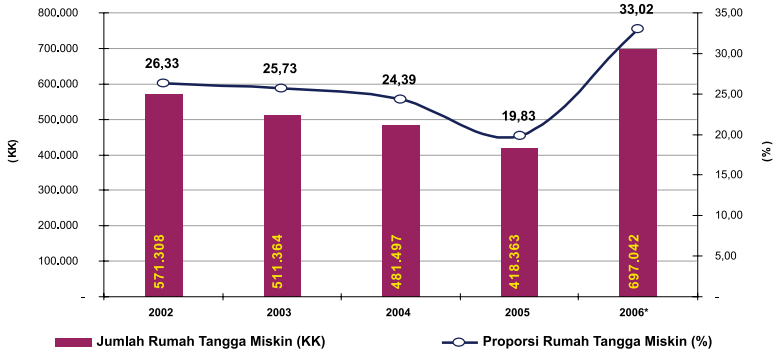
Jumlah penduduk miskin di NTB secara prosentase mengalami penurunan. Bila pada 2004 penduduk miskin mencapai 1.073 juta jiwa (26,80 persen), maka pada 2005 menjadi 1.007 juta jiwa (24,70 persen). Lalu pada 2006 turun menjadi 1.003 juta jiwa (24 persen), meskipun ada juga yang menyebutkan terjadi lonjakan penduduk miskin sebesar 1.990 juta jiwa (47,72 persen) pada 2006 setelah terjadi kenaikan bahan bakar minyak.

Penduduk miskin di NTB tersebar di pesisir pantai, di daerah subur pertanian, hingga di lingkaran tambang dan hutan. Potret masyarakat lingkaran hutan Rinjani, bisa menjadi contoh terang perihal kemiskinan. Dari 600 ribu jiwa yang bermukim di sana, 70 persen tergolong kaum miskin papa. Jika indikator non ekonomi juga dipakai, maka prosentase kemiskinan itu bisa melonjak drastis hingga 90 persen. Padahal jumlah populasi penduduk di lingkaran hutan Rinjani setara dengan 19,56 persen populasi penduduk pulau Lombok yang mencapai 2,4 juta jiwa. Masyarakat lingkaran tambang sama juga nasibnya. Ambil contoh masyarakat Sekongkang, salah satu wilayah di lingkaran tambang di Sumbawa Barat. Di tengah gemuruh derap industri tambang raksasa Newmont berbendera Amerika yang beroperasi di sana, ribuan rumah tangga di Sekongkang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah. Artinya, hidup mereka hanya bisa bertahan karena "belas kasihan" negara.

Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan daerah tergantung kepada dua faktor. *Pertama*, tingkat pendapatan daerah rata-rata. *Kedua*, lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang diperoleh dari perbandingan angka persentase penduduk dan pendapatan riil tahunan. Dari 2001 hingga 2004, tingkat pendapatan daerah perkapita menunjukkan grafik yang meningkatnya. Jurang kemiskinan di NTB berbentuk kurva parabolik yang menggambarkan tingginya angka kemiskinan. Indeks Kemiskinan NTB sebesar 25,1 persen, berada pada ranking ke 17 secara nasional.

**Grafik. III**

**Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Miskin Tahun 1999-2006**



Ket: \*Angka Prediksi, diperkirakan pada 2006 rumah tangga miskin meningkat karena perubahan metode perhitungan

Sumber: BKKBN dan BPS, 2006

Tingkat kemiskinan secara tidak langsung juga bisa tergambarkan dari besarnya Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pada 2007 angka PMKS NTB sekitar 1,1 juta jiwa. Keluarga fakir miskin adalah PMKS terbesar di NTB. Jumlahnya ditaksir sekitar 369 ribu jiwa. Masalah anak terlantar juga besar sejumlah 227.623 jiwa, kemudian keluarga yang tinggal di tempat tidak layak huni sebanyak 136.032 jiwa, disusul masalah lanjut usia terlantar 83.028 jiwa dan wanita rawan sosial ekonomi 70.245 jiwa. Diluar itu masih ada korban bencana alam sejumlah 36.222 jiwa, korban penyalahgunaan narkoba 32.041 keluarga, penyandang cacat 21.120 keluarga, bekas penyandang penyakit kronis 3.659 jiwa, gelandangan dan pengemis 843 jiwa, tuna susila 470 jiwa, dan keluarga pahlawan 464 jiwa.

Sedangkan penyandang cacat di NTB pada 2007 berjumlah 20.914 jiwa, naik dari 18.320 pada tahun 2006. Penyandang cacat anggota badan jumlahnya paling dominan sebesar 10.954 jiwa, lalu tunanetra 4.108 jiwa, tunawicara 3.088 jiwa, dan cacat mental 2.764 jiwa. Dilihat dari jumlah kasus PMKS, terjadi ketimpangan yang signifikan antara kabupaten dan kota. Jumlah kasus PMKS di seluruh kabupaten pada 2006 tercatat sebesar 902.258 atau 88,63 persen. Pada 2007 meningkat menjadi 905.802 kasus atau 87,63 persen. Sementara untuk kasus PKMS di kota pada 2006

---

jumlahnya sebesar 115.657 atau 11,36 persen. Meningkat menjadi 129.334 atau 12,37 persen pada 2007. Secara umum Lombok Barat tercatat sebagai kabupaten dengan angka total kasus PMKS tertinggi.

Potensi dan sumberdaya kesejahteraan masyarakat seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Organisasi Sosial (Orsos) dan karang taruna, perkembangannya cukup mengembirakan. Saat ini jumlah PSM di NTB sebanyak 5.970 orang, WKSBM 3.310, Orsos 294 dan karang taruna 1.492. Potensi kelembagaan sosial yang cukup beragam dan signifikan jumlahnya tersebut, menjadi modal dasar untuk mendorong perbaikan stimulus penanggulangan masalah sosial.

## **E. Pariwisata**

Provinsi NTB dengan dua pulau terbesarnya Lombok dan Sumbawa, memiliki kekayaan budaya yang atraktif dan variatif sehingga sangat prospektif bagi pengembangan kepariwisataan. Karakteristik budaya yang multietnik dengan tiga suku utamanya Sasak di Pulau Lombok, Samawa di bagian tengah hingga barat Pulau Sumbawa dan Mbojo di bagian tengah hingga timur Pulau Sumbawa, serta diperkuat dengan budaya etnik Bali, Jawa, Melayu, Bugis, Timor, Banjar, Cina, Arab, menjadikan NTB ibarat miniatur Indonesia dan mozaik budaya nusantara.

Panorama alam dari puncak pegunungan, lembah dan ngarai serta hamparan lahan pertanian yang mempesona, hingga bentangan pantai, laut dan gugusan terumbu karang yang masih lestari, menjadi kekuatan lain untuk menarik minat kunjungan wisatawan. Selain mengandalkan wisata berbasis budaya dan mengandalkan panorama alam, sebagai sebuah destinasi, NTB memiliki daya saing untuk kegiatan wisata yang bersifat spesifik, seperti menyelam, arung jeram, pendakian, ziarah ritual, dan penelusuran gua.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 1989 tentang Pembangunan Kawasan Pariwisata di Daerah Nusa Tenggara Barat, terdapat 15 kawasan pengembangan pariwisata. 9 kawasan tersebar di Pulau Lombok, 6 kawasan lainnya terdapat di Pulau Sumbawa. 15 kawasan tersebut meliputi

- 
1. Kawasan Pariwisata Suranadi dan sekitarnya (96 Ha.)
  2. Kawasan Pariwisata Sire, Gili Air, Senggigi dan sekitarnya (1.800 Ha.)
  3. Kawasan Pariwisata Gili Gede dan sekitarnya (2.590 Ha.)
  4. Kawasan Pariwisata Kuta, Seger, A'an dan sekitarnya (2.590 Ha.)
  5. Kawasan Pariwisata Selong Belanak dan sekitarnya (480 Ha.)
  6. Kawasan Pariwisata Rinjani dan sekitarnya (17.100 Ha.)
  7. Kawasan Pariwisata Gili Indah dan sekitarnya (650 Ha.)
  8. Kawasan Pariwisata Gili Sulat dan sekitarnya (1.317 Ha.)
  9. Kawasan Pariwisata Dusun sade dan sekitarnya (315 Ha.)
  10. Kawasan Pariwisata Pulau Moyo dan sekitarnya (1.528 Ha.)
  11. Kawasan Pariwisata Pantai Maluk dan sekitarnya (376 Ha.)
  12. Kawasan Pariwisata Pantai Hu'u dan sekitarnya (2.756 Ha.)
  13. Kawasan Pariwisata Sape dan sekitarnya (203 Ha.)
  14. Kawasan Pariwisata Teluk Bima dan sekitarnya (201 Ha.)
  15. Kawasan Pariwisata Tambora dan sekitarnya (2.526 Ha.)

Belasan kawasan pariwisata potensial ini, tentunya butuh sentuhan tangan dingin yang mampu mendesain perencanaan strategis melalui terobosan inovatif guna menghasilkan nilai tambah berupa kesejahteraan masyarakat. Sejumlah hal harus mulai disiapkan secara dini. Mulai dari pembenahan sikap mental aparat pemerintah, penyiapan pelaku usaha pariwisata yang profesional, membangun jaringan pemasaran dan promosi yang efektif dan efisien, hingga memperbaiki kualitas destinasi.

---

## 2.4 Sarana dan Prasarana Daerah

Sampai 1999, secara nasional kualitas jalan di NTB tergolong salah satu yang terbaik di Indonesia. Belakangan kualitas jalan mengalami penurunan drastis. Dari sekitar, 7,4 ribu kilometer ruas jalan provinsi, kabupaten dan kota, lebih dari 2.000 kilometer atau hampir 30 persen dalam kondisi rusak berat. Kerusakan terparah ada pada ruas jalan kabupaten-kota yang mencapai 33,55 persen atau sekitar 1,7 ribu kilometer. Sementara kerusakan pada ruas jalan provinsi mencapai 26,75 persen atau 480,63 kilometer.

Banyak dari ruas jalan yang rusak itu berada di wilayah pengembangan wisata yang potensial. Seperti ruas jalan menuju Pulau Moyo dan Danau Satonda di daratan Pulau Sumbawa. Persoalan lainnya, ada pada ketimpangan yang cukup mencolok antara ketersediaan jalan di Pulau Lombok dan Sumbawa. Jika di Pulau Lombok, setiap 1 kilometer persegi luas wilayah, terdapat jalan 0,66 kilometer dan setiap 1,1 kilometer jalan melayani 1.000 jiwa, maka di daratan Sumbawa, setiap 1 kilometer persegi hanya terdapat jalan 0,28 kilometer dan setiap 1.000 jiwa dilayani jalan 3,66 kilometer.

**Tabel 2.24**  
Kondisi Jalan Nasional dan Provinsi di NTB 2007

NO	Status	Panjang (km)	Konstruksi (km)			Kondisi (km)	
			Diaspal	Kerikil	Tanah	Mantap	Tidak Mantap
1	Nasional	601,83	601,83	0	0	459,93	141,90
2	Provinsi	1.842,33	1.317,36	214,82	310,13	821,56	872,57
3	Kabupaten	4.910,24	2.328,97	2.581,27	0	3.646,55	1.263,69
	<b>Jumlah</b>	<b>7.354,40</b>	<b>4.247,98</b>	<b>2.796,09</b>	<b>310,13</b>	<b>4.928,04</b>	<b>2.278,16</b>

Sumber : Dinas Kimpraswil Prov. NTB, 2008

Kinerja pelayanan pada ruas jalan provinsi, pada umumnya cukup baik dengan rasio volume lalu lintas per kapasitas rata-rata sebesar 0,4. Kemacetan lalu-lintas pada umumnya bersifat lokal dan temporer yang terjadi pada pusat-pusat kegiatan masyarakat (hari pasaran) dan upacara adat masyarakat. Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk NTB yang telah mencapai 4.292.491 jiwa dan asumsi laju pertumbuhan penduduk sebesar 2-3 persen tiap tahunnya, maka kebutuhan akan ketersediaan prasarana jalan semakin meningkat pula.

Provinsi NTB yang berada di sebelah barat Pulau Jawa dan Bali memiliki posisi strategis baik skala lokal, regional, nasional bahkan internasional. Diperlukan fasilitasi pergerakan barang dan penumpang dari dan ke pusat-pusat kegiatan nasional, regional maupun lokal. Dari sudut inilah menjadi penting sekali pembangunan sektor perhubungan guna mengoptimalkan posisi geografis NTB yang strategis.

Di NTB terdapat tujuh pelabuhan laut utama: Lembar, Kayangan, Pototano, Badas, Bima, Sape, dan Calabai. Sementara pelabuhan udara berlokasi di tiga tempat: bandara Selaparang di Kota Mataram, bandara

---

Brangbiji di Kabupaten Sumbawa, dan bandara Sultan Salahuddin di Kabupaten Bima. Saat ini sedang dibangun Bandara Internasional Lombok (BIL) di Kabupaten Lombok Tengah yang masih dalam tahap konstruksi dan direncanakan akan beroperasi Desember 2009.

## 2.5 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Luas daratan NTB yang lebih dari 20 ribu kilometer persegi menyimpan kekayaan dan keanekaragaman sumberdaya alam. Meliputi sumberdaya hutan dengan luas 1.1 juta hektar yang terdiri dari hutan lindung seluas 448 ribu hektar, hutan konservasi seluas 169 ribu hektar dan hutan produksi 453 ribu hektar. Disamping itu, sumber daya lahan untuk pengembangan pertanian juga menjanjikan. Saat ini telah dikembangkan 230,5 ribu hektar lahan persawahan irigasi, 127 ribu hektar sawah tadah hujan, serta 103,5 ribu hektar area perkebunan. Belum termasuk lahan pertanian, budidaya palawija, hortikultura, sayuran dan buah-buahan.

Laju kerusakan hutan NTB setiap tahun bisa mencapai 20 ribu hektar. Padahal kemampuan merehabilitasinya hanya mencakup 4-5 ribu hektar. Ini jelas mencemaskan mengingat dampak dari kerusakan hutan itu tak terperikan. Mengutip data Bappeda, sepanjang kurun waktu 15 tahun dari 1985 hingga 2000, teridentifikasi 440 titik mata air hilang. Kini, hanya tersisa sekitar 260 titik mata air. Jika laju kerusakan hutan NTB kian tak terkendali, tak ada yang berani menjamin sisa titik mata air yang ada tetap bisa abadi.

Kondisi sumberdaya terumbu karang di perairan Lombok sangat memprihatinkan. Hanya tersisa kurang dari 10 persen yang terjaga sangat baik, 17 persen dalam keadaan baik, dan sisanya lebih dari 75 persen sangat jelek. Kerusakan terumbu karang ini sebagian besar akibat aktifitas manusia, seperti penangkapan ikan menggunakan sianida, bahan peledak, dan jaring muroami. Selain itu, bisa juga karena polusi rumah tangga maupun industri pariwisata, pelepasan jangkar perahu, menyelam dengan menginjak karang, penambangan batu karang untuk dijadikan kapur dan pengayaan air laut karena adanya fosfat dan nitrogen yang berasal dari kegiatan pertanian di hulu.

---

Pencemaran lingkungan juga perlu dicermati di NTB. Terutama karena adanya pertambangan raksasa PT Newmont Nusa Tenggara di Pulau Sumbawa. Sejak 2002 pembuangan limbah tambang (*tailing*) ke dasar laut teluk Senunu mendapat sorotan luas sejumlah kalangan. Newmont membuang *tailing* dalam bentuk lumpur tidak kurang dari 110 ribu sampai 160 ribu ton perhari pada kedalaman 112 meter dan dengan kecepatan aliran 2.010–6.163 ton per jam. Hal ini Newmont lakukan sejak 1999 dengan kadar 60 kali lebih besar dari limbah yang dibuang Newmont Minahasa Raya di Buyat Pante, Sulawesi Utara. Besarnya jumlah limbah *tailing* yang dibuang Newmont ke laut sungguh sangat mengkhawatirkan. Walaupun lokasi pembuangan itu tidak berdekatan dengan lokasi pemukiman penduduk, namun lokasi pembuangan tadi termasuk daerah yang memiliki aktifitas perikanan cukup tinggi. Banyak nelayan yang mencari ikan di sekitar lokasi pembuangan limbah Newmont. Kekhawatiran itu juga dikuatkan dengan lokasi Nusa Tenggara, yang termasuk daerah rawan gempa karena berada di jalur lempeng benua.

Disamping itu, indikasi adanya pencemaran di atas ambang toleran juga terjadi di sejumlah sungai, seperti Kali Ancar dan Kali Jangkok yang membelah kota Mataram. Pencemaran terjadi sebagai akibat pemekaran kawasan permukiman dan industri serta penataan tata kota yang . Pada kawasan perkotaan, khususnya Kota Mataram sebagai ibukota NTB, pencemaran akibat polusi juga mulai jadi masalah yang harus dipikirkan sedini mungkin.

## **Bab III**

# **Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pembiayaan**

---

- 3.1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3.2. Bidang Pendapatan Daerah
  - A. Gambaran Pendapatan Daerah 2005-2007
  - B. Kebijakan Pendapatan Daerah 2009-2013
- 3.3. Bidang Belanja Daerah
- 3.4. Kebijakan Umum Anggaran



Pantai Senggigi- Salah satu obyek wisata  
kebanggaan Provinsi NTB

## Bab III

# Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, kebijakan otonomi diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Beberapa perubahan mendasar dalam sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah menuntut dilakukannya sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek anggaran, akuntansi, dan pemeriksaan. Serangkaian perubahan tersebut mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan konsep *money followfunction*, yaitu pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Konsep itu sendiri mengandung tiga elemen yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publiknya, yaitu: (i) secara ekonomis dapat meminimalisir input *resources* yang digunakan; (ii) efisiensi mencapai hasil yang optimal dengan biaya yang minimal (*output/input*); dan (iii) efektifitas mencapai target yang ditetapkan (*outcome/output*)

Penganggaran yang sesuai kemampuan keuangan daerah, diarahkan dan dikelola berazaskan: (i). Fungsi otorisasi, sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan; (ii). Fungsi perencanaan, menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan; (iii). Fungsi pengawasan, menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; (iv). Fungsi alokasi, mengarahkan anggaran daerah untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian; (v). Fungsi distribusi, yaitu kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; (vi). Fungsi stabilisasi, menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

---

Berdasarkan sejumlah fungsi tersebut, penyusunan pendapatan dan belanja daerah 2009-2013, harus merujuk kepada sejumlah norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut meliputi:

1. *Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah*: merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau yang dianggarkan;
2. *Disiplin Anggaran*: program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan;
3. *Keadilan Anggaran*: pendapatan pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa dikriminasi dalam pemberian pelayanan;
4. *Efisiensi dan Efektivitas Anggaran*: dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah tidak hanya melakukan *vertical reporting*, tetapi lebih penting daripada itu juga melakukan *horizontal reporting* sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban publik meliputi beberapa hal mendasar, yaitu akuntabilitas regulasi daerah, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.

---

Akuntabilitas regulasi daerah terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain dalam penggunaan sumberdaya publik. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan telah memberikan pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan *feasible* dan *reliable*, serta apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintahan terhadap kebijakan politik yang diambil pemerintah dan lembaga legislatif.

Bertitik tolak dari norma dan prinsip anggaran tersebut, maka kebijakan anggaran baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kesenjangan fiskal anggaran berupa defisit antara pendapatan dan belanja terjadi selama periode 2002-2007. Besarannya bervariasi namun masih berada dibawah batas ambang yang diperkenankan perundang-undangan. Defisit anggaran memberikan kontribusi terhadap tingkat inflasi daerah.
2. Alokasi anggaran daerah periode 2002-2007 berdasarkan perbandingan antara belanja aparatur dan publik dengan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Perbandingan ini merupakan indikator mengukur keberpihakan anggaran pemerintah daerah terhadap kepentingan pelayanan masyarakat.

Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal yang dipergunakan mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi. Adapun kewenangan provinsi meliputi urusan wajib, urusan pilihan dan urusan lintas pemerintah daerah yang ditetapkan perundang-undangan.

Agar perekonomian daerah tidak sekedar tumbuh, tetapi dapat mengakomodasi masa depan sesuai dengan perubahan yang terjadi pada aspek lingkungan, maka strategi Pemerintah Provinsi NTB 2009-2013 dalam mengatasi permasalahan penganggaran adalah:

- 
1. Peningkatan penerimaan daerah, khususnya PAD
  2. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pada sisi pengeluaran
  3. Peningkatan kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta khususnya dalam penyediaan infrastruktur

Dengan strategi ini, kemampuan daerah dalam penyediaan fasilitas pelayanan umum dan infrastruktur lainnya diharapkan akan meningkat. Hasil akhirnya, pemerintah daerah akan dapat menarik investasi dalam maupun luar negeri, yang berdampak terhadap peningkatan kemakmuran masyarakat dan mempertajam daya saing daerah.

---

### 3.1 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

---

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberi keleluasan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi utamanya melayani masyarakat melalui pelimpahan kewenangan yang meliputi aspek politik, administratif maupun fiskal. Khusus dalam aspek keuangan, seperti yang tertuang dalam penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah bertindak sebagai *Chief Financial Officer (CFO)* yang dibantu lembaga berupa badan, dinas, biro, kantor dan UPTD. Kepala Satuan Kerja bertindak sebagai *Chief Operation Officer (COO)*. Prinsip pemisahan ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya *checks and balances* serta mendorong peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Inti dari pengelolaan keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Keuangan daerah merupakan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

---

Pembiayaan dapat dikategorikan sebagai kegiatan *investatif* berdimensi waktu jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Mengingat kemampuan keuangan daerah untuk investasi masih sangat terbatas, maka kebijakan pembiayaan sebaiknya diorientasikan pada hal-hal yang bersifat realistis dalam bentuk deposito berjangka dengan lama waktu yang disesuaikan dengan *cash flow* pendapatan dan pengeluaran belanja serta kegiatan lain yang memiliki tingkat resiko rendah.

---

## 3.2 Bidang Pendapatan Daerah

---

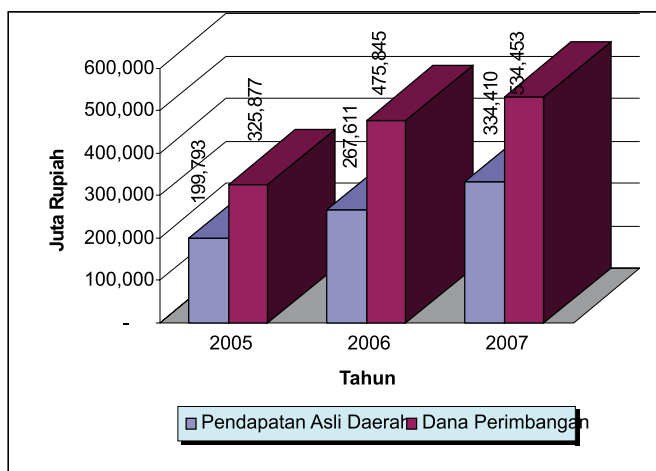
Keuangan daerah terdiri dari pendapatan dan belanja daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin dari proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Sebelum menentukan arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan kebijakan umum anggaran lima tahun yang akan datang, maka perkembangan struktur pendapatan dan belanja perlu dibahas.

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan merupakan transfer pemerintah kepada daerah yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

### A. Gambaran Pendapatan Daerah 2005–2007

Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi NTB selama kurun waktu 2005-2007 seluruhnya berjumlah Rp 2.144.891.106.333,84, terdiri dari pendapatan asli daerah Rp 801.816.200.003,84 atau sekitar 37,38 persen, dana perimbangan Rp 1.336.175.906.330,00 atau sekitar 62,29 persen dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 6.899.000.000,00. Jelas terlihat dari komposisi pendapatan daerah tersebut ketergantungan daerah terhadap penerimaan dari pemerintah masih cukup besar.

Adapun Pendapatan Daerah NTB pada kurun waktu 2005–2007 secara grafis disajikan pada Gambar 3.1 dan secara terinci disajikan pada Tabel 3.1.



**Gambar 3.1.**

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2005 – 2007

Sumber: Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi NTB, 2008

**Tabel 3.1**

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2005-2007

URAIAN	REALISASI		
	2005	2006	2007
PENDAPATAN	532.570.086.597,99	743.457.163.858,34	868.863.855.877,51
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH	199.793.919.971,99	267.611.679.175,34	334.410.600.856,51
a. Pajak Daerah	146.952.541.168,00	190.503.879.501,00	258.576.863.634,00
b. Restribusi Daerah	24.112.156.584,00	28.241.991.528,80	30.355.729.680,80
c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Syah	10.810.826.100,00	23.281.278.481,00	14.747.528.832,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.918.396.119,99	25.584.529.664,54	30.730.478.709,71
B. DANA PERIMBANGAN	325.877.166.626,00	475.845.484.683,00	534.453.255.021,00
a. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	75.990.166.626,00	71.700.484.683,00	86.795.255.021,00
b. Dana Alokasi Umum	249.887.000.000,00	404.145.000.000,00	447.658.000.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	-	-	-
d. Dana Kontijensi	-	-	-

Sumber : Bappeda Provinsi NTB

---

Berdasarkan gambaran tersebut di atas, maka kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan *pertama*, peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah yang sudah ada dengan program pendukung peningkatan penerimaan daerah, pengembangan kelembagaan dan pengembangan agribisnis. *Kedua*, penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan peningkatan dana pembangunan yang masuk ke NTB, dengan program pendukung peningkatan penerimaan daerah. *Ketiga*, penggalian sumber-sumber pendapatan baru tanpa mengganggu iklim investasi yang sehat dan kompetitif.

Kebijakan di atas diharapkan akan memperbaiki kondisi awal daerah yang masih didominasi sektor pertanian kearah diversifikasi non sektor pertanian. Strategi dan prioritas pengelolaan pendapatan daerah dijalankan dengan peningkatan PAD sekaligus mengurangi tingkat ketergantungan pada pemerintah, intensifikasi pajak daerah, serta intensifikasi dan ekstensifikasi penerima retribusi dan lain-lain PAD dengan tetap memperhatikan kewenangan dan potensi keuangan daerah. Khusus untuk lain-lain PAD diharapkan ada peningkatan pendayagunaan dana Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan (APBB) yang masuk ke daerah untuk dipungut penerimaan berupa komisi, rabat, potongan dan lain-lain.

Secara khusus strategi yang diterapkan adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Intensifikasi pendapatan daerah adalah upaya memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan lebih giat, ketat dan teliti yang mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan aspek personalia. Ini dilakukan dengan memperbaiki organisasi pengelola pendapatan daerah, menerapkan secara optimal sistem dan prosedur manajemen pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Kepmendagri Nomor 102 Tahun 1990.

Sistem ini tidak lagi berorientasi pada sektor atau bidang pungutan tetapi berorientasi pada fungsi-fungsi dalam organisasi pendapatan daerah. Sistem ini diharapkan memberikan dampak kearah peningkatan PAD, karena sistem ini mendorong terciptanya peningkatan jumlah wajib pajak dan retribusi daerah, peningkatan cara-cara penetapan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pemungutan pajak dan retribusi dalam jumlah yang benar dan tepat waktu serta peningkatan sistem

---

pembukuan sehingga memudahkan dalam mendata setiap tunggakan dan memudahkan penagihan.

Intensifikasi pendapatan daerah juga dilakukan melalui upaya membenahi aspek ketatalaksanaan, baik tatalaksana administrasi maupun operasional, meningkatkan upaya penagihan melalui penerapan UU Nomor 19 Tahun 2000, meningkatkan kualitas SDM pengelola pendapatan daerah dan meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi sebagai bagian pendapatan daerah.

Sumbangan PAD NTB mengalami peningkatan selama 2006-2008. Pada 2006 PAD menyumbang sebesar 35,77 persen terhadap keseluruhan penerimaan daerah. Pada 2008 sumbangannya meningkat menjadi 41,44 persen. Sebagian besar PAD bersumber dari lima jenis pajak daerah. Pada 2008 kelima jenis pajak daerah menyumbangkan hampir 91,37 persen ke dalam PAD NTB. Selain sumbangan PAD terhadap total pendapatan daerah yang mengalami peningkatan, pertumbuhan penerimaan PAD pun selalu lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan total pendapatan daerah dari perimbangan. Secara umum penerimaan PAD selama periode 2003-2007 menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan yang bervariasi dari tahun ke tahun dengan laju pertumbuhan rata-rata 27,95 persen pertahun, sedangkan pertumbuhan total pendapatan daerah dan pendapatan dari dana perimbangan masing-masing hanya rata-rata tiap tahun hanya sebesar 9,54 persen untuk total pendapatan dan 4,10 persen untuk pertumbuhan dana perimbangan.

Persoalan masih terletak pada pengelolaan PAD yang masih lemah, seperti penetapan target yang seharusnya memperhatikan estimasi dasar, peningkatan cakupan, pertumbuhan penduduk, kenaikan pendapatan riil per kapita, inflasi, perubahan tarif, pembangunan baru dan perubahan peraturan. Sementara ini penetapan target PAD setiap tahunnya masih berdasarkan metoda peningkatan berdasarkan persentase tertentu, padahal indikator yang paling penting adalah rasio target penerimaan dengan potensi penerimaan.

---

## B. Kebijakan Pendapatan Daerah 2009-2013

1. Sumber penerimaan pendapatan, khususnya pajak dan redistribusi daerah diupayakan optimal dari segi hasil (*yield*) berdasarkan azas keadilan (*equity*), memperhatikan efisiensi ekonomi, Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*) dan kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as local revenue source*). Lebih lanjut pengadministrasian penerimaan pendapatan daerah meliputi upaya pajak (*tax effort*), yaitu antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak (PDRB), hasil guna (*efficiency*) yaitu mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak.
2. Hasil guna menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak yaitu menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegaskan sistem pajak, dan membukukan penerimaan. Dalam usaha mencapai efisiensi ini, tiga faktor yang mengancam patut diperhatikan adalah penghindaran pajak oleh wajib pajak, kolusi antara wajib pajak dengan petugas pajak, dan penipuan oleh petugas pajak. Daya guna mengukur bagian dari hasil pajak digunakan untuk menutup biaya memungut pajak yang bersangkutan.
3. Penyusunan kebijakan bidang pendapatan daerah antara lain memperhatikan faktor yang mempengaruhi potensi sumber penerimaan daerah yaitu kondisi awal daerah, peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan, perkembangan PDRB per kapita riil, pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, penyesuaian tarif, pembangunan fasilitas baru, sumber pendapatan baru, dan perubahan peraturan dan perundang-undangan.
4. Rencana tindakan peningkatan pendapatan daerah adalah merupakan program terencana dan terpadu untuk: a). mencapai sasaran penerimaan daerah yang sesuai dengan potensi yang ada. b). mengidentifikasi tindakan-tindakan yang diperlukan dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi pada sumber-sumber penerimaan daerah. Dari kedua tujuan di atas, jelas bahwa rencana peningkatan daerah ini merupakan program yang bersifat *self-corrected*. Hal ini berarti, selain untuk mencapai sasaran penerimaan daerah yang sesuai dengan potensi yang ada (realistis), program terpadu ini juga ditujukan untuk merekomendasikan revisi pada peraturan daerah untuk mengantisipasi perubahan-perubahan.

---

Peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pelayanan publik membutuhkan strategi kebijakan yang tepat. Berkaitan dengan itu, arah kebijakan bidang pendapatan daerah periode 2009-2013 ditujukan untuk:

1. Penggalian potensi Pendapatan Daerah;
2. Peningkatan partisipasi publik dalam pendapatan daerah;
3. Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah;
4. Optimalisasi sistem organisasi dan kelembagaan pendapatan daerah;
5. Peningkatan keterlibatan seluruh *stakeholder* pendapatan daerah;
6. Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah;
7. Peningkatan kualitas hubungan dan kerjasama dengan dinas dan instansi terkait.

Upaya peningkatan pendapatan daerah juga perlu tahapan prioritas yang meliputi:

1. Penetapan dasar hukum pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dan melakukan penyesuaian tarif untuk obyek pajak tertentu.
2. Penataan administrasi pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
3. Perumusan kebijakan umum pendapatan daerah.
4. Koordinasi konsultasi dan pembinaan pengelolaan pendapatan daerah.
5. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
6. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang pendapatan daerah
7. Peningkatan kompetensi aparatur pemungut pendapatan
8. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan
9. Penataan bidang perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan.
10. Pengembangan sumber-sumber pendapatan.

Dalam mengatasi faktor-faktor *restriksi* dalam meningkatkan PAD, dilakukan beberapa strategi dalam meningkatkan pendapatan daerah yang mencakup

1. Menyempurnakan sistem dan prosedur perpajakan dan retribusi daerah. Penyempurnaan ini merujuk kepada UU No. 18 Tahun 1997

---

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan perubahannya UU No. 34 Tahun 2000, dengan tetap memperhatikan asas keadilan, pemerataan manfaat dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang tercermin dalam peningkatan disiplin kerja, kejujuran, tanggung jawab dan dedikasi serta melalui penyempurnaan sistem administrasi.

2. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi pembayaran baik pajak daerah maupun retribusi daerah dengan mengintensifkan penyuluhan dan teladan langsung kepada sasaran.
3. Meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan daerah serta penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan agar lebih cepat, tepat dan ringan biaya.
4. Menghitung kembali sektor-sektor kekayaan daerah, baik potensi maupun penetapan tarifnya.
5. Meningkatkan pembinaan secara terpadu dengan instansi terkait dan aparat pengelola keuangan daerah.

Merujuk strategi di atas, kebijakan Pendapatan Daerah 2009-2013 diarahkan pada:

1. Mendorong meningkatnya pendapatan daerah dari komponen penerimaan PAD yang masih memiliki peluang dan potensi intensifikasi dan ekstensifikasi dengan berpegang kepada prinsip keadilan dan tidak memberatkan masyarakat.
2. Mengupayakan tercapainya laju pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 10 persen setiap tahun dari pencapaian tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan yang terhitung sangat optimis ini didasarkan pada *trend* perolehan pendapatan asli yang cenderung naik, serta potensi sumber-sumber pendapatan yang belum tergarap secara optimal.
3. Dana Perimbangan diharapkan minimal sama besarnya dari realisasi tahun-tahun sebelumnya. Ini dengan asumsi masih terjadi *fiscal gap* antara pendapatan dengan belanja daerah.
4. Optimalisasi dana APBN dan BLN untuk menunjang pembangunan daerah.
5. Optimalisasi aset daerah untuk peningkatan PAD.

**Tabel 3.2**  
Target Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2009-2013

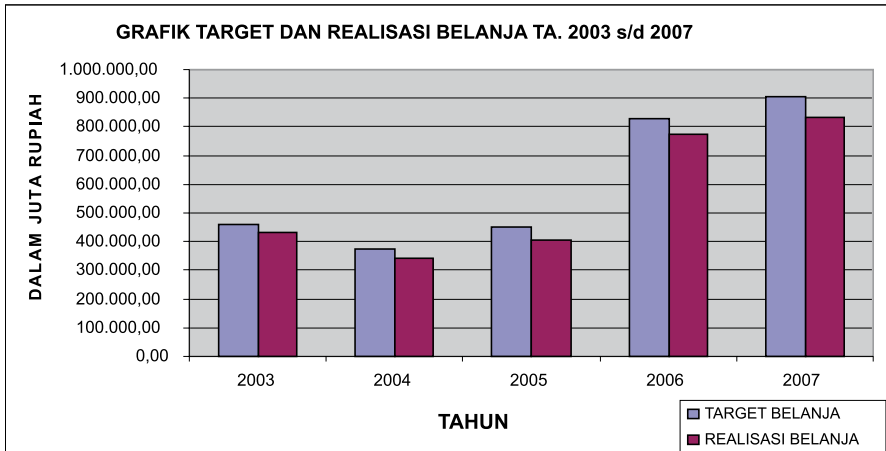
NILAI (Rp. Juta)	URAIAN	KONDISI AWAL 2008			T A R G E T		
		2009	2010	2011	2012	2013	
	Pendapatan Daerah	1.083.333.680.130	1.334.670.511.077	1.438.111.719.921	1.610.685.126.311	1.737.265.500.545	
	Pendapatan Asli Daerah	387.245.728.925	468.210.246.051	587.322.932.646	657.801.684.563	736.737.886.710	
	Dana Perimbangan	691.087.951.205	771.690.510.000	850.788.787.275	952.883.441.748	1.000.527.613.835	
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.000.000.000	4.500.000.000	-			
Laju Pertumbuhan (%)	Pendapatan Daerah	26,21	14,86	7,25	11,99	7,85	
	Pendapatan Asli Daerah	16,38	20,91	12,00	12,00	12,00	
	Dana Perimbangan	31,48	5,00	5,00	5,00	5,00	
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah						
Kontribusi (%)	Pendapatan Daerah						
	Pendapatan Asli Daerah		37,62	39,29	40,84	42,40	
	Dana Perimbangan		62,01	60,71	59,16	57,59	
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		0,37				

Sumber : Renstra Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB

### 3.3 Bidang Belanja Daerah

Perubahan lingkungan strategis daerah, dinamika kondisi aktual daerah dan isu-isu strategis, digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan umum keuangan daerah di dalam RPJMD Provinsi NTB 2009-2013. Kondisi belanja daerah Provinsi NTB dalam APBD 2003-2007 sesuai hasil evaluasi Mendagri terhadap Perda APBD adalah Rp 2.305.483.733.125,52. Meliputi belanja rutin 2003 sebesar Rp 267.968.368.476,12 dan Belanja Pembangunan Rp 162.245.370.772,72; Sementara pada 2004–2006 belanja aparatur daerah sebesar Rp 753.615.124.455,45, belanja publik sebesar Rp 764.692.578.294,35; Lalu pada 2007 belanja langsung Rp 356.962.291.126,88, belanja tidak langsung Rp 478.023.733.984,52.

Perkembangan target dan realisasi belanja 2003–2007 disajikan dalam grafik berikut:



**Gambar 3.2.**

Target dan Realisasi Belanja APBD tahun 2003 s.d. 2007

Sumber: Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi NTB, 2008

Dari grafik terlihat realisasi belanja APBD NTB menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahun. Hal tersebut menggambarkan makin dinamis dan luasnya jangkauan pembangunan yang dapat dicapai, sejalan dengan makin meningkatnya kebutuhan pembangunan daerah. Tahun 2004 dan 2005 terlihat belanja APBD menurun dibandingkan

---

dengan 2003, karena adanya keterlambatan dalam penetapan APBD pada dua tahun tersebut yang sangat erat kaitannya dengan adanya perubahan aturan tentang pengelolaan keuangan daerah dengan terbitnya Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2004.

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Karena sifatnya mengurangi aset, maka kebijakan belanja daerah antara lain harus mampu meningkatkan nilai tambah (*added value*) sehingga dapat menjadi lebih berdayaguna dalam pencapaian Rencana Strategis Daerah (Restra).

Berdasarkan hal tersebut, belanja daerah 2009-2013 diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja pegawai, terdiri belanja tidak langsung dan belanja langsung yang digunakan membiayai kegiatan aparatur di bidang pelayanan. Belanja pegawai ini harus bisa diarahkan lebih efisien, efektif, realistis, dan proporsional terhadap belanja langsung yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.
2. Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota yang merupakan belanja sebagai konsekuensi logis dari adanya penerimaan pajak daerah sebesar 30 persen dari realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB), 70 persen dari realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Industri, dan 70 persen dari realisasi Pajak Air Permukaan (AP) dan Pajak Air Bawah Tanah (ABT);
3. Belanja Bantuan yang besarnya mempertimbangkan kemampuan keuangan provinsi dalam menutupi kesenjangan fiskal anggaran dan aspek keadilan serta pemerataan dengan menggunakan pendekatan potensi dan kebutuhan daerah, wilayah, jumlah dan sebaran penduduk dengan kriteria tingkat PDRB per kapita masing-masing kabupaten/Kota;
4. Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Belanja tidak terduga ini penggunaannya mesti secara proporsional, tepat guna dan akuntabel;

- 
5. Belanja Langsung yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dengan sejumlah prioritas. *a)* peningkatan pelayanan pendidikan dan pengembangan relevansi dunia pendidikan dengan dunia usaha. *b)* peningkatan pelayanan kesehatan dan pengembangan usaha kesehatan berbasis masyarakat. *c)* Pengembangan kemampuan Iptek masyarakat dengan titik tekan teknologi tepat guna. *d)* pengembangan kapasitas kelembagaan sosial dan ekonomi berbasis masyarakat. *e)* Restrukturisasi, refungsionalisasi dan revitalisasi lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan pembangunan ekonomi serta perkuatan ekonomi masyarakat. *f)* Pengembangan ekonomi lokal berbasis pertanian dalam arti luas. *g)* Penataan ulang struktur industri yang berdayasaing dan berbahan baku lokal unggulan. *h)* Pengembangan dan revitalisasi kawasan.
  6. Meningkatkan dana cadangan pemerintah agar dapat memperkecil kesenjangan fiskal daerah;
  7. Meningkatkan disiplin anggaran dengan menghindarkan setiap bentuk pembelanjaan yang tidak dianggarkan pada tahun anggaran berjalan, kecuali belanja yang disebabkan keadaan darurat sesuai ketentuan perundang-undangan dan dicantumkan dalam perhitungan anggaran.
  8. Disiplin penjadwalan anggaran untuk mendukung efektifitas penganggaran pendapatan bagi hasil dan bantuan yang diberikan pada kabupaten-kota.
  9. Disiplin pengalokasian anggaran berdasarkan karakteristik sumber penerimaan. Pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai pada belanja tidak langsung dan kegiatan yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana dasar.
  10. Pendapatan yang bersumber dana perimbangan pos bagi hasil pajak/ bukan pajak tidak diperkenankan untuk belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah provinsi/kabupaten/kota/pemerintahan desa.

---

### 3.4 Kebijakan Umum Anggaran

---

Sasaran pembangunan pengelolaan keuangan daerah selama lima tahun mendatang:

1. Meningkatnya penerimaan PAD rata-rata menjadi 80 persen
2. Meningkatnya proporsi penerimaan PAD dari total penerimaan daerah;
3. Meningkatnya penerimaan daerah non konvensional;
4. Tertibnya proses penyusunan anggaran daerah setiap tahunnya;
5. Menurunnya penyimpangan penggunaan anggaran daerah

Untuk mewujudkan peningkatan pengelolaan keuangan daerah, maka arah kebijakan ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan PAD dengan cara: *i)* mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah, *ii)* membenahi manajemen data penerimaan PAD, *iii)* meningkatkan penerimaan pendapatan non konvensional, *iv)* mengevaluasi dan merevisi perda pajak dan retribusi daerah secara berkala, *v)* menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, *vi)* mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan belanja daerah yang tertib, taat, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dengan cara: *i)* menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah, *ii)* menerapkan prinsip efisiensi dalam penyusunan dan penetapan prioritas anggaran, *iii)* menerapkan *money follow function* dalam menyusun anggaran, *iv)* menggunakan publik untuk menilai kinerja anggaran.
3. Meningkatkan pengawasan anggaran, dengan cara: *i)* mengeluarkan peraturan daerah tentang kedudukan keuangan kepala daerah, tunjangan kepala dinas/lembaga dan honor kegiatan, *ii)* mengeluarkan peraturan gubernur dan keputusan gubernur sebagai implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan milik daerah khususnya tentang fasilitas yang dapat dimiliki kepala dinas/lembaga, *iii)* menerapkan sistem dan pelaporan hasil pengawasan sesuai dengan aturan yang

---

ada, *iv*) meningkatkan kemampuan eksekutif dan legislatif dalam menyusun dan mengawasi penggunaan anggaran *v*) membentuk tim tetap yang terdiri dari aparatur pemda dan perguruan tinggi untuk mengevaluasi peraturan daerah yang dikeluarkan pemerintah kota dan kabupaten.

4. Meningkatkan kualitas aparatur pengelola keuangan daerah agar mampu memahami, mengkaji dan melaksanakan peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah antara lain dilakukan dengan melakukan pelatihan dan pendidikan formal.

Arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah diimplementasikan dalam program pembangunan pengelolaan keuangan daerah selama lima tahun mendatang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Program peningkatan pengelolaan keuangan daerah, dengan tujuan meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan PAD. Kegiatan pokok program ini meliputi penyusunan potensi dan rencana tindak peningkatan penerimaan PAD. Selain itu juga peningkatan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah;
- b. Program peningkatan pengelolaan belanja dan aset daerah, dengan tujuan mengalokasikan belanja daerah untuk masing-masing bidang pemerintahan berdasarkan prinsip efisiensi dan ongkos terendah. Kegiatan pokok dari program ini:
  - Penetapan standar pelayanan minimum bidang pelayanan;
  - Penyusunan Standar Anggaran Biaya (SAB);
  - Penyusunan peraturan daerah tentang kedudukan keuangan kepala daerah, tunjangan kepala dinas/lembaga dan honor kegiatan;
  - Penetapan standar penolakan atau penerimaan usulan kegiatan SKPD;
  - Melakukan inventarisasi dan penataan aset daerah;
  - Menyusun neraca keuangan dan aset daerah
- c. Program peningkatan pengawasan pengelolaan anggaran, dengan tujuan untuk menghindari penyalahgunaan, penyimpangan, pemborosan anggaran. Kegiatan pokok dari program ini:

- 
- Peningkatan dan pengembangan data keuangan daerah;
  - Peningkatan akses informasi data keuangan;
  - Pelaksanaan tindak lanjut temuan penyimpangan;
  - Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD);
  - Fasilitasi pelaksanaan pertemuan berkala dengan LSM yang peduli dengan pengawasan keuangan daerah;
  - Penyediaan manual pengawasan keuangan daerah yang efektif
- d. Program peningkatan kualitas aparatur pengelolaan keuangan daerah, dengan tujuan agar tidak terjadi keterlambatan, kelalaian dan kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah serta menghindari kesalahan dalam pengawasan dan penyusunan Perda yang berkaitan dengan keuangan daerah. Kegiatan pokok dari program ini:
- Peningkatan kapasitas aparatur pengelolaan keuangan daerah melalui lembaga pendidikan kesarjanaan, pelatihan singkat baik di dalam maupun luar negeri;
  - Penempatan aparatur yang mempunyai kompetensi dalam keuangan daerah pada instansi yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah;
- e. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah, dengan tujuan melakukan pembinaan dan memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan pokok dari program ini:
- Sosialisasi penyusunan rancangan deregulasi pengelolaan keuangan daerah;
  - Fasilitasi pengelolaan keuangan daerah

## **Bab IV**

### **Analisis Isu-isu Strategis**

---

- 4.1. Analisis Lingkungan Strategis Global
- 4.2. Analisis Lingkungan Strategis Nasional
- 4.3. Analisis Lingkungan Strategis Regional
- 4.4. Analisis Lingkungan Strategis Daerah
  - A. Masalah Sosial
  - B. Masalah Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
  - C. Masalah Ekonomi dan Rumpun Hijau
  - D. Masalah Pemerintahan Umum



Puskesmas merupakan ujung tombak  
kehatan masyarakat lapis bawah  
*Prayanto W.H*

## Bab IV

# Analisis Isu-Isu Strategis

---

Tahun 2008 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) genap berusia separuh abad. Pada usia emas ini, jika merujuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), posisi NTB berada pada urutan ke-32 dari 33 provinsi. Fakta ini menunjukkan NTB masih tergolong daerah tertinggal. Potret ini sungguh terasa ironis, mengingat posisi NTB begitu strategis. NTB memiliki keragaman iklim yang menguntungkan bagi pengembangan aneka rupa komoditas pertanian. NTB berada pada jalur selatan *transnasional* yang diapit dua alur pelayaran internasional dan segitiga wisata dunia Toraja, Bali dan Komodo. Letak yang strategis ini membuat NTB dijuluki *The Heaven on the Planet*. Kepingan “surga” di planet bumi. Sementara secara sosial budaya, NTB sering disebut *miniatur* Indonesia, karena didalamnya hidup dan berkembang pluralitas agama, suku dan budaya.

Dengan posisi geografis yang strategis dan keragaman modal sosial yang dimilikinya, NTB berpeluang besar menjadi daerah maju yang berdayasaing. Hanya saja untuk mencapai itu, percepatan pembangunan melalui optimalisasi potensi sumberdaya lokal dan mendorong masuknya investasi yang berkelanjutan menjadi kebutuhan mutlak. Percepatan pembangunan membutuhkan sejumlah prasyarat. *Pertama*, tentu saja adanya tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya aparat pemerintah yang mau dan mampu memposisikan dirinya sebagai pelayan rakyat. Selain itu diperlukan pula aparat yang cakap mendorong sinergitas antara birokrasi, masyarakat dan dunia usaha. Harus diakui tata kelola pemerintahan yang baik di NTB selama era otonomi masih menjadi agenda yang belum juga mampu dijawab dengan lugas dan cerdas.

*Kedua*, percepatan pembangunan membutuhkan dukungan infrastruktur wilayah yang memadai. Fakta menunjukkan di NTB terjadinya kesenjangan pembangunan infrastruktur antarwilayah dan antarsektoral. Kondisi ini menjadi salah satu pemicu ekonomi biaya tinggi yang menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat dan masuknya investasi. *Ketiga*, percepatan pembangunan memerlukan tertib hukum

---

untuk memberikan rasa aman dan menjamin kepastian hukum. Supremasi hukum harus tegak dan tidak boleh terkontaminasi kepentingan politik. Hukum yang mandul membuat rakyat kehilangan kepercayaan. Tanpa kepercayaan rakyat, upaya melakukan percepatan pembangunan hanya tinggal slogan.

*Keempat*, yang tidak kalah pentingnya percepatan pembangunan harus pula berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. NTB yang merupakan provinsi kepulauan sepatutnya memprioritaskan pengelolaan Sumberdaya alam (SDA) Terbaharui. Titik tumpu pengelolaan SDA harus berkiblat pada dua hal: keberlanjutan masa depan lingkungan dan memihak kepentingan rakyat miskin. *Kelima*, percepatan pembangunan sewajarnya juga memperhatikan konteks lingkungan strategis yang melingkupinya. Kecermatan dan kejelian membaca konteks lingkungan strategis ini sedikit banyak akan mempengaruhi laju percepatan pembangunan dalam jangka menengah dan panjang.

---

#### 4.1 Analisis Lingkungan Strategis Global

Lingkungan Global di era Abad 21 ini ditandai dengan revolusi industri yang dikenal dengan revolusi 3T: transportasi, telekomunikasi dan turisme. Revolusi 3T membuat dunia menjadi kampung global, menghilangkan sekat batas teritorial negara. Interdependensi antar negara dan kawasan sedemikian besarnya. Tidak lagi ada negara tertentu sekuat apapun pengaruh politik dan kapasitas ekonominya yang terlepas dari saling ketergantungan tersebut. Saling ketergantungan membuat guncangan di sebuah negara dan kawasan bisa dalam waktu sekejap menguncangkan negara dan kawasan lainnya.

Krisis ekonomi global yang belakangan langsung menghantam jantung negara adidaya seperti Amerika dan negara-negara Eropa, imbasnya menjangar seperti virus tak terbendung ke negara dan kawasan lainnya. Saat ini di belahan dunia manapun, di negara yang berlatar belakang ideologi apapun, krisis menghantam hampir setiap sendi kehidupan. Termasuk kita di Indonesia yang belum lagi pulih dengan sepenuhnya dari krisis ekonomi gelombang pertama pada 1997 silam.

---

## 4.2 Analisis Lingkungan Strategis Nasional

---

Saat ini Indonesia hampir dalam segala hal tanpa dayasaing. Indonesia belum lagi bisa berdiri sama tegak dan duduk sama tinggi dengan bangsa lainnya. Lihat saja, penilaian *Human Development Index* (HDI) yang menjadi standar internasional pembangunan manusia sebuah negara, selalu menempatkan Indonesia pada deretan peringkat belakang. Pada laporan HDI 2003, Indonesia ada di urutan 112 dari 175 negara. Bandingkan dengan Malaysia (58), Brunei (31), Thailand (74), dan Filipina (85). Bahkan disandingkan dengan Vietnam sekalipun, negara pecahan Indocina yang belum lama merdeka itu, kita juga masih kalah. Vietnam berada di peringkat 109. Jangan pula bandingkan dengan Singapura, Cina atau Jepang, yang sebelum krisis ekonomi 1997 menerpa, pernah bersama Indonesia disebut sebagai “keajaiban ekonomi” Asia Pasifik.

Dengan dayasaing yang lumpuh itu, Indonesia diam-diam bergerak menjadi seperti yang Bung Karno pernah katakan lebih dari 60 tahun silam, *a nation of coolies, and a coolie among the nations*. Bangsa kuli dan kuli diantara bangsa-bangsa. Indonesia bukannya tidak punya visi masa depan. Ada misalnya visi Indonesia 2030 yang dilontarkan presiden SBY. Di sana disebutkan, pada 2030 nanti Indonesia harus menjadi kekuatan lima besar ekonomi dunia. Indikatornya, pada saat itu pendapatan perkapita orang Indonesia sudah mencapai 18.000 dollar Amerika pertahun. Lalu sedikitnya harus ada 30 perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar 500 perusahaan terbesar di dunia. Visi Indonesia 2030 tersebut tidak mungkin teralisasi jika tidak terbangun dan tertata dengan baik sebuah mekanisme sinergitas pembangunan antara pusat-daerah.

Sejak Januari 2000 dengan diterapkannya UU nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah, penerapan sistem otonomi dan desentralisasi dimulai sebagai antitesis terhadap sistem sentralistik yang selama 30 tahun lebih terbukti gagal membangun Indonesia yang lebih adil dan merata. Sejak Januari 2000 itu, sistem pemerintahan daerah mengalami dinamika yang cepat. Revisi sejumlah peraturan perundang-undangan terjadi. Begitu juga halnya dengan dinamika politik demokrasi di daerah. Sejak 2005 sampai 2008 berlangsung ratusan kali pemilihan langsung kepala daerah di provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Politik

---

dan demokrasi tiba-tiba menjadi sesuatu yang teramat dekat dan karib dengan rakyat, sesuatu yang hampir mustahil dirasakan pada rezim pemerintahan sentralistik orde baru. Sekalipun Begitu jauhnya politik dan demokrasi merasuki kehidupan publik, sampai terjadi berulang kali praktek “demokrasi yang kebablasan”, yang ditandai maraknya unjuk rasa anarkis, penghujatan dan perusakan di daerah.

Perubahan dinamika lingkungan strategis nasional ini, menuntut cara pandang dan pendekatan kekuasaan yang sama sekali baru. Terutama kaitannya dengan hubungan pusat dan daerah. Upaya membangun pemahaman yang sama dan sejalan dalam praktek desentralisasi masih kerap kali menjadi batu sandungan hubungan pusat-daerah. Masih cukup banyak substansi penting dari UU otonomi dan desentralisasi yang menimbulkan bias tafsir atau dianggap lebih menguntungkan satu pihak. Masih adanya perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, termasuk antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten-kota dalam implementasi otonomi daerah, khususnya terkait dengan pembagian urusan yang menjadi kewenangan masing-masing, merupakan salah satu agenda yang selalu menjadi pusat perhatian selama 10 tahun lebih reformasi berjalan.

Dalam konteks situasi lingkungan strategis nasional yang dinamis dan berubah dengan cepat tersebut, NTB mestinya harus mampu meresponnya dengan tanggap dan cerdas. Desentralisasi dan otonomi daerah semestinya menjadi momentum bagi upaya mengoptimalkan potensi daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bukan sebaliknya, desentralisasi dan otonomi justru melahirkan “raja-raja” kecil di daerah yang menguasai potensi sumberdaya lokal untuk kepentingan sempit dan sesaat diri dan kroni mereka.

---

### 4.3 Analisis Lingkungan Strategis Regional

NTB merupakan bagian dari Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sudah bukan rahasia lagi, KTI merupakan kawasan yang jauh tertinggal dibandingkan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Kesenjangan pembangunan barat-timur ini menjadi isu strategis sejak otonomi daerah bergulir awal

---

2000 silam. Sejumlah langkah dan kebijakan telah disusun pemerintah pusat untuk menjembatani kesenjangan antar kawasan tersebut. Antara lain kebijakan restrukturisasi sistem perekonomian dan moneter.

Salah satu faktor yang diyakini menjadi penyebab tertinggalnya KTI dibandingkan KBI adalah soal efisiensi pengelolaan, pemanfaatan serta pemeliharaan sumberdaya yang ada. Rendahnya tingkat efisiensi pembangunan dan pemerintahan di KTI antara lain disebabkan karena pembangunan di KTI lebih banyak pada penyiapan infrastruktur untuk mendorong pembangunan suatu daerah (*trade follow the ship*). Sedangkan pembangunan di KBI penekanannya pada pembangunan infrastruktur di Daerah yang sudah berkembang atau maju (*ship follow the trade*).

Hal ini tidak lepas dari berbagai keterbatasan yang dimiliki daerah di KTI, terutama yang berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia sebagai subjek sekaligus sebagai objek pembangunan.

Tidak bisa tidak, NTB yang merupakan bagian dari KTI harus mengarahkan kebijakan pembangunannya menjadi lebih berdayasaing. Kesenjangan KBI-KTI hanya bisa dijembatani dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis sumberdaya lokal sehingga terjadi peningkatan daya beli dan daya saing masyarakat dan daerah di KTI.

Untuk itu pembangunan kawasan KTI harus benar-benar diarahkan kepada menggali dan mendayagunakan potensi masing-masing daerah, sembari secara simultan dan sinergis membangun kemitraan strategis antar daerah di KTI. Dalam konteks ini, NTB sebagai provinsi kepulauan di KTI yang letak geografisnya terhitung strategis memiliki modal dasar yang besar untuk memainkan peran yang signifikan. Tentu saja untuk menuju kesana, peningkatan daya saing NTB harus lebih dahulu diprioritaskan. Tanpa kesungguhan memperlihatkan bahwa di NTB telah dan terus berlangsung akselerasi pembangunan dengan sejumlah terobosan program pembangunan yang kreatif, rasanya sulit daerah lain di KTI dan Indonesia umumnya akan memberikan apresiasi terhadap kinerja pembangunan NTB.

---

Satu aspek yang rasanya perlu mendapatkan sedikit penekanan adalah soal pengelolaan lingkungan di kawasan KTI yang dari waktu ke waktu kian memprihatinkan. Laju kerusakan hutan misalnya terjadi begitu massif. Dalam konteks pengelolaan lingkungan ini, NTB harus bisa berdiri paling depan sebagai inisiator di KTI, menjadi daerah model bagaimana peningkatan daya saing daerah bisa seiring sejalan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

---

#### 4.4 Analisis Lingkungan Strategis Daerah

NTB merupakan daerah tertinggal dengan potensi sumberdaya yang cukup besar untuk bisa keluar dari ketertinggalan. Potensi sumberdaya itu bisa dikelompokkan menjadi Sumberdaya Alam (SDA), Sumberdaya Manusia (SDM), Sumberdaya Buatan (SDB) dan Sumberdaya Sosial (SDS). Keempat potensi sumberdaya ini semuanya ada di NTB, hanya persoalannya belum maksimal terkelola menjadi modal dasar meningkatkan daya saing daerah.

Potensi SDA misalnya, pemanfaatannya masih relatif terbatas, kurang terarah, tak terpadu dan relatif tidak berkesinambungan. Hal ini menyebabkan pemanfaatan potensi SDA belum mampu memberikan dukungan terhadap perekonomian daerah secara optimal. Sehingga belum mampu pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB. Demikian pula halnya dengan potensi SDM. Kualitas SDM NTB yang masih rendah lebih banyak menjadi hambatan, tantangan, dan sekaligus ancaman bagi kelangsungan pembangunan di daerah. Bagaimana dengan potensi SDB dan SDS? Kondisinya hampir sama saja. Baru menjadi sebatas modal pembangunan yang belum mampu dimanfaatkan secara optimal.

Selain masalah potensi sumberdaya yang belum teroptimalkan, NTB juga menghadapi lingkungan strategis daerah yang kian menampakkan ketimpangan kepemilikan sumberdaya. Golongan masyarakat yang berpendapatan menengah ke atas tinggi sebagai pemilik modal, cenderung kian meningkat kepemilikan sumberdayanya, sebaliknya golongan masyarakat berpenghasilan rendah dengan kekuatan daya saing yang rendah, cenderung kepemilikan sumberdayanya semakin berkurang dan

---

daya tukarnya terus menurun. Kesenjangan juga terjadi antarwilayah, yaitu antara Pulau Lombok dan Sumbawa sebagai dampak dari pendekatan strategi pembangunan daerah yang kurang proporsional memperhatikan potensi wilayah.

Secara umum permasalahan strategis daerah yang dihadapi pemerintah NTB saat ini meliputi:

#### **A. Masalah Sosial:**

1. Penduduk NTB sebagian besar (70,87 persen) terkonsentrasi di Pulau Lombok yang luasnya hanya 22,78 persen dari luas NTB. Sebaliknya Pulau Sumbawa yang memiliki luas sekitar 77,22 persen dari luas NTB dihuni hanya 29,13 persen penduduk NTB.
2. Struktur umur penduduk NTB termasuk struktur umur tua. Penduduk pada kelompok usia kerja (15-64 tahun) berjumlah lebih dari 60 persen, namun kelompok ini lemah aksesnya terhadap kegiatan produksi maupun pasar kerja. Lebih khusus lagi indeks Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penduduk relatif rendah dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal ini disebabkan proporsi penduduk yang sedang sekolah cukup tinggi, sehingga nantinya akan terjadi permintaan lapangan kerja terdidik yang cukup besar.
3. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia. Pemicunya rendahnya kualitas pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, pendapatan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Cermin dari permasalahan tersebut terlihat dari masih cukup tingginya Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), angka gizi buruk serta usia harapan hidup yang masih rendah. Sementara itu, angka melek huruf baru mencapai 78,27 persen, sedangkan di tingkat nasional sudah mencapai 88,4 persen dan rata-rata lama sekolah 6,25 tahun, sedangkan Nasional 6,7 tahun.

#### **B. Masalah Infrastruktur dan Lingkungan Hidup :**

1. Ketimpangan layanan infrastruktur dan utilitas antar wilayah pulau yang berakibat tidak berkembangnya daya saing antar wilayah.
2. Ketimpangan pertumbuhan antar kawasan, antar kota dan antar wilayah masih mewarnai perjalanan pembangunan daerah. Kurangnya pemerataan pembangunan sarana prasarana, distribusi sumberdaya yang tidak seimbang dan terhambatnya pengembangan ekonomi unggulan cukup signifikan mempengaruhi keadaan ini.

- 
3. Kurangnya jumlah embung yang dapat mempertinggi kemampuan penyediaan sumber air.
  4. Perlunya penataan irigasi mata air (penyerapan dan penyaluran) yang baik mengingat terdapat cukup banyak mata air.
  5. Menurunnya kualitas lingkungan hidup yang ditandai dengan kerusakan ekosistem kawasan hutan, lahan, pesisir dan laut, konversi penggunaan lahan, krisis air bersih dan pencemaran air, meluasnya lahan kritis, dan perubahan iklim yang sebagian besar diakibatkan oleh manusia.
  6. Kenaikan tinggi muka air laut secara *gradual* akibat pemanasan global merupakan salah satu aspek yang paling kompleks dari efek pemanasan global. Kenaikan tinggi muka air laut mengakibatkan terjadinya erosi, perubahan garis pantai dan *mereduksi* daerah *wetland* di sepanjang pantai.
  7. Tingginya laju degradasi hutan dan meluasnya lahan kritis, menurunnya kuantitas dan kualitas air (baik air tanah maupun permukaan), bencana kekeringan pada lahan sawah yang menyebabkan gagal tanam dan bahkan gagal panen akan lebih diperparah oleh dampak perubahan iklim
  8. Terganggunya kelestarian alam dan lingkungan hidup yang sudah mencapai titik kritis, baik di darat maupun di laut. Di NTB luas tanah kritis saat ini mencapai 26,19 persen, hutan yang hilang rata-rata 2000 hektar per tahun, mata air berkurang dari 700 titik menjadi 230 titik, debit air menurun 5 kali lipat pada musim kemarau, luas hutan tutupan di Pulau Lombok di atas 60 persen. Di wilayah perairan pantai terjadi kerusakan ekosistem yang cukup parah. Seperti pengambilan terumbu karang, pengeboman ikan dan juga pencemaran akibat pembuangan limbah dari usaha pertambangan.

### **C. Masalah Ekonomi dan Rumpun Hijau (pertanian dalam arti luas):**

1. Terjadi transformasi struktur perekonomian dari sektor primer (pertanian) ke sekunder dan tersier (industri dan jasa), namun tidak diiringi dengan transformasi ketenagakerjaan. Dari waktu ke waktu *pangsa relatif* Sektor Pertanian terhadap perekonomian wilayah terus mengalami penurunan seiring dengan peningkatan sektor lainnya (industri dan jasa). Namun keadaan sebaliknya terjadi dengan

---

persentase penduduk yang berkerja pada sektor pertanian cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sedangkan peluang kerja Sektor Industri dan Jasa mengalami penurunan.

2. Kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil relatif “belum tersentuh”. Hal ini terlihat dari belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam di kawasan tersebut sebagai *prime mover* pertumbuhan ekonomi regional dan nasional serta sumber pendapatan masyarakat.
3. Lemahnya *eksternalitas* wilayah. NTB yang berada dalam Segitiga Emas Pariwisata Dunia: Bali, Komodo, Toraja, belum mampu menangkap “berkah” tersebut sebagai peluang besar dalam pengembangan dan pemberdayaan pariwisata daerah.

#### **D. Masalah Pemerintahan Umum**

1. Profesionalisme aparatur pemerintah tercermin dari kualitas pelayanan yang diberikan aparatur birokrasi kepada masyarakat masih rendah. Selain itu, kinerja aparatur dan standar kompetensi yang diterapkan kepada seluruh tingkatan aparatur belum berjalan dengan baik
2. Masih belum siapnya masyarakat baik moral, moril ataupun mental menerima arus globalisasi terutama dampak negatif. Hal ini tercermin dari berbagai gejala yang terjadi, seperti semakin maraknya pornografi dan porno aksi, pelecehan seksual, kejahatan narkoba, penyelundupan barang atau orang, pembunuhan dan perampokan. Kesiapan masyarakat ini sangat erat kaitannya dengan masalah Imtaq. Nampaknya walau kehidupan beragama sudah cukup baik namun pemahaman dan pengamalan terhadap ajaran agama relatif masih lemah.
3. Masih lemahnya penegakkan hukum di dalam masyarakat terutama oleh para penegak hukum sendiri. Keadaan ini dipicu dengan terbatasnya personil yang ada, luas dan semakin beragamnya kasus yang muncul kepermukaan terutama KKN yang melibatkan hampir seluruh komponen masyarakat mulai pejabat, pengusaha dan termasuk rakyat dari pusat sampai ke desa/dusun.
4. Rasa apatisme dan pesimisme masyarakat terhadap pemerintah yang semakin besar, sebagai akibat krisis kepemimpinan, krisis kepercayaan dan krisis keteladanan, hal ini terlukis dengan semakin maraknya demo, unjuk rasa yang mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah

---

terutama terkait dengan kebutuhan mendasar masyarakat, yang diwarnai dengan tindakan brutal, anarkis dengan mengusung isu demokrasi, keadilan yang tidak menutup kemungkinan didukung atau didalangi oleh pihak ketiga atau pihak luar.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dirumuskan Isu-isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan Daerah NTB kurun waktu lima tahun kedepan:


1. Belum terkelolanya dengan baik pluralitas agama, suku dan budaya sebagai modal sosial;
2. Tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial;
3. Tingginya angka buta aksara dan putus sekolah;
4. Tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan;
5. Kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektoral;
6. Lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kualitas pelayanan publik,
7. Menurunnya kualitas lingkungan hidup, dan kurangnya ketersediaan daya dukung kapasitas energi listrik

## **Bab V**

# **Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

---

- 5.1. Visi
- 5.2. Misi
- 5.3. Tujuan dan Sasaran

A group of people riding horses in a field, likely during a traditional festival or race in Sumbawa. The riders are wearing colorful, traditional headgear and clothing. The horses are galloping through tall grass, and the background shows lush green trees under a clear sky.

Kuda pacuan Sumbawa

## Bab V

# Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

### 5.1 Visi

Visi Provinsi NTB 2009-2013, tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) NTB 2005-2025, seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah NTB Nomor 3 Tahun 2008, yaitu:

***“TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT  
YANG BERIMAN, MAJU, DAN SEJAHTERA.”***

RPJPD NTB 2005-2025 menjadi bagian tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Visi Provinsi NTB 2009-2013 juga tidak terlepas dari keinginan kuat pemerintah NTB untuk mewujudkan *“Millenium Development Goals (MDG’s)”* yang merupakan komitmen global para pemimpin dunia. Seperti kita ketahui MDG’s meliputi delapan aspek penting yang hendak diwujudkan pada 2015. Ke delapan aspek tersebut meliputi:

1. Menghapuskan kemiskinan dan kelaparan;
2. Menyediakan pelayanan pendidikan dasar untuk semua;
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Meningkatkan kesehatan ibu;
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya;
7. Memastikan keberlanjutan lingkungan hidup; serta
8. Membangun kemitraan global dalam pembangunan

Dengan mempertimbangkan RPJPN, RPJPD, dan mencermati berbagai prestasi pembangunan daerah yang telah diraih maupun berbagai persoalan yang belum dapat diatasi dalam masa pemerintahan sebelumnya, serta mempertimbangkan berbagai aspirasi dan kehendak para pemangku kepentingan, maka dirumuskan visi pembangunan Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2009-2013 sebagai berikut:

---

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT  
YANG BERIMAN DAN BERDAYASAING  
(NTB BERSAING)”**

Ada tiga kata kunci dalam visi pembangunan Provinsi NTB 2009-2013:

- kata **“masyarakat NTB”**: mengandung pengertian seluruh warga masyarakat yang ada di wilayah NTB
- kata **“beriman”**: berarti masyarakat yang agamis atau religius, yang melaksanakan ajaran agama dengan baik, berahlak mulia dan saling menghargai satu sama lain dalam keberagaman sosial-budaya
- kata **“berdayasaing”**: mengandung makna kemampuan masyarakat NTB baik secara individu maupun kolektif untuk berupaya meraih prestasi, memiliki kompetensi dan kemampuan berinovasi menjawab tantangan zaman. Sehingga masyarakat NTB terdongkrak harkat hidup dan martabatnya

Visi NTB Bersaing muncul karena kondisi obyektif masyarakat NTB yang terpuruk. Disadari betul jika NTB ingin mensejajarkan diri dengan daerah lain, maka program percepatan pembangunan di segala bidang menjadi kata kuncinya. Terutama pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur strategis. Agar proses percepatan dapat dilaksanakan, maka segenap sumberdaya yang ada harus dapat difungsikan secara optimal, baik itu sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan dan sumberdaya sosial, termasuk didalamnya modal sosial berupa pluralitas dan heterogenitas masyarakat NTB.

Bahkan secara khusus visi NTB Bersaing menyandingkan kata beriman dan berdaya saing dalam satu tarikan nafas, karena disadari betul masyarakat NTB memiliki modal dasar beragama yang mendalam. Tinggal bagaimana modal ini bisa menjadi motivasi umatnya menggapai kemajuan, menjadi umat yang berdiri paling depan melawan kemiskinan dan kebodohan. Peningkatan dayasaing yang dimaksudkan dalam visi NTB Bersaing sama sekali bukan dayasaing yang membenarkan eksploitasi manusia atas manusia lainnya, melainkan dayasaing yang memiliki sandaran vertikal berupa spiritualitas yang bersandar kepada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

---

## 5.2 Misi

1. Mengembangkan masyarakat madani yang berakhlak mulia, berbudaya, menghormati pluralitas dan kesetaraan gender;
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkeadilan, terjangkau dan berkualitas;
3. Menumbuhkan ekonomi berbasis sumberdaya lokal dan mengembangkan investasi dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan;
4. Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Menegakkan Supremasi Hukum, Pemerintahan yang Bebas KKN dan Memantapkan Otonomi Daerah.

---

## 5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari misi yang ditetapkan:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatkan pelayanan publik;
3. Meningkatkan daya saing daerah;
4. Meningkatkan daya tahan dan daya tangkal masyarakat;
5. Meningkatkan citra daerah;
6. Meningkatkan harkat dan martabat masyarakat;
7. Mengoptimalkan pembangunan berkelanjutan
8. Meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum aparat dan masyarakat

Sasaran dari tujuan yang ditetapkan:

1. Terwujudnya masyarakat sejahtera;
2. Terwujudnya masyarakat religius;
3. Terwujudnya masyarakat berbudaya dan beretika;
4. Terwujudnya masyarakat sehat;
5. Terwujudnya masyarakat cerdas dan terampil;
6. Terwujudnya masyarakat berwawasan IPTEK;

- 
7. Terwujudnya masyarakat berwawasan global;
  8. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di berbagai aspek;
  9. Terwujudnya usaha pengolahan berbasis pertanian.
  10. Terwujudnya iklim usaha yang kondusif;
  11. Terwujudnya pembangunan daerah yang seimbang dan merata;
  12. Terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan daerah;
  13. Terwujudnya masyarakat “sadar wisata”;
  14. Terwujudnya tenaga kerja yang produktif dan terampil;
  15. Terwujudnya kawasan strategis, cepat tumbuh dan tertinggal;
  16. Terwujudnya kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang terpadu dan berkelanjutan;
  17. Terwujudnya masyarakat yang kreatif dan inovatif;
  18. Terwujudnya sistem pelayanan publik yang transparan, berkepastian hukum dan tepat waktu;
  19. Terwujudnya infrastruktur yang memadai;
  20. Terwujudnya tata ruang yang serasi, selaras dan produktif;
  21. Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman sehat;
  22. Tersedianya sistem transportasi terpadu;
  23. Terwujudnya sistem komunikasi dan informasi antar wilayah;
  24. Terpenuhiya kebutuhan air baku yang memadai;
  25. Terpenuhiya kebutuhan energi yang memadai;
  26. Terwujudnya lingkungan lestari;
  27. Tersedianya sistem pengelolaan lingkungan berbasis mitigasi bencana;
  28. Terwujudnya aparatur yang bersih dan profesional;
  29. Terwujudnya tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan yang baik
  30. Terwujudnya masyarakat taat dan sadar hukum;
  31. Terwujudnya daerah yang aman dan tertib;
  32. Terwujudnya masyarakat sadar berpolitik;
  33. Terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang berkelanjutan



**Bab VI**  
**Strategi, Kebijakan dan Program**  
**Pembangunan Daerah**

---



Sapi Kissar sapi khas Pulau Sumbawa

## Bab VI

# Strategi Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Visi dan misi pembangunan daerah sesungguhnya merupakan untaian harapan masa depan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Harapan dapat diraih manakala visi dan misi bukan *utopia*, namun harus realistis sesuai situasi dan kondisi daerah yang sudah, sedang terjadi dan kecenderungan perkembangan masa depan. Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, perlu dikembangkan strategi, arah kebijakan dan kebijakan umum sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang telah ditetapkan.

Strategi merupakan pemikiran-pemikiran konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berbagai strategi pembangunan yang ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan diarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan posisi NTB yang diukur dari berbagai indikator, seperti Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kemiskinan Penduduk dan Indeks Pembangunan Gender, serta memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan.

Berdasar itulah, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan NTB hendaknya memperhatikan desain strategi yang bertitik tolak kepada keberpihakan untuk masyarakat miskin (*pro-poor policy*), pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) dan isu pemanasan global (*global warming*). Perumusan langkah-langkah menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, dilakukan menggunakan metoda analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman). Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis pembangunan yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis pembangunan, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan kebijakan umum pembangunan NTB lima tahun kedepan sebagai berikut:

**Tabel 6.1****Isu Strategis, Strategi, Arah Kebijakan dan Kebijakan Umum Pembangunan Provinsi NTB 2009-2013**

ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM
1. Belum terkelolanya dengan baik pluralitas agama, suku dan budaya sebagai modal sosial	1. Revitalisasi peran lembaga keagamaan, sosial dan budaya	1. Peningkatan kesadaran dan kerukunan beragama	1. Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga keagamaan
		2. Peningkatan kesadaran dan kerukunan hidup bermasyarakat	2. Mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antar etnik dan kelompok sosial
			3. Mendorong komunikasi lintas budaya dalam masyarakat multikultur
		3. Peningkatan tata susila, semangat dan perilaku masyarakat	4. Memfasilitasi forum komunikasi antar umat, etnis, kelompok dan daerah.
2. Tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial	2. Revitalisasi dan akselerasi pelayanan sosial dasar dan akses terhadap sumberdaya ekonomi	4. Peningkatan kecintaan terhadap budaya dan seni daerah	5. Menggali dan mengembangkan seni dan budaya daerah
		5. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap hak-hak dasar manusia.	6. Mempercepat pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin
		6. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber modal, sarana prasarana ekonomi.	7. Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan sarana pendukung perekonomian sampai tingkat perdesaan
		7. Peningkatan pendapatan masyarakat	8. Mendorong tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat agrobisnis dan agro industri
			9. Mendorong tumbuh dan berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh

ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM
3. Tingginya angka buta aksara dan putus sekolah	3. Revitalisasi dan mobilisasi peran kelembagaan lokal, keagamaan dan kepemudaan	8. Peningkatan efektifitas dan kualitas pelayanan pendidikan	10. Mendekatkan fasilitas dan pelayanan pendidikan pada daerah terpencil dan terbelakang
			11. Mengupayakan pelayanan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin
4. Tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan;	4. Optimalisasi dan revitalisasi pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	9. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan KIA	12. Mendekatkan fasilitas dan pelayanan KIA, terutama pada daerah terpencil dan terbelakang
			13. Mengupayakan pelayanan kesehatan dasar gratis bagi masyarakat miskin
			14. Mendorong peranserta masyarakat dalam pendidikan pra-nikah
			15. Mendorong peran posyandu
5. Kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektoral;	5. Redistribusi pembangunan secara proporsional sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah	10. Peningkatan aksesibilitas wilayah	16. Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur antara desa kota, pulau-pulau kecil dan daerah terisolir
	6. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergis pembangunan antar wilayah dan antar sektor	11. Peningkatan harmonisasi perencanaan program pembangunan	17. Mendorong intensitas komunikasi antar wilayah 18. Mengembangkan pola keterpaduan antar wilayah dan antar sektor

ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM
6. Lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kualitas pelayanan publik,	7. Supremasi hukum	12. Peningkatan koordinasi penegakan hukum	19. Mengintensifkan komunikasi antara lembaga penegak hukum dengan pemerintah daerah
		13. Peningkatan kinerja lembaga pengawasan daerah	20. Mengoptimalkan peranserta masyarakat dalam pengawasan pembangunan
	8. Deregulasi dan debirokratisasi penyelenggaraan pemerintahan	14. Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintah	21. Mendorong penerapan sistem pelayanan satu pintu/satu atap
			22. Mengembangkan diklat aparatur berbasis kompetensi
			23. Mengembangkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara konsisten
24. Memantapkan Pengelolaan keuangan Daerah			
7. Menurunnya kualitas lingkungan hidup	9. Optimalisasi pendayagunaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup, dan IPTEK	15. Peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan	25. Mengupayakan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan
			26. Mempertahankan kelestarian sumberdaya alam dan ekosistem
			27. Mendorong pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan
			28. Mendorong pengembangan, dan pemanfaatan IPTEK

ISU STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KEBIJAKAN UMUM
8. Kurangnya ketersediaan daya dukung kapasitas energi listrik.	10. Diversifikasi sumberdaya listrik alternatif	16. Peningkatan kapasitas terpasang	29. Mengupayakan penambahan daya listrik melalui PLN
			30. Mendorong pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya listrik alternatif

Strategi, arah kebijakan dan kebijakan umum pembangunan yang telah ditetapkan, selanjutnya dijabarkan dalam berbagai program pembangunan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah. Hal ini menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), termasuk para pemangku kepentingan untuk berperan serta dalam pembangunan.

Adapun kebijakan umum menurut lingkup urusan, program dan SKPD penanggungjawab pelaksanaan dalam rangka mewujudkan Visi “NTB BERSAING” 2009-2013 meliputi:

Tabel 6.2  
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan berdasarkan Urusan Kewenangan dan SKPD Pengelola

KEBIJAKAN UMUM	URUSAN	PROGRAM	SKPD PENGELOLA
1. Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga keagamaan	Agama	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pelayanan keagamaan</li> <li>Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kanwil Agama;</li> <li>Biro Adms Kesra;</li> <li>Bakesbangpoldagri;</li> </ul>
2. Mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antar etnik dan kelompok sosial	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</li> <li>Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</li> <li>Pengembangan Wawasan Kebangsaan</li> <li>Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</li> <li>Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan</li> <li>Pendidikan Politik Masyarakat</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biro Adms Kesra;</li> <li>Bakesbangpoldagri;</li> <li>Satpol PP;</li> <li>Biro Adms. Pemerintahan;</li> <li><i>Kepolisian Daerah;</i></li> <li><i>TNI</i></li> </ul>

KEBIJAKAN UMUM	URUSAN	PROGRAM	SKPD PENGELOLA
3. Mendorong komunikasi lintas budaya dalam masyarakat multikultur	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan</li> <li>2. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</li> <li>3. Pendidikan Politik Masyarakat</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biro Adms Kesra;</li> <li>• Bakesbangpoldagri;</li> <li>• Dinas Dikpora;</li> <li>• Dinas Budpar</li> </ul>
	Pemuda dan Olah Raga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Peranserta Kepemudaan</li> </ol>	
	Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Nilai Budaya</li> <li>2. Pengelolaan Kekayaan Budaya</li> <li>3. Pengelolaan Keragaman Budaya</li> <li>4. Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya</li> </ol>	
4. Memfasilitasi forum komunikasi antar umat, etnis, kelompok dan daerah.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan</li> <li>2. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</li> <li>3. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan</li> <li>4. Pendidikan Politik Masyarakat</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kanwil Agama;</li> <li>• Biro Adms Kesra;</li> <li>• Bakesbangpoldagri;</li> <li>• Satpol PP;</li> <li>• Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil;</li> <li>• Biro Adms Pemerintahan;</li> <li>• Dinas Dikpora</li> </ul>
	Pemuda dan Olah Raga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</li> </ol>	
5. Menggali dan mengembangkan seni dan budaya daerah	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Kemitraan;</li> <li>2. Pengembangan Seni dan Budaya Lokal;</li> <li>3. Pengembangan destinasi pariwisata;</li> <li>4. Pengembangan pemasaran pariwisata</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Budpar;</li> <li>• Kantor Penghubung (TMII);</li> <li>• Dinas Dikpora;</li> <li>• Biro Adms Kesra</li> </ul>
	Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Nilai Budaya</li> <li>2. Pengelolaan Kekayaan Budaya</li> <li>3. Pengelolaan Keragaman Budaya</li> <li>4. Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya</li> </ol>	

KEBIJAKAN UMUM	URUSAN	PROGRAM	SKPD PENGELOLA
	Pemuda dan Olah Raga	1. Peningkatan Peranserta Kepemudaan	
6. Mempercepat pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 2. Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPMPD;</li> <li>• BPP dan KB;</li> <li>• Dinas Kop dan UKM;</li> <li>• Dinas Sosial Kependudukan dan Capil;</li> <li>• Dinas PU;</li> <li>• Biro Adms Kesra;</li> <li>• Biro Adms Perekonomian;</li> <li>• Dinas Kesehatan;</li> <li>• Dinas Dikpora;</li> <li>• SKPD lingkup Pertanian</li> </ul>
	Sosial	1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3. Pembinaan Anak Terlantar 4. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 5. Pembinaan Panti Asuhan Panti Jompo 6. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidan, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) 7. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	
	Perumahan	1. Pengembangan Perumahan 2. Lingkungan Sehat Perumahan 3. Pemberdayaan Komunitas Perumahan 4. Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam Sosial 5. Pengelolaan Areal Pemakaman	

KEBIJAKAN UMUM	URUSAN	PROGRAM	SKPD PENGELOLA
	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obat dan Perbekalan Kesehatan</li> <li>2. Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>3. Perbaikan Gizi Masyarakat</li> <li>4. Pengembangan Lingkungan Sehat</li> <li>5. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</li> <li>6. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</li> <li>7. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringan</li> <li>8. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia</li> <li>9. Pengembangan SDM Kesehatan</li> <li>10. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)</li> <li>11. Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan</li> </ol>	
	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Anak Usia Dini</li> <li>2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</li> <li>3. Pendidikan Menengah</li> <li>4. Pendidikan Non Formal</li> <li>5. Pendidikan Luar Biasa</li> </ol>	
	Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kesejahteraan Petani</li> <li>2. Peningkatan Ketahanan Pangan</li> <li>3. Peningkatan Produksi Pertanian</li> <li>4. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</li> <li>5. NTB Bumi Sejuta Sapi</li> </ol>	
	Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</li> <li>2. Pengembangan Perikanan Budidaya</li> </ol>	

KEBIJAKAN UMUM	URUSAN	PROGRAM	SKPD PENGELOLA
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Perikanan Tangkap</li> <li>Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</li> </ol>	
7. Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan sarana pendukung perekonomian sampai tingkat perdesaan	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah yang Kondusif</li> <li>Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</li> <li>Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</li> <li>Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Koperasi UMKM;</li> <li>Dinas Perindag;</li> <li>BPMPD;</li> <li>Badan Ketahanan Pangan;</li> <li>SKPD lingkup Pertanian;</li> <li>Dinas Lutkan;</li> <li>Biro Administrasi Perekonomian;</li> <li>Biro Administrasi Kerjasama dan SDA</li> <li>Biro Administrasi Kesra</li> </ul>
	Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan Pedagangan Kaki Lima dan Asongan;</li> <li>Pengembangan pasar lelang <i>forward agro</i></li> </ol>	
	Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</li> <li>Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</li> <li>Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial</li> </ol>	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</li> <li>Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan</li> </ol>	
	Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</li> <li>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan</li> <li>Pengembangan Perikanan Budidaya</li> <li>Pengembangan Perikanan Tangkap</li> </ol>	

KEBIJAKAN UMUM	URUSAN	PROGRAM	SKPD PENGELOLA
		5. Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 6. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	
	Pertanian	1. Peningkatan Kesejahteraan Petani 2. Peningkatan Ketahanan Pangan 3. Peningkatan Penerapan teknologi pertanian 4. Peningkatan Produksi Pertanian 5. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan 6. Pencegahan dan Penanggulangan Hama dan Penyakit 7. Peningkatan Produksi Hasil Pertanian 8. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	
	Ketahanan Pangan	1. Peningkatan Ketahanan Pangan 2. Peningkatan Kesejahteraan Petani	
8. Mendorong tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat agrobisnis dan agro industri	Pertanian	1. Peningkatan Agribisnis 2. Peningkatan Penerapan teknologi pertanian 3. Peningkatan Produksi Pertanian 4. Pencegahan dan Penanggulangan Hama dan Penyakit 5. Peningkatan Produksi Hasil Pertanian 6. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian 7. Peningkatan Kawasan Produksi Peternakan Sapi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SKPD lingkup Pertanian;</li> <li>• Dinas Lutkan;</li> <li>• Dinas Kehutanan;</li> <li>• Dinas Perindag;</li> <li>• Dinas Koperasi UMKM;</li> <li>• BPM</li> <li>• Dinas PU;</li> <li>• Dinas Pertamben;</li> <li>• BPMPD;</li> <li>• Biro Administrasi Perekonomian;</li> </ul>
	Kehutanan	1. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2. Rehabilitasi Hutan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biro Administrasi Kerjasama dan SDA</li> <li>• Disnakertrans</li> </ul>

KEBIJAKAN UMUM	URUSAN	PROGRAM	SKPD PENGELOLA
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan</li> <li>4. Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri</li> <li>5. Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan</li> </ol>	
	Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</li> <li>2. Pengembangan Perikanan Budidaya</li> <li>3. Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan</li> <li>4. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</li> </ol>	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</li> <li>2. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</li> <li>3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</li> </ol>	
	Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</li> <li>2. Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial berbasis <i>one village one product</i> (OVOP)</li> <li>3. Pengembangan dan Penguatan Kluster Berbasis OVOP</li> </ol>	
	Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</li> <li>2. Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional</li> <li>3. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</li> <li>4. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</li> </ol>	

KEBIJAKAN UMUM	URUSAN	PROGRAM	SKPD PENGELOLA
	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah yang Kondusif</li> <li>2. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</li> <li>3. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</li> </ol>	
	Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja</li> <li>2. Peningkatan Kesempatan Kerja</li> </ol>	
	Penanaman Modal Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</li> <li>2. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</li> <li>3. Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah</li> </ol>	
	Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</li> <li>2. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan</li> </ol>	
	Energi dan Sumberdaya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan</li> </ol>	
9. Mendorong tumbuh dan berkembang-nya wilayah strategis dan cepat tumbuh	Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemandahan dan penempatan transmigrasi</li> <li>2. Penempatan dan pembinaan transmigrasi</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Nakertrans</li> </ul>
10. Mendekatkan fasilitas dan pelayanan pendidikan pada daerah terpencil dan terbelakang	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Anak Usia Dini</li> <li>2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</li> <li>3. Pendidikan Menengah</li> <li>4. Pendidikan Non Formal</li> <li>5. Pendidikan Luar Biasa</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Dikpora;</li> <li>• Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;</li> <li>• Biro Administrasi Kesra;</li> </ul>

KEBIJAKAN UMUM	URUSAN	PROGRAM	SKPD PENGELOLA
	Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan</li> <li>7. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan</li> <li>8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Sosial, Kependudukan &amp; Cakil;</li> <li>• BPMPD;</li> <li>• BPP dan KB;</li> <li>• Dinas Kesehatan;</li> <li>• Kanwil Depag;</li> <li>• BKKBN</li> </ul>
11. Mengupayakan pelayanan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Anak Usia Dini</li> <li>2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</li> <li>3. Pendidikan Menengah</li> <li>4. Pendidikan Non Formal</li> <li>5. Pendidikan Luar Biasa</li> <li>6. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Dikpora;</li> <li>• Biro Administrasi Kesra;</li> <li>• Kanwil Depag</li> </ul>
12. Mendekatkan fasilitas dan pelayanan KIA, terutama pada daerah terpencil dan terbelakang	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obat dan Perbekalan Kesehatan</li> <li>2. Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>3. Pengawasan Obat dan Makanan</li> <li>4. Pengembangan Obat Asli Indonesia</li> <li>5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>6. Perbaikan Gizi Masyarakat</li> <li>7. Pengembangan Lingkungan Sehat</li> <li>8. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</li> <li>9. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</li> <li>10. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya</li> <li>11. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita</li> <li>12. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Kesehatan;</li> <li>• BPMPD;</li> <li>• Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB;</li> <li>• Biro Administrasi Kesra;</li> <li>• BKKBN;</li> <li>• RSJ</li> </ul>

KEBIJAKAN UMUM	URUSAN	PROGRAM	SKPD PENGELOLA
	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keluarga Berencana</li> <li>2. Pelayanan Kontrasepsi</li> <li>3. Pembinaan Peranserta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri</li> <li>4. Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat</li> <li>5. Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak</li> <li>6. Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga</li> <li>7. Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU</li> </ol>	
13. Mengupayakan pelayanan kesehatan dasar gratis bagi masyarakat miskin	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obat dan Perbekalan Kesehatan</li> <li>2. Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>3. Pengawasan Obat dan Makanan</li> <li>4. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>5. Perbaikan Gizi Masyarakat</li> <li>6. Pengembangan Lingkungan Sehat</li> <li>7. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</li> <li>8. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</li> <li>9. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita</li> <li>10. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia</li> <li>11. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</li> <li>12. Penanganan Bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Kesehatan;</li> <li>• RSUD;</li> <li>• BPMPD;</li> <li>• Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB;</li> <li>• Biro Administrasi Kesra;</li> <li>• BKKBN;</li> <li>• RSJ Provinsi</li> </ul>

KEBIJAKAN UMUM	URUSAN	PROGRAM	SKPD PENGELOLA
14. Mendorong peranserta masyarakat dalam pendidikan pranikah	Pemberdayaan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</li> <li>2. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</li> <li>3. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</li> <li>4. Peningkatan Peranserta dan Kesadaran gender Dalam Pembangunan</li> <li>5. Peningkatan Kualitas Calon Pengantin</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Kesehatan;</li> <li>• Dinas Dikpora;</li> <li>• Kanwil Depag;</li> <li>• BPMPD;</li> <li>• Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil;</li> <li>• Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB;</li> <li>• Biro Administrasi Kesra;</li> <li>• Biro Administrasi Pemerintahan;</li> <li>• BKKBN;</li> <li>• RSJ Provinsi</li> </ul>
	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesehatan Reproduksi Remaja</li> <li>2. Pembinaan Peranserta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/Kesehatan Reproduksi yang Mandiri</li> <li>3. Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)</li> <li>4. Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS</li> <li>5. Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga</li> </ol>	
	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>2. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>3. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</li> </ol>	
15. Mendorong peran posyandu	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>2. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>3. Perbaikan Gizi Masyarakat</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Kesehatan;</li> <li>• BPMPD;</li> <li>• Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB;</li> </ul>

KEBIJAKAN UMUM	URUSAN	PROGRAM	SKPD PENGELOLA
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pengembangan Lingkungan Sehat</li> <li>5. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</li> <li>6. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</li> <li>7. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</li> <li>8. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita</li> <li>9. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biro Administrasi Kesra;</li> <li>• BKKBN;</li> <li>• RSJ Provinsi</li> </ul>
<p>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesehatan Reproduksi Remaja</li> <li>2. Pelayanan Kontrasepsi</li> <li>3. Pembinaan Peranserta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri</li> <li>4. Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat</li> <li>5. Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak</li> <li>6. Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga</li> <li>7. Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU</li> </ol>		
<p>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</li> <li>2. Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan</li> </ol>		

KEBIJAKAN UMUM	URUSAN	PROGRAM	SKPD PENGELOLA
<p>16. Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur antara desa kota, pulau-pulau kecil dan daerah terisolir</p>	<p>Pekerjaan Umum</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Jalan dan Jembatan</li> <li>2. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong</li> <li>3. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong</li> <li>4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan</li> <li>5. Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud Bronjong</li> <li>6. Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan</li> <li>7. Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan</li> <li>8. Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan</li> <li>9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan</li> <li>10. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya</li> <li>11. Penyediaan dan Pengelolaan air Baku</li> <li>12. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya</li> <li>13. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</li> <li>14. Pengendalian Banjir</li> <li>15. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</li> <li>16. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan</li> <li>17. Pengaturan Jasa Konstruksi</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas PU;</li> <li>• Dinas Perhubungan dan Kominfo;</li> <li>• Dinas Pertamben;</li> <li>• Dinas Lutkan</li> <li>• Bappeda</li> <li>• Biro Administrasi Pembangunan</li> <li>• Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> <li>• Dinas Perkebunan</li> <li>• Biro Administrasi Ekonomi</li> </ul>

KEBIJAKAN UMUM	URUSAN	PROGRAM	SKPD PENGELOLA
		18. Pemberdayaan Jasa Konstruksi 19. Pengawasan Jasa Konstruksi	
	Penataan Ruang	1. Perencanaan Tata Ruang 2. Pemanfaatan Ruang 3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
	Perumahan	1. Pengembangan Perumahan 2. Lingkungan Sehat Perumahan 3. Pemberdayaan Komunitas Perumahan	
	Perhubungan	1. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 3. Peningkatan Pelayanan Angkutan 4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 5. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	
	Energi dan Sumberdaya Mineral	1. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	
	Kelautan dan Perikanan	1. Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 2. Pengembangan Perikanan Tangkap	
	Perencanaan Pembangunan	1. Pengembangan Data dan Informasi 2. Kerjasama Pembangunan 3. Pengembangan Wilayah Perbatasan 4. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 5. Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	

KEBIJAKAN UMUM	URUSAN	PROGRAM	SKPD PENGELOLA
		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>7. Perencanaan Pembangunan Ekonomi</li> <li>8. Perencanaan Sosial Budaya</li> <li>9. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</li> <li>10. Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana</li> </ol>	
	Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Ketahanan Pangan</li> <li>2. Pengembangan Agribisnis</li> </ol>	
17. Mendorong intensitas komunikasi antar wilayah	Perencanaan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Data dan Informasi</li> <li>2. Kerjasama Pembangunan</li> <li>3. Pengembangan Wilayah Perbatasan</li> <li>4. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</li> <li>5. Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar</li> <li>6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>7. Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>8. Perencanaan Pembangunan Ekonomi</li> <li>9. Perencanaan Sosial Budaya</li> <li>10. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</li> <li>11. Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bappeda</li> <li>• Biro Adms Pemerintahan</li> <li>• BPS</li> <li>• Dinas Hubkominfo</li> <li>• Dinas PU</li> <li>• Biro Adms. Kerjasama dan SDA</li> <li>• Biro Adms. Pembangunan</li> <li>• Biro Administrasi Ekonomi</li> </ul>

KEBIJAKAN UMUM	URUSAN	PROGRAM	SKPD PENGELOLA
18. Mengembangkan pola keterpaduan antar wilayah dan antar sektor	Perencanaan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Data dan Informasi</li> <li>2. Kerjasama Pembangunan</li> <li>3. Pengembangan Wilayah Perbatasan</li> <li>4. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</li> <li>5. Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar</li> <li>6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>7. Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>8. Perencanaan Pembangunan Ekonomi</li> <li>9. Perencanaan Sosial Budaya</li> <li>10. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</li> <li>11. Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh SKPD</li> <li>• Seluruh Instansi Vertikal</li> </ul>
19. Mengintensifkan komunikasi antara lembaga penegak hukum dengan pemerintah daerah	Pemerintahan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</li> <li>2. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</li> <li>3. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</li> <li>4. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspektorat</li> <li>• Sekretariat DPRD</li> <li>• Biro Administrasi Pemerintahan</li> <li>• Biro Hukum</li> <li>• BKD</li> <li>• Bakesbangpoldagri</li> <li>• Dishubkominfo</li> <li>• Bappeda</li> <li>• Biro Administrasi Kerjasama dan SDA</li> </ul>

KEBIJAKAN UMUM	URUSAN	PROGRAM	SKPD PENGELOLA
		5. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 6. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 7. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 8. Penataan Peraturan Perundang-undangan	
	Kepegawaian	1. Pendidikan Kedinasan 2. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 3. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
20. Mengoptimalkan peranserta masyarakat dalam pengawasan pembangunan	Pemerintahan Umum	1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 2. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 3. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 4. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 5. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 6. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 7. Penataan Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspektorat</li> <li>• Sekretariat DPRD</li> <li>• Biro Administrasi Pemerintahan</li> <li>• Biro Hukum</li> <li>• BKD</li> <li>• Bakesbangpoldagri</li> <li>• Dishubkominfo</li> <li>• Bappeda</li> <li>• Biro Administrasi Kerjasama dan SDA</li> <li>• Biro Keuangan</li> <li>• Biro Administrasi Pembangunan</li> </ul>
21. Mendorong penerapan sistem pelayanan satu pintu/satu atap	Tenaga Kerja	1. Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 2. Peningkatan Kesempatan Kerja 3. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disnakertrans</li> <li>• BPM</li> <li>• Biro Administrasi Kerjasama dan SDA</li> <li>• Dispenda</li> </ul>

KEBIJAKAN UMUM	URUSAN	PROGRAM	SKPD PENGELOLA
	Penanaman Modal Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</li> <li>2. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</li> <li>3. Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah</li> </ol>	
22. Mengembangkan diklat aparatur berbasis kompetensi	Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Kedinasan</li> <li>2. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</li> <li>3. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</li> <li>4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BKD</li> <li>• Dispenda</li> <li>• Biro Keuangan</li> <li>• Biro Administrasi Pemerintahan</li> <li>• Biro Hukum</li> <li>• Biro Administrasi Kerjasama &amp; SDA</li> <li>• Biro Administrasi Perekonomian</li> <li>• Biro Organisasi</li> <li>• BPMPD</li> </ul>
	Pemerintahan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>2. Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota</li> <li>3. Pembinaan dan fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa</li> <li>4. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</li> <li>5. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</li> <li>6. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</li> <li>7. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</li> <li>8. Penataan Peraturan Perundang-undangan</li> <li>9. Penataan Daerah Otonomi Baru</li> </ol>	

KEBIJAKAN UMUM	URUSAN	PROGRAM	SKPD PENGELOLA
23. Memantapan Pengelolaan keuangan Daerah	Pemerintahan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan dan Pengembangan Penegelolaan Keuangan Daerah</li> <li>2. Pembinaan dan Pasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota</li> <li>3. Perbaikan Struktur APBD</li> <li>4. Peningkatan Pendapatan Daerah</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biro Keuangan</li> <li>• Dispenda</li> <li>• SKPD Lingkup Pemprov. Lainnya.</li> </ul>
24. Mengembangkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara konsisten	Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Kedinasan</li> <li>2. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</li> <li>3. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BKD</li> <li>• Biro Organisasi</li> <li>• Biro Keuangan</li> <li>• Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;</li> <li>• Seluruh SKPD terkait</li> </ul>
	Pemerintahan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</li> <li>2. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>3. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota</li> <li>4. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</li> <li>5. Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</li> <li>6. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</li> <li>7. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</li> </ol>	

KEBIJAKAN UMUM	URUSAN	PROGRAM	SKPD PENGELOLA
		8. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 9. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 10. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 11. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 12. Penataan Peraturan Perundang-undangan	
	Kearsipan	1. Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan 2. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	
25. Mengupayakan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan	Penataan Ruang	1. Perencanaan Tata Ruang 2. Pemanfaatan Ruang 3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bappeda</li> <li>• Dinas PU</li> <li>• BLHP</li> <li>• Dinas Lutkan</li> <li>• Dinas Kehutanan</li> <li>• BPN</li> <li>• Biro Administrasi Pembangunan</li> <li>• Biro Administrasi Pemerintahan</li> <li>• Biro Hukum</li> <li>• Satpol PP</li> </ul>
Kelautan dan Perikanan	1. Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar		
Kehutanan	1. Perencanaan dan Pengembangan Hutan		
Lingkungan Hidup	1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
Pertanahan	1. Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah 2. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 3. Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan 4. Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan		

KEBIJAKAN UMUM	URUSAN	PROGRAM	SKPD PENGELOLA
26. Mempertahankan kelestarian sumberdaya alam dan ekosistem	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</li> <li>2. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</li> <li>3. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</li> <li>4. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</li> <li>5. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</li> <li>6. Peningkatan Pengendalian Polusi</li> <li>7. Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan</li> <li>8. Pengendalian Kebakaran Hutan</li> <li>9. Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut (Mangrove, Terumbu Karang, Padang Lamun)</li> <li>10. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BLHP</li> <li>• Dinas Lutkan;</li> <li>• Dinas Kehutanan;</li> <li>• Dinas Tamben;</li> <li>• Dinas PU</li> <li>• Biro Administrasi Kerjasama dan SDA</li> <li>• Biro Administrasi Pembangunan</li> <li>• Satpol PP</li> <li>• Biro Hukum</li> <li>• Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>• Biro Administrasi Ekonomi</li> </ul>
	Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan</li> <li>2. Peningkatan Kesadaran dan Penegakkan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut</li> <li>3. Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut</li> </ol>	

KEBIJAKAN UMUM	URUSAN	PROGRAM	SKPD PENGELOLA
		4. Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	
	Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rehabilitasi Hutan Lahan</li> <li>2. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan</li> <li>3. Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan</li> <li>4. Perencanaan dan Pengembangan Hutan</li> </ol>	
	Energi dan Sumberdaya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan</li> <li>2. Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan</li> </ol>	
	Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya</li> <li>2. Pengendalian Banjir</li> </ol>	
	Pariwisata	1. Pengembangan Destinasi Pariwisata	
27. Mendorong pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</li> <li>2. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</li> <li>3. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</li> <li>4. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</li> <li>5. Peningkatan Pengendalian Polusi</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BLHP</li> <li>• Dinas Lutkan;</li> <li>• Dinas Kehutanan;</li> <li>• Dinas Tamben;</li> <li>• Dinas PU</li> <li>• Biro Administrasi Kerjasama dan SDA</li> <li>• Biro Administrasi Pembangunan</li> <li>• Satpol PP</li> <li>• Biro Hukum</li> <li>• Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> </ul>

KEBIJAKAN UMUM	URUSAN	PROGRAM	SKPD PENGELOLA
		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan</li> <li>7. Pengendalian Kebakaran Hutan</li> <li>8. Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut (Mangrove, Terumbu Karang, Padang Lamun)</li> <li>9. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</li> </ol>	
	Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan</li> <li>2. Peningkatan Kesadaran dan Penegakkan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut</li> <li>3. Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut</li> <li>4. Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan</li> </ol>	
	Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rehabilitasi Hutan Lahan</li> <li>2. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan</li> <li>3. Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan</li> <li>4. Perencanaan dan Pengembangan Hutan</li> </ol>	
	Energi dan Sumberdaya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan</li> <li>2. Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan</li> </ol>	

KEBIJAKAN UMUM	URUSAN	PROGRAM	SKPD PENGELOLA
	Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya</li> <li>2. Pengendalian Banjir</li> </ol>	
	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Destinasi Pariwisata</li> </ol>	
28. Mendorong pengembangan, dan pemanfaatan IPTEK	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BLHP</li> <li>• BPMPD</li> <li>• SKPD Lingkup Pertanian</li> <li>• Dishubkominfo</li> <li>• Distamben</li> <li>• Dinas PU</li> <li>• Dinas Perindag</li> <li>• Dinas Dikpora</li> <li>• Biro Hukum</li> </ul>
	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian dan Pengkajian Teknologi Terapan</li> </ol>	
	Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Penerapan teknologi pertanian/Perkebunan</li> <li>2. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan</li> </ol>	
	Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi</li> <li>2. Pengembangan komunikasi informasi dan media massa</li> <li>3. Peningkatan pelayanan Informasi online dan offline</li> <li>4. Peningkatan pelayanan pos dan telekomunikasi</li> </ol>	
	Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi</li> <li>2. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</li> <li>3. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</li> <li>4. Pengurusan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)</li> </ol>	
	Energi dan Sumberdaya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan</li> </ol>	
	Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian</li> </ol>	

KEBIJAKAN UMUM	URUSAN	PROGRAM	SKPD PENGELOLA
	Pendidikan	1. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	
29. Mengupayakan penambahan daya listrik melalui PLN	Energi dan Sumberdaya Mineral	1. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Pertambangan dan Energi</li> <li>• Biro Administrasi Perekonomian</li> <li>• Biro Administrasi Kerjasama dan SDA</li> <li>• BLHP</li> </ul>
30. Mendorong pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya listrik alternatif	Energi dan Sumberdaya Mineral	1. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	

Berbagai program tersebut di atas diarahkan sebagai penjabaran dari misi yang telah ditetapkan dengan program prioritas sebagai berikut:

1. *Misi Pertama: Mengembangkan masyarakat madani berakhlak mulia, berbudaya, menghormati pluralitas dan kesetaraan gender*
  - a. Pemberdayaan keluarga sebagai basis pendidikan moral, spiritual dan ekonomi produktif;
  - b. Pengembangan kepeloporan pemuda;
  - c. Pengembangan kreatifitas, olahraga, seni dan budaya;
  - d. Pemantapan kerukunan hidup inter dan antar umat beragama;
  - e. Pengembangan dakwah yang moderat dan toleran;
  - f. Penguatan ketahanan budaya;
  - g. Pemenuhan keterwakilan 30 persen perempuan dalam pemerintahan dan perluasan akses terhadap sumberdaya
2. *Misi Kedua: Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkeadilan, terjangkau dan berkualitas*
  - a. Penyelenggaraan pendidikan yang berkeadilan, terjangkau dan berkualitas;
  - b. Penuntasan buta aksara dan wajib belajar 9 tahun, serta pencaangan wajib belajar 12 tahun;
  - c. Pelayanan kesehatan yang berkeadilan, terjangkau dan berkualitas;
  - d. Pengembangan desa sehat dan desa siaga

- 
3. *Misi Ketiga: Menumbuhkan ekonomi pedesaan berbasis sumberdaya lokal dan mengembangkan investasi dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan*
    - a. Revitalisasi pedesaan dan pengembangan gropolitan;
    - b. Pengembangan desa mandiri pangan dengan mengantisipasi dampak perubahan iklim;
    - c. Pengembangan pariwisata sumberdaya alam, budaya dan spiritual;
    - d. Peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja;
    - e. Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan;
    - f. Rehabilitasi hutan dan lahan
  
  4. *Misi Keempat: Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi*
    - a. Percepatan penanganan jalan provinsi dan jalan nasional;
    - b. Percepatan pembangunan bandar udara;
    - c. Percepatan penyediaan air irigasi dan air bersih berbasis hidroklimatologi;
    - d. Percepatan pembangunan kelistrikan, terutama yang berbasis sumberdaya terbarukan;
    - e. Pemanfaatan teknologi tepat guna
  
  5. *Misi kelima: Menegakkan supremasi hukum, pemerintahan yang bebas KKN dan memantapkan otonomi daerah*
    - a. Pemantapan rasa aman dan tertib hukum;
    - b. Percepatan penanggulangan korupsi;
    - c. Penataan birokrasi pemerintahan daerah;
    - d. Pemantapan pengendalian dan pengawasan pembangunan;
    - e. Peningkatan kualitas penyelenggaraan otonomi daerah;
    - f. Pengurangan resiko dan penanggulangan bencana geologi, hidrometeorologi dan pesisir.

Selain program prioritas di atas, mulai 2009 direncanakan pula beberapa terobosan yang diharapkan akan memberikan daya ungkit tinggi bagi percepatan pencapaian sasaran pembangunan yang ditetapkan, khususnya dalam upaya meningkatkan posisi IPM NTB agar mampu berada pada papan tengah ranking nasional. Sebagian besar terobosan

---

pembangunan ini dicanangkan tepat pada perayaan ulang tahun emas NTB 17 Desember 2008. Adapun sejumlah program terobosan tersebut meliputi:

## 1. Bidang Sosial

- a. Penetapan anggaran pendidikan 20 persen dalam APBD 2009
- b. Menetapkan anggaran beasiswa bagi siswa miskin di tingkat SD sederajat sebesar 30 ribu persiswa, SLTP sederajat sebesar 48 ribu persiswa dan SLTA sederajat sebesar 65 ribu persiswa perbulan. Berlaku bagi siswa sekolah negeri maupun swasta
- c. Menetapkan anggaran beasiswa S-1 untuk 2.500 orang sebesar Rp 200 ribu perbulan. Beasiswa S-2 untuk 100 orang sebesar Rp 1 juta perbulan dan S-3 untuk 20 orang sebesar Rp 2 juta perbulan
- d. Menetapkan anggaran pelayanan kesehatan gratis sebesar Rp 60 ribu perorang pertahun bagi 294,5 ribu warga miskin yang belum terjangkau program nasional Jaminan Kesejahteraan Masyarakat (Jamkesmas)
- e. Menganangkan Gerakan 3-A, yaitu AKINO, ABSANO dan ADONO
  - **AKINO** (Angka Kematian Ibu melahirkan **NOL**) merupakan gerakan menekan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi menuju nol yang dilaksanakan di tiap-tiap desa dan kelurahan
  - **ABSANO** (Angka Buta Aksara **NOL**) dan **ADONO** (Angka *Drop-Out* **NOL**) merupakan gerakan dalam upaya menekan angka buta aksara dan angka *drop-out* pada tingkat pendidikan dasar, yang dilaksanakan di tiap-tiap desa dan kelurahan
- f. Membangun rumah sakit rujukan provinsi (tipe B) di Pulau Sumbawa, dengan dukungan pendanaan pemerintah pusat sebesar 45 miliar dan dukungan lahan delapan hektar dari pemerintah Kabupaten Sumbawa
- g. Memantapkan program Desa Siaga untuk pelayanan kesehatan dan tanggap darurat

## 2. Bidang Infrastruktur

- a. Pembentukan "**Kampung Media**. Kampung Media merupakan sebuah sistem informasi terpadu yang dikerjakan warga, muncul dari warga, dan untuk kepentingan warga. Sistem yang bertajuk Kampung Media

---

- *Strength In Own Page* (kekuatan ada di halaman sendiri) melibatkan tiga sarana informasi yang tersedia, yakni jaringan internet, media cetak dan media elektronik.

- b. Pembentukan Desa Mandiri Energi (DME).** Pengembangan DME berdasarkan kenyataan sekitar 45 persen dari 70 ribu desa di Indonesia masuk dalam kategori desa tertinggal. DME merupakan salah satu program yang berikhtiar menjadikan desa mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Secara khusus diharapkan masyarakat pedesaan dapat mengurangi ketergantungan pasokan energi dalam memenuhi kebutuhannya sehari-harinya, terutama kebutuhan akan energi minyak tanah.

DME adalah desa yang masyarakatnya memiliki kemampuan memenuhi lebih dari 60 persen kebutuhan energi (listrik dan bahan bakar) dari sumber energi terbarukan yang dihasilkan melalui pendayagunaan potensi sumberdaya setempat. DME dikembangkan dengan konsep pemanfaatan energi setempat, khususnya energi terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan energi dan kegiatan yang bersifat produktif. Untuk memudahkan perencanaan pengembangannya, DME diklasifikasikan menjadi DME berbasis non Bahan Bakar Nabati (BBN) seperti mikrohidro, tenaga angin, tenaga surya, biogas dan biomassa, serta DME berbasis bahan bakar nabati seperti jarak pagar, kelapa, singkong dan tebu. Dalam prakteknya, sangat dimungkinkan terjadinya kombinasi antara jenis klasifikasi tersebut.

- c. Gerakan NTB Hijau** melalui optimalisasi pemanfaatan lahan hutan dan percepatan rehabilitasi hutan. Untuk mendukung Gerakan NTB Hijau dirumuskan pula program pendukungnya yaitu Sekolah Hijau dan Hutan Cadangan Energi.
- d. Gerakan Kawasan PERMATA.** Gerakan ini merupakan suatu upaya memulihkan dan melestarikan keberadaan mata air pada kawasan yang telah mengalami degradasi lingkungan. Upaya tersebut dilakukan melalui **PER**lindungan **MATA** Air (**PERMATA**), khususnya pada kawasan-kawasan sumber mata air yang perlu dilindungi, baik mata air yang masih berfungsi maupun mata air yang tidak berfungsi akibat kondisi lingkungan yang semakin kritis. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penanaman pohon (penghijauan) maupun perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.
- e. Gerakan Ruang Hijau.** Gerakan ini memiliki dua makna yang saling bergayut. Dari makna denotatif, ruang hijau dapat diartikan

---

sebagai kualitas pemanfaatan dan pengelolaan ruang sebagai wadah aktivitas kreatif produktif manusia yang memanfaatkan sumberdaya alam secara efektif dan efisien serta berkelanjutan. Sedangkan dalam makna konotatif, ruang hijau merupakan singkatan dari “**Ruang Hunian Ideal** (yang dibentuk dengan) **Jalan** mantap, **Air** lestari, dan **Utilitas** yang memadai”. Konsep Ruang Hijau ditetapkan sebagai Standar Pelayanan minimal (SPM) bidang pekerjaan umum dan perumahan. SPM Ruang Hijau secara teknis fungsional merupakan indikator capaian kinerja dalam penyelenggaraan pembangunan urusan pekerjaan umum, perumahan, tata ruang dan urusan terkait lainnya.

- f. Bekerjasama dengan pihak terkait menambah frekwensi penerbangan, yaitu Maskapai Silk Air untuk jurusan Singapura-Mataram menjadi empat kali seminggu, serta penerbangan jurusan Mataram-Bima dan Mataram-Sumbawa, menjadi tiap hari mulai Januari 2009.
- g. Bersama PT. Angkasa Pura I mempercepat penyelesaian pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL), dari yang dijadualkan pada Desember 2009 menjadi September 2009
- h. Mengkoordinasikan dengan Dirjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum untuk percepatan peningkatan jalan nasional di Pulau Sumbawa

### **3. Bidang Ekonomi dan Rumpun Hijau**

- a. **Penerapan sistem *One Gate Service* Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP)** bagi penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Layanan satu atap bagi TKI/TKW ini merupakan pertama kali di Indonesia.
- b. **Pencanangan Visit Lombok- Sumbawa 2012** dengan target kunjungan wisatawan sejumlah 1 juta orang pada 2012. Program ini merupakan langkah strategis untuk meletakkan pijakan guna mengelola segenap potensi dan daya tarik wisata NTB agar menjadi daerah tujuan wisata utama nasional maupun internasional. Dipilihnya 2012 sebagai tahun kunjungan, didasarkan atas sejumlah asumsi, seperti telah beroperasinya Bandara Internasional Lombok, terbangunnya kawasan wisata oleh *EMAAR Property*, situasi krisis keuangan global telah membaik, situasi politik dalam keadaan yang kondusif (tidak ada agenda pilkada/pemilu), serta pasca NTB menjadi tuan rumah pasar wisata.

- 
- c. **Pencanangan “Bumi Sejuta Sapi”**. NTB merupakan salah satu daerah penunjang kebutuhan (daging) sapi untuk pasar nasional. Saat ini potensi lahan yang tersedia untuk pengembangan ternak di daerah NTB seluas 1.928.300 ha. Sedangkan ketersediaan pakan ternak sebanyak 2.655.294 *animal unit (au)*, dan potensi yang sudah dimanfaatkan sejumlah 638.983 *au*, sehingga masih memungkinkan untuk pengembangan ternak kedepan sebanyak 2.016.311 *au*. Disamping itu hasil penelitian kerjasama antara Pemerintah NTB, Universitas Mataram dan Pemerintah Australia telah menghasilkan metode pengembangan ternak sapi yang dikenal dengan metode S3 (satu induk, satu anak, satu tahun) yang akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
- d. Menciptakan 100 ribu Wirausaha Baru
- e. Penggagas pembentukan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi “Sunda Kecil” meliputi Bali, NTB dan NTT dengan penandatanganan “Piagam Kupang” pada 20 Desember 2008
- f. Penandatanganan MOU antara Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi NTB dengan General Manager PT. Garuda Indonesia untuk memasarkan potensi investasi NTB ke seluruh Indonesia dan Kawasan Timur Tengah
- g. Peluncuran perdana ekspor air mineral organik ke Australia
- h. Memantapkan program “Desa Mandiri Pangan” guna memastikan ketersediaan, kemudahan dan keragaman pangan
- i. Revitalisasi penyuluh pertanian, kehutanan, peternakan, perkebunan dan perikanan
- j. Memantapkan Gerakan “Gemar Memakan Ikan” untuk peningkatan kualitas gizi masyarakat
- k. Meluncurkan “Pasar Tani” di Kota Mataram dan Kota Selong Lombok Timur, sebagai model pengembangan pasar khusus bagi produk unggul pertanian yang mendekatkan petani dengan pembeli
- l. Membangun kemitraan dengan BUMN untuk meningkatkan kinerja Usaha Kecil Mikro dan Koperasi (UKMK) dan Panti-Panti Sosial

---

#### 4. Bidang Pemerintahan, Pematapan Otonomi Daerah dan Reformasi Birokrasi

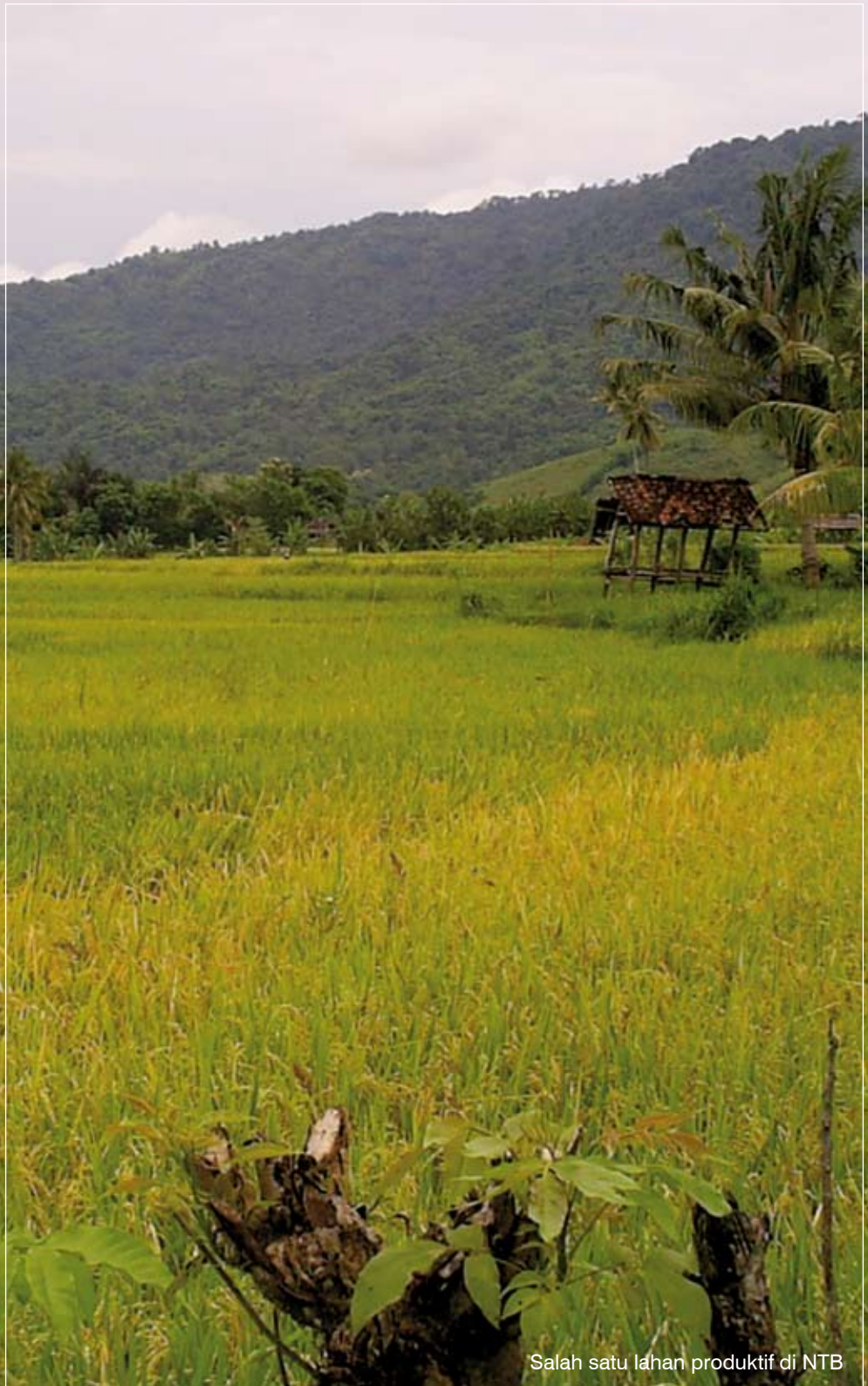
- a. Melakukan kunjungan kerja ke seluruh Kabupaten/Kota untuk koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui forum rapat kerja diperluas
- b. Menandatangani MoU dengan seluruh Bupati/Walikota untuk sharing anggaran pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis bagi warga miskin
- c. Bersama DPRD Provinsi NTB menetapkan APBD pada 15 Desember 2008, yang selanjutnya akan menjadi konvensi penetapan APBD NTB
- d. Memfasilitasi penandatanganan MoU antara Kejaksaan, Kepolisian dan BPKP untuk percepatan pemberantasan korupsi
- e. Pencanangan pemakaian PIN Anti Korupsi KPK untuk seluruh karyawan lingkup pemerintah Provinsi NTB
- f. Penandatanganan Pakta Integritas bagi setiap pemangku jabatan struktural untuk tidak melakukan KKN dan bekerja secara profesional
- g. Revisi beberapa Peraturan Gubernur untuk meningkatkan pelayanan, transparansi dan memperkecil peluang korupsi
- h. Melakukan uji materi Undang-Undang 39 Tahun 2007 tentang cukai ke Mahkamah Konstitusi untuk memperjuangkan dana cukai tembakau dari Pemerintah
- i. Menetapkan Hari Jumat sebagai Hari Imtaq dan Hari Sabtu sebagai Hari Olahraga di lingkup Pemerintah Provinsi NTB
- j. Menata personil birokrasi berdasarkan integritas dan kompetensi guna mewujudkan birokrasi berkinerja tinggi
- k. Menerapkan *e-Procurement* untuk transparansi sistem pengadaan barang di lingkup Pemerintah Provinsi





**Bab VII**  
**Indikasi Rencana Program Pembangunan dan**  
**Kebutuhan Pendanaan**

---



Salah satu lahan produktif di NTB

## Bab VII

# Indikasi Rencana Program Pembangunan dan Pendanaan

Pembiayaan pembangunan di Nusa Tenggara Barat (NTB) disamping dibiayai dari sumber pembiayaan Daerah (APBD) juga bersumber dari pembiayaan Pemerintah (APBN) baik melalui jenis pendanaan dana dekonsentrasi dan tugas Pembantuan serta jenis pembiayaan lainnya seperti Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN).

Urusan wajib dan urusan pilihan yang kewenangan penyelenggaraannya dilaksanakan pemerintah provinsi, dapat dikelompokkan berdasarkan empat bidang pembangunan:

1. Bidang sosial, meliputi urusan pendidikan, perpustakaan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, kepemudaan dan olahraga dan kebudayaan.
2. Bidang Infrastruktur, meliputi urusan pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, serta energi dan sumberdaya mineral.
3. Bidang ekonomi dan rumpun hijau, meliputi urusan koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal daerah, perdagangan, industri, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, transmigrasi, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata.
4. Bidang pemerintahan dan umum, meliputi urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, kearsipan serta komunikasi dan Informasi.

Berdasarkan pengelompokkan di atas dan mencermati kebutuhan indikatif pendanaan dalam APBD Provinsi NTB 2009 dan prosentase berdasarkan kelompok urusan, serta dengan mengasumsikan beberapa kondisi pada lima tahun kedepan, maka dapat ditetapkan Rencana Kebutuhan Indikatif Pendanaan selama periode 2010–2013 sebagai berikut :

---

## 1. Bidang Sosial: 35-40 persen dari total APBD

- a. Urusan Pendidikan : minimal 20 persen dari total APBD. Proporsi pembiayaan akan dikawal sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemenuhan 20 persen anggaran pendidikan merupakan wujud implementasi fungsi keberadaan pemerintah yaitu memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Ini juga menjadi bagian dari program prioritas Pemerintah NTB 2009-2013, yaitu penyelenggaraan pendidikan yang berkeadilan, terjangkau dan berkualitas; penuntasan buta aksara dan wajib belajar 9 Tahun, serta pencaangan wajib belajar 12 Tahun.
- b. Urusan Kesehatan dengan proporsi alokasi diharapkan menuju 15 persen dari total APBD. Proporsi pembiayaan ini terdistribusi pada tiga kelompok aspek penanganan kesehatan: promotif, preventif dan kuratif dengan penekanan pada aspek promotif-preventif. Ini sesuai dengan paradigma penanganan urusan Kesehatan yang mengacu pada pepatah sederhana “mencegah lebih baik daripada mengobati” serta pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Dengan penekanan pada aspek promotif-preventif, diharapkan dalam periode lima tahun kedepan penanganan aspek *Kuratif* tidak lagi mendominasi pembiayaan kesehatan. Melalui pendekatan “kesehatan masyarakat mandiri” maka orientasi “penanganan orang sakit” beralih menjadi “menjaga orang Sehat agar tetap sehat”. Bila kondisi ini tercapai maka alokasi pembiayaan yang dibutuhkan untuk penanganan kesehatan dapat dioptimalisasi dan dirasionalisasi.
- c. Urusan Perpustakaan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Kepemudaan dan Olah Raga, serta Kebudayaan, masing-masing mendapat proporsi alokasi sampai dengan 2 persen dari total APBD.

## 2. Bidang Infrastruktur : sekitar 20 persen dari total APBD

Proporsi pembiayaan bidang infrastruktur yang relatif besar ini diperlukan mengingat NTB memang masih perlu dan mendesak untuk “membuka” akses berbagai kawasan strategis maupun kawasan ekonomis yang potensial memicu daya saing daerah. Alokasi pembiayaan infrastruktur ini sebagian merupakan *cost sharing* yang dipersyaratkan dalam menetapkan keberadaan berbagai pembangunan infrastruktur

---

besar di NTB, termasuk dalam mendukung keberadaan infrastruktur yang berkaitan dengan pencapaian kinerja bidang sosial khususnya urusan pendidikan dan kesehatan. Dari tujuh urusan dalam bidang infrastruktur, urusan pekerjaan umum mempunyai proporsi alokasi yang terbesar, sekitar 14 persen dari total APBD, kemudian diikuti urusan perhubungan sekitar 2,5 persen dan urusan energi dan sumberdaya mineral, perencanaan pembangunan, lingkungan hidup, perumahan dan penataan ruang, dengan proporsi alokasi masing-masing di bawah 2 persen. Alokasi pembiayaan tersebut ke depan tentunya dapat dirasionalisasi seiring dengan telah terpenuhinya kewajiban pemerintah provinsi dalam *cost sharing* pembangunan beberapa infrastruktur dan kebutuhan pendanaan bidang lainnya.

### **3. Bidang Ekonomi dan Rumpun Hijau: 13-16 persen dari total APBD**

Proporsi pembiayaan sebagian diarahkan untuk stimulan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, serta pembiayaan pada masa-masa awal pengenalan dan pendampingan berbagai program terobosan yang dicanangkan. Dari 12 Urusan dalam bidang ekonomi dan rumpun hijau, urusan pertanian mempunyai proporsi alokasi terbesar mencapai 5 persen dari total APBD, kemudian diikuti urusan ketenagakerjaan sekitar 1,5 persen, dan disusul urusan kelautan dan perikanan sekitar 1,2 persen, koperasi dan usaha kecil menengah sekitar 1 persen serta urusan penanaman modal daerah, perdagangan, industri, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketahanan pangan, transmigrasi, kehutanan, dan pariwisata dengan proporsi alokasi masing-masing dibawah 1 persen. Nantinya seiring dengan tercapainya kinerja bidang sosial dan bidang infrastruktur yang menelan alokasi anggaran terbesar dari APBD, maka alokasi pembiayaan bidang ekonomi dan rumpun hijau dapat dirasionalisasi sesuai kebutuhan.

### **4. Bidang Pemerintahan: 22-30 persen dari total APBD.**

Dari empat urusan dalam bidang pemerintahan, urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian mempunyai proporsi alokasi terbesar antara 21-28 persen. Dalam perkembangan berikutnya, proporsi alokasi

---

urusan ini mengalami penurunan secara signifikan menjadi 20 persen. Urusan berikutnya adalah kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, dengan alokasi sekitar 1,2 persenan disusul urusan kearsipan serta komunikasi dan informasi, masing-masing di bawah 1 persen.

Rincian indikasi rencana program pembangunan dan kebutuhan pendanaan yang berasal dari dana APBD Provinsi NTB berdasarkan pengelompokan bidang dan urusan dalam kurun waktu 2009-2013 bisa dilihat sebagai berikut:

**Table**  
**Rencana Program Pembangunan dan**  
**Provinsi NTB Menurut Bidang**

NO	KODE URUSAN	URUSAN	2009		2010
			JUMLAH (Rp)	(%)	Rp.
		<b>BIDANG SOSIAL</b>	<b>439,856,192,548</b>	<b>35.29</b>	<b>520,964,80</b>
1	1.01	Pendidikan	240,722,106,108	19.31	274,192,
2	1.26	Perpustakaan	9,299,924,360	0.75	10,967,
3	1.02	Kesehatan	147,575,559,503	11.84	178,224,
4	1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil	443,510,000	0.04	1,370,
5	1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6,940,547,340	0.56	9,596,
6	1.12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	879,591,300	0.07	1,370,
7	1.13	Sosial	21,517,311,981	1.73	27,419,
8	1.18	Kepemudaan dan Olah Raga	464,008,000	0.04	2,741,
9	1.17	Kebudayaan	12,013,633,956	0.96	13,709,
		<b>BIDANG INFRASTRUKTUR</b>	<b>285,146,247,366</b>	<b>22.88</b>	<b>273,232,32</b>
10	1.03	Pekerjaan Umum	154,830,569,550	12.42	182,748,
11	1.04	Perumahan	1,575,260,425	0.13	2,741,
12	1.05	Penataan Ruang	716,514,650	0.06	1,370,
13	1.06	Perencanaan Pembangunan	16,124,209,245	1.29	17,822,
14	1.07	Perhubungan	87,523,772,174	7.02	34,274,
15	1.08	Lingkungan Hidup	6,322,877,180	0.51	9,596,
16	2.03	Energi dan Sumberdaya Mineral	18,053,044,142	1.45	24,677,
		<b>BIDANG EKONOMI DAN RUMPUN HIJAU</b>	<b>145,675,605,552</b>	<b>11.69</b>	<b>188,507,00</b>
17	1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	9,654,238,655	0.77	12,338,
18	1.16	Penanaman Modal Daerah	9,774,147,408	0.78	10,967,
19	2.06	Perdagangan	8,633,815,206	0.69	9,596,
20	2.07	Industri	2,568,128,700	0.21	3,427,
21	1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8,171,775,793	0.66	9,596,
22	1.14	Ketenagakerjaan	17,259,262,743	1.38	20,564,
23	1.21	Ketahanan Pangan	5,538,668,282	0.44	13,709,
24	2.08	Transmigrasi	756,055,364	0.06	2,741,
25	2.01	Pertanian	57,105,432,577	4.58	68,548,
26	2.02	Kehutanan	9,867,555,360	0.79	13,709,
27	2.05	Kelautan dan Perikanan	14,296,209,464	1.15	16,451,
28	2.04	Pariwisata	2,050,316,000	0.16	6,854,
		<b>BIDANG PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>375,649,468,301</b>	<b>30.14</b>	<b>388,255,87</b>
29	1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	15,437,292,305	1.24	16,999,
30	1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	359,060,012,946	28.81	370,159,
31	1.24	Kearsipan	440,068,200	0.04	1,370,
32	1.25	Komunikasi dan Informasi	712,094,850	0.06	1,096,
		<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>1,246,327,513,767</b>	<b>100</b>	<b>1,370,960,00</b>

7.1

Kebutuhan Indikatif Pendanaan APBD  
dan Urusan Tahun 2009 – 2013

KEBUTUHAN INDIKATIF PENDANAAN PER TAHUN							
	2011			2012		2013	
	(%)	JUMLAH (Rp)	(%)	JUMLAH (Rp)	(%)	JUMLAH (Rp)	(%)
<b>0,000</b>	<b>38.00</b>	<b>593,488,584,000</b>	<b>39.00</b>	<b>684,398,860,944</b>	<b>39.80</b>	<b>790,212,427,550</b>	<b>40.31</b>
000,000	20.00	304,353,120,000	20.00	343,919,025,600	20.00	392,067,689,184	20.00
680,000	0.80	12,174,124,800	0.80	13,928,720,537	0.81	16,074,775,257	0.82
800,000	13.00	213,047,184,000	14.00	249,341,293,560	14.50	294,050,766,888	15.00
960,000	0.10	1,217,412,480	0.08	1,203,716,590	0.07	1,372,236,912	0.07
720,000	0.70	10,956,712,320	0.72	16,164,194,203	0.94	19,603,384,459	1.00
960,000	0.10	1,217,412,480	0.08	1,547,635,615	0.09	1,568,270,757	0.08
200,000	2.00	30,435,312,000	2.00	34,391,902,560	2.00	39,010,735,074	1.99
920,000	0.20	3,347,884,320	0.22	5,158,785,384	0.30	6,861,184,561	0.35
600,000	1.00	15,217,656,000	1.00	17,195,951,280	1.00	17,643,046,013	0.90
<b>8,000</b>	<b>19.93</b>	<b>318,505,540,080</b>	<b>20.93</b>	<b>353,720,717,830</b>	<b>20.57</b>	<b>404,809,889,082</b>	<b>20.65</b>
968,000	13.33	218,069,010,480	14.33	242,806,832,074	14.12	278,368,059,321	14.20
920,000	0.20	3,043,531,200	0.20	3,439,190,256	0.20	3,920,676,892	0.20
960,000	0.10	1,521,765,600	0.10	1,719,595,128	0.10	1,960,338,446	0.10
480,000	1.30	19,782,952,800	1.30	22,354,736,664	1.30	25,484,399,797	1.30
000,000	2.50	38,044,140,000	2.50	42,989,878,200	2.50	49,008,461,148	2.50
720,000	0.70	10,652,359,200	0.70	12,037,165,896	0.70	13,722,369,121	0.70
280,000	1.80	27,391,780,800	1.80	28,373,319,612	1.65	32,345,584,358	1.65
<b>0,000</b>	<b>13.75</b>	<b>209,242,770,000</b>	<b>13.75</b>	<b>262,238,257,020</b>	<b>15.25</b>	<b>326,592,385,090</b>	<b>16.7</b>
640,000	0.90	13,695,890,400	0.90	17,195,951,280	1.00	23,524,061,351	1.20
680,000	0.80	12,174,124,800	0.80	13,756,761,024	0.80	15,682,707,567	0.80
720,000	0.70	10,652,359,200	0.70	12,037,165,896	0.70	16,662,876,790	0.85
400,000	0.25	3,804,414,000	0.25	4,298,987,820	0.25	7,841,353,784	0.40
720,000	0.70	10,652,359,200	0.70	12,037,165,896	0.70	15,878,741,412	0.81
400,000	1.50	22,826,484,000	1.50	25,793,926,920	1.50	33,325,753,581	1.70
600,000	1.00	15,217,656,000	1.00	20,635,141,536	1.20	25,484,399,797	1.30
920,000	0.20	3,043,531,200	0.20	3,439,190,256	0.20	3,920,676,892	0.20
000,000	5.00	76,088,280,000	5.00	94,577,732,040	5.50	117,620,306,755	6.00
600,000	1.00	15,217,656,000	1.00	20,635,141,536	1.20	23,524,061,351	1.20
520,000	1.20	18,261,187,200	1.20	24,074,331,792	1.40	27,444,738,243	1.40
800,000	0.50	7,608,828,000	0.50	13,756,761,024	0.80	15,682,707,567	0.80
<b>2,000</b>	<b>28.32</b>	<b>400,528,705,920</b>	<b>26.32</b>	<b>419,237,292,206</b>	<b>24.38</b>	<b>438,723,744,197</b>	<b>22.38</b>
904,000	1.24	18,869,893,440	1.24	22,354,736,664	1.30	25,484,399,797	1.30
200,000	27.00	380,441,400,000	25.00	395,506,879,440	23.00	411,671,073,643	21.00
960,000	0.10	1,521,765,600	0.10	1,547,635,615	0.09	1,960,338,446	0.10
768,000	0.08	1,217,412,480	0.08	1,375,676,102	0.08	1,568,270,757	0.08
<b>0,000</b>	<b>100</b>	<b>1,521,765,600,000</b>	<b>100</b>	<b>1,719,595,128,000</b>	<b>100</b>	<b>1,960,338,445,920</b>	<b>100</b>





## **Bab VIII**

# **Pentahapan Pembangunan dan Penetapan Indikator Kinerja**

---

- 8.1. Target Agregatif Pembangunan NTB 2009-2013
- 8.2. Pentahapan Pembangunan NTB 2009-2013
  - A. Tahap Orientasi dan Konsolidasi
  - B. Tahap Percepatan Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat 2010-2011
  - C. Tahap Perwujudan NTB Bersaing
- 8.3. Penetapan Indikator Kinerja



Aktifitas di Pelabuhan Lembar

## Bab VIII

# Pentahapan Pembangunan dan Penetapan Indikator Kinerja

Dari uraian mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai selama periode 2009–2013, ditetapkan *target agregat* untuk beberapa indikator utama pembangunan dan disusun pentahapan sebagai sasaran-sasaran antara yang ingin dicapai.

### 8.1 Target Agregatif Pembangunan NTB 2009-2013

Target Agregat ditetapkan terhadap beberapa indikator utama meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Gini, Nilai Tukar Petani (NTP), Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, Persentase Penduduk Miskin dan Persentase Pengangguran Terbuka. IPM NTB pada 2007 yang nilainya sebesar 63,0 ditargetkan menjadi sekitar 70,0 pada Tahun 2013. Penetapan target ini berdasarkan data lima tahun terakhir dimana IPM NTB selalu mengalami kenaikan. Namun demikian, diakui upaya meningkatkan IPM sebesar sekitar 7,00, bukanlah upaya yang mudah. Harus dilakukan berbagai langkah strategis, yang tidak saja sekedar membutuhkan kecepatan, namun harus dengan percepatan penanganan lintas sektor secara integratif.

Adapun target capaian beberapa indikator utama yang ditetapkan selama kurun waktu 2009-2013 adalah sebagaimana terpampang di bawah ini:

**Tabel 8.1**  
Target Capaian Indikator IPM Provinsi NTB Tahun 2009-2013

NO	TAHUN	USIA HARAPAN HIDUP (TAHUN)	RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN)	ANGKA MELEK HURUF (%)	PARITAS DAYA BELI (RP)
1	2007/2008	61,20	6,70	80,10	623.900
2	2009	61,80	7,10	84,30	647.000
3	2010	62,30	7,50	88,45	675.000
4	2011	63,10	8,00	92,10	715.000
5	2012	64,80	8,30	96,70	735.000
6	2013	66,18	8,61	100,00	750.000

**Tabel 8.2**  
Target Capaian Indeks Pembangunan Gender  
Provinsi NTB Tahun 2009-2013

NO	TAHUN	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER
1	2007/2008	54,60
2	2009	55,15
3	2010	56,20
4	2011	57,35
5	2012	58,78
6	2013	60,40

Meskipun pada saat dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB 2009-2013 ini disusun sedang terjadi krisis ekonomi di Amerika Serikat, dan dampaknya mulai dirasakan oleh seluruh belahan dunia, namun diharapkan krisis tersebut tidak menyebabkan terpuruknya ekonomi nasional dan daerah. Di NTB, dampak krisis tersebut memang telah mulai dirasakan diantaranya berupa berkurangnya permintaan ekspor produksi NTB seperti produk kerajinan dan pengolahan. Inflasi diperkirakan tetap cukup tinggi, hal ini antara lain disebabkan oleh menurunnya nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS, serta gejolak harga barang dan jasa.

**Tabel 8.3**  
Target Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi  
Provinsi NTB Tahun 2009-2013

NO	TAHUN	PERTUMBUHAN EKONOMI (%)	TINGKAT INFLASI (%)
1	2007/2008	4,89	8,76
2	2009	5,00 – 6,00	7,00 – 8,00
3	2010	6,00 – 6,25	7,00
4	2011	6,25 – 6,50	6,00 – 7,00
5	2012	6,50 – 7,00	6,00
6	2013	6,50 – 7,00	6,00

Nilai Tukar Petani (NTP) sesuatu yang sangat strategis untuk dapat selalu ditingkatkan setiap tahun. *saving*, untuk selanjutnya dapat dipergunakan dalam investasi pada faktor produksi. NTP di NTB masih dibawah rata-rata nasional. Pada 2009 NTP di NTB ditargetkan sebesar 61,35 persen dan sampai dengan 2013 diharapkan naik menjadi 78,00 persen.

**Tabel 8.4**  
Target Nilai Tukar Petani Provinsi NTB Tahun 2009-2013

NO	TAHUN	NILAI TUKAR PETANI
1	2007	55,25
2	2008	58,15
3	2009	61,35
4	2010	64,10
5	2011	68,40
6	2012	72,50
7	2013	78,00

Pengurangan jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka merupakan salah satu target capaian kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 2009-2013. Persentase penduduk miskin ditargetkan terus menerus menurun dari 24,99 persen di 2007/2008 menjadi sekitar 14,00persen pada 2013. Target ini disusun dengan memperhitungkan potensi dan upaya akselerasi lintas sektor yang diprogramkan, serta memperhatikan kesepakatan dan amanat pencapaian “*Millenium Development Goals* (MDG’s). Sedangkan persentase pengangguran terbuka ditargetkan turun dari 6,48 persen pada 2007/2008 menjadi sekitar 5,00 persen pada 2013.

**Tabel 8.5**  
Persentase Penduduk Miskin dan Pengangguran

NO	TAHUN	PENDUDUK MISKIN (%)	PENGANGGURAN TERBUKA (%)
1	2007/2008	24,99	6,48
2	2009	22,10	6,20
3	2010	20,00	6,00
4	2011	18,00	5,50
5	2012	16,00	5,25
6	2013	14,00	5,00

## 8.2 Pentahapan Pembangunan NTB 2009-2013

Dalam rangka mencapai Visi Pembangunan NTB 2009-2013 “TERWUJUDNYA MASYARAKAT NTB YANG BERIMAN DAN BERDAYASAING” sebagai *ultimate goal*, telah ditetapkan lima misi, dengan delapan tujuan serta 33 sasaran. Dalam kaitan upaya pencapaian

---

visi tersebut, maka perlu disusun pentahapan pembangunan sebagai tahapan antara dalam pencapaiannya. Tahapan pembangunan NTB selama kurun waktu 2009-2013, dibagi dalam tiga tahapan:

### **A. Tahap Orientasi dan Konsolidasi (2009)**

Merupakan tahapan untuk menyambung, melanjutkan dan menajamkan capaian Rencana Strategis Provinsi NTB Tahun 2003-2008, serta strategi dan pencapaian pembangunan masa sebelumnya sebagai dasar pembangunan lima tahun ke depan (2009-2013), dengan mengacu pada RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dan visi misi gubernur dan wakil gubernur Terpilih. Disamping itu, sejak akhir Agustus 2008 Pemerintah provinsi merestrukturisasi organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008.

Pada tahap ini, diupayakan pemanfaatan secara optimal potensi yang telah terbangun pada tahap sebelumnya, dan upaya meletakkan landasan yang lebih kokoh untuk berkembangnya ekonomi kerakyatan berbasis desa yang sinergis dengan pengembangan ekonomi perkotaan, serta tercapainya kondisi sosial-budaya, politik dan keamanan yang kondusif.

Penanganan berbagai urusan, terutama yang terkait dengan program-program prioritas dan program terobosan harus telah mulai mengambil peran pada tahap orientasi dan konsolidasi ini. Demikian pula halnya dengan peningkatan kualitas aparatur, harus mendapat perhatian dengan melakukan pondasi penataan SDM berbasis kompetensi.

Tahapan ini terutama untuk mendukung tercapainya hal-hal berikut :

- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia NTB di segala bidang dengan didasari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Meningkatkan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme aparatur Pemerintah Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diarahkan kepada pelayanan serta peningkatan kemampuan masyarakat.
- Memanfaatkan potensi ekonomi lokal melalui kerjasama regional antar wilayah guna mendukung pengembangan ekonomi daerah guna meningkatkan daya tarik investasi.

---

## **B. Tahap Percepatan Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat (2010-2011)**

Pada tahap ini, diupayakan akselerasi atau peningkatan kecepatan penanganan pembangunan serta pencapaian berbagai target indikator kinerja yang telah ditetapkan, termasuk pengawalan secara ketat berbagai program prioritas dan terobosan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB.

Pada tahap ini harus telah terjadi peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah menuju pada pelayanan prima sebagai perwujudan *clean and good governance*. Transparansi dan efisiensi menjadi pertimbangan utama dalam pemberian pelayanan, sehingga *Electronic Government (E-Gov)* menjadi pilihan dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Tahapan ini terutama untuk mendukung tercapainya hal-hal berikut :

- Jaminan pencapaian target pelayanan sosial dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat miskin.
- Terbukanya peluang yang proporsional bagi aktualisasi kaum perempuan serta jaminan perlindungan terhadap kepentingan perempuan dan anak dalam berpartisipasi pada proses pembangunan,.
- Pengembangan usaha-usaha ekonomi produktif dalam berbagai sektor sebagai upaya membuka kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang selanjutnya dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan
- Terbukanya akses dan ketersediaan layanan infrastruktur pada beberapa kawasan potensial dan strategis yang sebelumnya sulit dijangkau, dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga menarik minat investor baik dari dalam maupun luar negeri.

## **C. Tahap Perwujudan NTB BERSAING (2012-2013)**

Tahap ini adalah tahap terakhir yang merupakan tahap perwujudan visi masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Beriman dan Berdayasaing (NTB BERSAING)”. Terwujudnya NTB BERSAING ditandai dengan tercapainya indikator-indikator agregatif pembangunan daerah yaitu

---

meningkatnya IPM. Selain itu ditandai pula pencapaian berbagai target indikator kinerja, seperti semakin kecilnya kesenjangan antarkawasan dan sektoral, semakin tingginya nilai tukar petani, semakin tingginya kesetaraan gender dan keberdayaan perempuan, semakin meningkat dan stabilnya pertumbuhan ekonomi daerah, menurunnya angka inflasi, menurunnya pengangguran, serta berkurangnya penduduk miskin. Tahapan ini terutama untuk mendukung terwujudnya masyarakat NTB yang berdayasaing (*competitive*), yang mengarah kepada kemandirian dalam seluruh aspek kehidupan, melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat.

Meskipun masing-masing tahapan mendukung tercapainya tujuan tertentu, namun bukan berarti tujuan tersebut diupayakan dan dituntaskan pada tahapan yang bersangkutan, namun hal tersebut hanya merupakan pemusatan perhatian (*focussing*). Masing-masing upaya pada setiap tahapan merupakan satu kesatuan untuk mendukung tercapainya NTB BERSAING dalam kurun waktu 2009-2013.

---

### 8.3 Penetapan Indikator Kinerja

---

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal yang ada, indikator capaian kinerja dari masing-masing sasaran program pembangunan Provinsi NTB Tahun 2009–2013 yang ditetapkan sebagaimana pada dua matrik di bawah ini.

**Tabel 8.6**  
Indikator Kinerja Pembangunan Menurut Sasaran Strategis

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1. Masyarakat Religius; 2. Masyarakat Berbudaya dan Beretika; 3. Masyarakat Berwawasan Global; 4. Kesetaraan dan Keadilan Gender di Berbagai Aspek;	1. Konflik SARA; 2. Penyalahgunaan NAPZA; 3. Penanganan Penderita HIV/AIDS; 4. Gender Development Indeks (GDI);
5. Masyarakat Sejahtera; 6. Masyarakat Sehat; 7. Masyarakat Cerdas dan Terampil; 8. Masyarakat Berwawasan IPTEK;	5. Rata-Rata Lama Sekolah 6. Angka Partisipasi Kasar (APK); 7. Angka Partisipasi Murni (APM); 8. Angka Putus Sekolah; 9. Angka Melek Huruf; 10. Angka Melanjutkan Sekolah; 11. Penemuan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG); 12. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna; 13. Usia Harapan Hidup (UHH); 14. Angka Kematian Bayi (AKB); 15. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI); 16. Prevalensi Gizi Buruk; 17. Laju Pertumbuhan Penduduk; 18. Tingkat Kelahiran Total ( <i>Total Fertility Rate = TFR</i> ); 19. Usia Kawin; 20. Cakupan Air Bersih; 21. Perpustakaan Desa dan Perpustakaan Keliling; 22. Perpustakaan Rumah Ibadah 23. Angka Kunjungan ke Perpustakaan;
9. Struktur APBD Mantap 10. Usaha Pengolahan Berbasis Pertanian. 11. Iklim Usaha Yang Kondusif; 12. Ketahanan dan Kemandirian Pangan Daerah; 13. Surplus Sapi Potong dan Sapi Bibit 14. Masyarakat "Sadar Wisata"; 15. Tenaga Kerja Yang Terampil dan Produktif; 16. Kawasan Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil yang Terpadu dan Berkelanjutan; 17. Masyarakat Yang Kreatif dan Inovatif;	24. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi; 25. Laju Inflasi; 26. Laju Pertumbuhan Investasi; 27. <i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i> ; 28. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita ADHB (tanpa sektor pertambangan); 29. Paritas Daya Beli; 30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 31. Kinerja Laporan Keuangan Daerah; 32. Pendapatan Asli Daerah (PAD); 33. Angka Kemiskinan; 34. Angka Pengangguran Terbuka; 35. Peningkatan Populasi Ternak Sapi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
	36. Pola Pangan Harapan (PPH); 37. Desa Mandiri Pangan 38. Cadangan Pangan; 39. Tingkat Konsumsi Ikan; 40. Jumlah Kelompok Sadar Wisata; 41. Angka Kunjungan Wisatawan; 42. Koperasi Berkualitas; 43. Wirausaha Baru; 44. Forum Pengembangan Ekonomi Lokal;
18. Infrastruktur yang Memadai; 19. Tata Ruang yang Serasi, Selaras dan Produktif; 20. Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat; 21. Kawasan Strategis, Cepat Tumbuh dan Tertinggal; 22. Sistem Transportasi Terpadu; 23. Sistem Komunikasi dan Informasi Antar Wilayah; 24. Kebutuhan Air Baku yang Memadai; 25. Kebutuhan Energi yang Memadai; 26. Pembangunan Daerah yang Seimbang dan Merata; 27. Sistem Pengelolaan Lingkungan Berbasis Mitigasi Bencana; 28. Lingkungan Lestari;	45. Tingkat Kemantapan Jalan; 46. Peraturan Tentang Tata Ruang; 47. Cakupan Jamban Keluarga (Jaga); 48. Cakupan Listrik (Ratio Elektrifikasi); 49. Kampung Media; 50. Peraturan tentang Telekomunikasi dan Informasi; 51. Sumber Mata Air; 52. Petani Pemakai Air 53. Maskapai dan Frekuensi Penerbangan Domestik dan Internasional yang Melayani Rute Provinsi NTB; 54. Interkoneksi Angkutan Umum Antar Simpul Transportasi; 55. Peralatan Peringatan Dini Bencana ( <i>Early Warning System</i> ); 56. Lahan Kritis, Kawasan Hutan, Kawasan Sawah Abadi, Ruang Terbuka Hijau, Kawasan Konservasi;
29. Aparatur yang Bersih dan Profesional; 30. Tatalaksana Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik 31. Sistem Pelayanan Publik yang Transparan, Berkepastian Hukum dan Tepat Waktu ; 32. Masyarakat Taat dan Sadar Hukum; 33. Daerah yang Aman dan Tertib; 34. Masyarakat Sadar Berpolitik; 35. Sistem Administrasi Kependudukan yang Berkelanjutan;	57. Temuan Pelanggaran Aparatur; 58. Standar Operasional Prosedur (SOP); 59. Standar Pelayanan Minimal (SPM); 60. Indeks Demokrasi; 61. Pelanggaran Hukum dan HAM; 62. kriminalitas; 63. Perdagangan Manusia ( <i>Human Trafficking</i> ); 64. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); 65. Produk hukum daerah anti KKN dan pementapan otonomi daerah;

**Tabel 8.7**

Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2009-2013

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA	
			KONDISI TAHUN 2007	TARGET TAHUN 2013
I	MISI PERTAMA : Mengembangkan masyarakat madani yang berakhlak mulia, berbudaya, menghormati pluralitas dan kesetaraan gender			
1	Konflik SARA	Kasus	Masih Ada	Menurun
2	Penanganan NAPZA	%	40	90
3	Penanganan Penderita HIV/AIDS	%	30	95
4	<i>Gender Development Indeks (GDI)</i>		54,6 (Th. 2006)	60,4
II	MISI KEDUA : Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkeadilan, terjangkau dan berkualitas			
5	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,7	8,61
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) :	%		
	■ SD / MI / Paket A		106,14	111,91
	■ SMP / MTS / Paket B		97,80	100,20
7	Angka Partisipasi Murni (APM) :	%		
	■ SD / MI / Paket A		97,66	99,95
	■ SMP / MTS / Paket B		79,57	90,07
8	Angka Putus Sekolah :	%		
	■ SD / MI / Paket A		0,90	0,20
	■ SMP / MTS / Paket B		5,25	0,50
	■ SMA / SMK / MA / Paket C		4,88	1,50
9	Angka Melek Huruf	%	80,10	100,00
10	Angka Melanjutkan Sekolah :	%		
	■ SD / MI ke SMP / MTS		98,58	100,00
	■ SMP / MTS ke SMA / SMK / MA		90,05	98,50
	■ SMA / SMK / MA ke Perguruan Tinggi		59,99	75
11	Penemuan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Temuan	95	145
12	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Temuan	73	130
13	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	61,2	66,18
14	Angka Kematian Bayi (AKB)	/1.000 KH	72	42

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA	
			KONDISI TAHUN 2007	TARGET TAHUN 2013
15	Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)	/100.000 KH	320	260
16	Prevalensi Gizi Buruk	%	3,4	2,5
17	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,70	1,28
18	Tingkat Kelahiran Total ( <i>Total Fertility Rate = TFR</i> )	Orang	2,8	2,2
19	Usia Kawin	Tahun	19,67	21,00
20	Cakupan Air Bersih	%	65	75
21	Perpustakaan Desa dan Perpustakaan Keliling	Unit	187	910
22	Perpustakaan Rumah Ibadah	Unit	70	910
23	Angka Kunjungan Ke Perpustakaan	orang	495.540	931.401
III	MISI KETIGA : Menumbuhkan ekonomi berbasis sumberdaya lokal dan mengembangkan investasi dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan			
24	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	%	4,89	6,00 - 7,00
25	Laju Inflasi	%	8,76	Tetap bertahan pada 1 digit
26	Laju Pertumbuhan Investasi	%	2,26	8,33
27	<i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i>		6,59	4 s.d 5
28	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita ADHB (tanpa sektor pertambangan)	Rp	4.985.784	10.828.674
29	Paritas Daya Beli	Rp	623.900	750.000
30	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Rp. Milyar	923.479	1.824,748
31	Kinerja Laporan Keuangan Daerah	%	> 5 TMP : Tidak Memberikan Pendapatan ( <i>disclaimer</i> )	< 5 WTP = Wajar Tanpa Pengecualian
32	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. Milyar	311	750
33	Angka Kemiskinan	%	24,99	14
34	Angka Pengangguran Terbuka	%	6,48	5,00

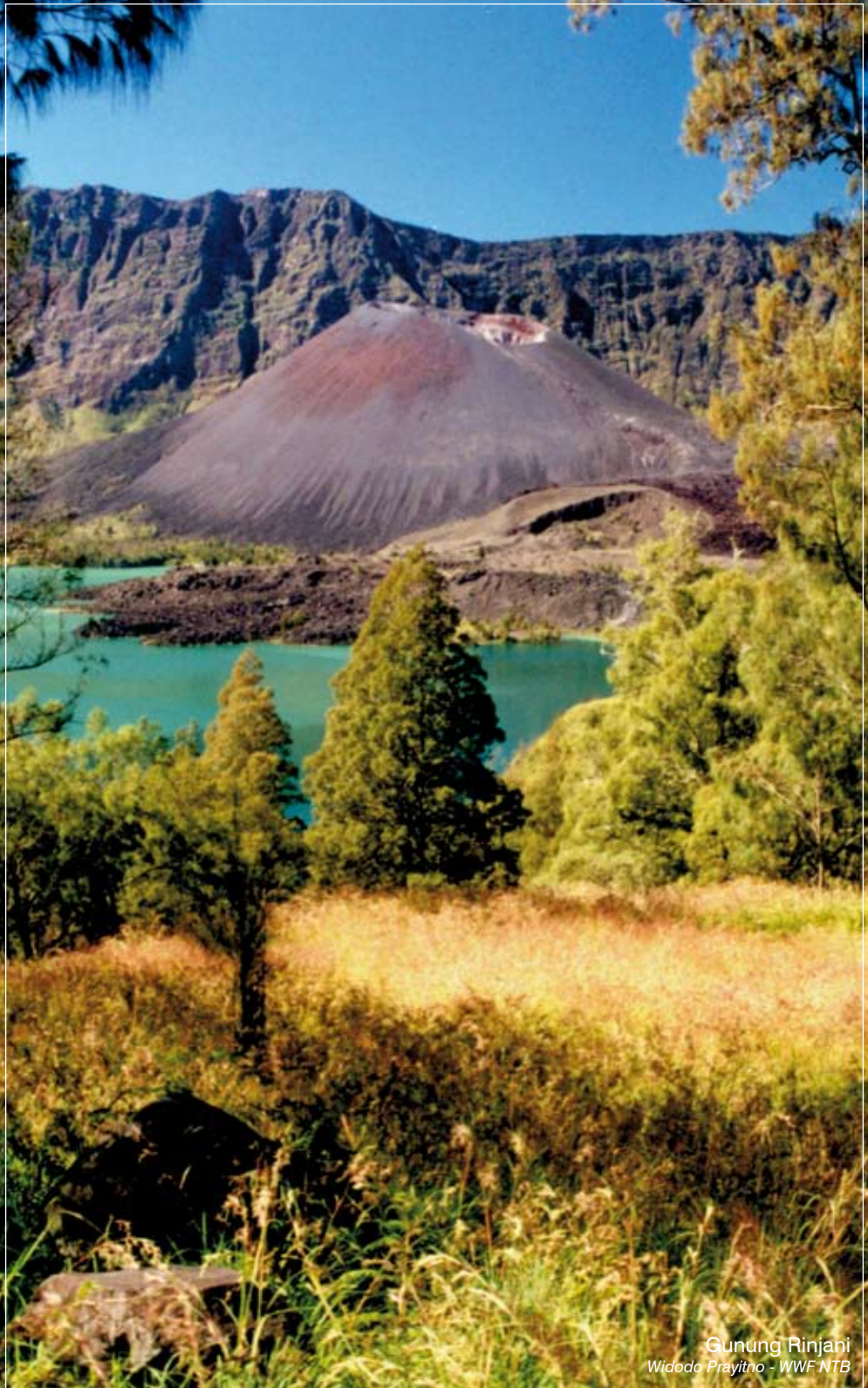
NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA	
			KONDISI TAHUN 2007	TARGET TAHUN 2013
35	Peningkatan Populasi Ternak Sapi	Ekor	507.836	1.000.000
36	Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	72,7	80,3
37	Desa Mandiri Pangan	Desa	82	222
38	Cadangan Pangan :	Ton	-	1.325
	■ Energi Perkapita	Kalori/hr	3.077,58	3.105,38
	■ Protein Perkapita	Gram/hr	93,80	104,53
39	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/kapita/Thn	24,02	25,6
40	Kelompok Sadar Wisata	Kelompok	50	100
41	Angka Kunjungan Wisatawan	orang/thn	457.379	1.208.091
	■ Wisatawan Mancanegara		200.170	526.216
	■ Wisatawan Nusantara		257.209	681.875
42	Koperasi Berkualitas	Koperasi	940	2.000
43	Wirausaha Baru	Unit		100.000
44	Forum Pengembangan Ekonomi Lokal	Forum	4	10
IV	MISI KEEMPAT : Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi			
45	Tingkat Kemantapan Jalan :	%		
	■ Jalan Nasional		79,23	100,00
	■ Jalan Provinsi		44,25	65,78
46	Peraturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	Dokumen	Perda Prov : 1 Perda Kab/Kota : 1	Perda Prov : 1 Perda Kab/Kota : 10
47	Cakupan Jamban Keluarga (Jaga)	%	57	80
48	Cakupan Listrik (Ratio Elektrifikasi)	%	34	
49	Kampung Media	Komunitas	3	50
50	Peraturan tentang Telekomunikasi dan Informasi	Buah	0	2
51	Sumber Mata Air	Sumber	174	250
52	Petani Pemakai Air :	Kelompok		
	■ Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A);		54 1367	75 1435
	■ Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)			

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	INDIKATOR CAPAIAN KINERJA	
			KONDISI TAHUN 2007	TARGET TAHUN 2013
53	Maskapai dan frekuensi penerbangan domestik dan internasional yang melayani rute Prov. NTB	- Perusahaan - Kali	8	14
54	Interkoneksi angkutan umum antar simpul transportasi	Status	Belum	Ada
55	Peralatan Peringatan Dini Bencana ( <i>Early Warning System</i> )	Unit	1	3
56	Lahan Kritis :	ha	507.778,17	≤ 507.778,17
	■ Kawasan Hutan (lindung, konservasi, produksi, fungsi khusus)	ha	1.069.997,78	1.069.997,78
	■ Lahan Sawah Berkelanjutan	ha	230.503,28	>230.503,28
	■ Ruang Terbuka Hijau >30 %	Kab/Kota		10
	■ Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Unit	0	3
	■ Model Konservasi Keanekaragaman Hayati Daerah	Lokasi	0	3 (Lombok, Sumbawa bagian Barat dan Timur)
V	MISI KELIMA : Menegakkan supremasi hukum, pemerintahan yang bebas KKN dan memantapkan otonomi daerah			
57	Temuan pelanggaran aparatur	Kasus	...	menurun
58	Standar Operasional Prosedur (SOP);	%	-	100
59	Standar Pelayanan Minimal (SPM);	%	-	50
60	Indeks Demokrasi :		49	52
	■ Partisipasi masyarakat dalam politik;	%	66	70
	■ Pemilu yang bebas dan adil;		63	71
61	Pelanggaran Hukum dan HAM;	Kasus	50	15
62	Kriminalitas;	Kasus	6.738	7.893
63	Perdagangan Manusia (Human Trafficking);	Kasus	467	283
64	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);	Kasus	168	104
65	Produk Hukum Daerah Anti KKN dan Pemanapan Otonomi Daerah;	Buah		10



**Bab IX**  
**Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan**

---



Gunung Rinjani  
Widodo Prayitno - WWF NTB

## Bab IX

# Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program gubernur-wakil gubernur yang memuat kebijakan umum pembangunan daerah, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2009-2013, bukan hanya merupakan penjabaran dari visi, misi dan program gubernur-wakil gubernur terpilih yang mendapat legitimasi peraturan daerah dan menjadi instrumen penting mengarahkan dan mengendalikan kegiatan program pembangunan NTB, tetapi juga merupakan pedoman bagi semua pemangku amanah yang terlibat dalam proses pembangunan daerah. Artinya, RPJMD merupakan perwujudan komitmen pemerintah, swasta dan masyarakat sekaligus dalam upaya pembangunan lima tahun kedepan. Komitmen yang terbangun dalam perencanaan berupa RPJMD ini, sepatutnya dijadikan pegangan, patokan, ukuran dalam mengimplementasikan program pembangunan NTB hingga 2013.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi NTB 2009-2013, maka seluruh pemangku amanah diharapkan mampu memahami substansi dokumen perencanaan ini dan menterjemahkannya secara kreatif dan inovatif. Bagi SKPD lingkup pemerintah provinsi NTB, RPJMD Provinsi NTB 2009-2013 menjadi acuan utama untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD 2009-2013 dan Rencana Kerja (Renja) SKPD 2009-2013, serta dijadikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran/Sementara (PPA/S), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang merupakan bahan dasar penyusunan Rancangan APBD, serta Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Dokumen-dokumen tersebut menjadi bahan dalam evaluasi dan pelaporan kinerja kepemimpinan daerah NTB selama kurun waktu 2009-2013.

---

RPJMD provinsi NTB 2009-2013 merupakan acuan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha didalamnya, sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Implementasi RPJMD ini mensyaratkan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi lintas program dan kegiatan, lintas instansi serta lintas pemerintahan, dengan tetap memperhatikan peran, kewenangan, tanggung-jawab dan tugas masing-masing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sikap yang mengedepankan ego sektoral harus dihilangkan agar terjadi sinergisitas, efisiensi dan lompatan ke depan (akselerisasi) dalam pelaksanaan pembangunan NTB.

Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Beriman dan Berdayasaing (NTB BerSaing), perlu didukung: (1) komitmen dan kepemimpinan daerah yang baik, bersih, dan amanah; (2) konsistensi kebijakan pemerintah daerah; (3) kebijakan yang berpihak kepada masyarakat; dan (4) partisipasi masyarakat, dunia usaha serta para pemangku amanah secara aktif, kreatif, dan positif. Selain itu, penerapan tiga pilar prinsip *Good Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi, dalam pelaksanaan berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi pembangunan tersebut harus mendapat perhatian secara sungguh-sungguh oleh para pihak.

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait terhadap setiap informasi terkait seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal. Transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai, disediakan untuk dipahami dan dapat dipantau.

Akuntabilitas adalah kapasitas suatu instansi pemerintahan untuk bertanggung gugat atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, sampai pada pemantauan dan evaluasi.

---

Partisipasi merupakan perwujudan dari berubahnya paradigma mengenai peran masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat (*beneficiaries*) atau obyek belaka, melainkan agen pembangunan (subjek yang mempunyai peranan penting). Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (*budget invention*), seyogyanya melibatkan masyarakat.

Dalam kaitan tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dalam mengawal implementasi RPJMD provinsi NTB 2009-2013 yang meliputi:

1. Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha serta para pemangku amanah lainnya berkewajiban untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
2. RPJMD Provinsi NTB 2009-2013 menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD 2009-2013 yang menjabarkan lebih lanjut visi, misi dan agenda daerah serta berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan secara terukur, dapat dilaksanakan/dicapai dan terarah pada tahapan rencana tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif mendesain program-program terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan mengejar ketertinggalan pembangunan di NTB.
3. Unit satuan kerja vertikal setingkat, maupun lembaga-lembaga lokal non pemerintah atau lembaga internasional pemerintah dan non pemerintah yang melakukan kegiatan di wilayah NTB, serta komponen masyarakat dalam berbagai bentuk partisipasinya berkewajiban berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menyerasikan dan menjamin *konsistensi* dan *kohesi* terhadap RPJMD Provinsi NTB 2009-2013.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB, Bupati/Walikota se-NTB, dan seluruh jajaran pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha secara bersama-sama mendukung konsistensi implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB 2005-2025, RPJMD Provinsi NTB 2009-2013 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi NTB selama kurun waktu 2009-2013.

- 
5. Dalam rangka optimalisasi pengawalan implementasi berbagai program dan kegiatan pembangunan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi NTB bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB berkewajiban melaksanakan sinkronisasi serta penyerasian target dan sasaran, melalui pengendalian terhadap penjabaran RPJMD Provinsi NTB 2009-2013.
  6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi RPJMD Provinsi NTB 2009-2013, dan untuk mengetahui tingkat kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diselenggarakan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.



## PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

---

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2009 - 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang berbunyi Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;
  - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
  - c. bahwa dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memerlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk menentukan arah dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilakukan secara bertahap untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 - 2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2009 -2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan RPJMD Kabupaten dan Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

#### Pasal 2

RPJMD Provinsi merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya daerah otonom sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJPD.

#### Pasal 3

- (1) RPJMD Kabupaten/Kota mengacu pada RPJMD Provinsi.
- (2) Dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bappeda Kabupaten/Kota melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda Provinsi.

## Pasal 4

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
- BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- BAB VI : STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
- BAB VIII : PENTAHAPAN PEMBANGUNAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
- BAB IX : PENUTUP.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota.
- (2) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal 6

- (1) Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Provinsi.
- (2) Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat kurun waktu Tahun 2009-2013 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Kabupaten/Kota.
- (3) RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 7

- (1) Ketentuan mengenai RPJMD Kabupaten/Kota yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan dengan RPJMD menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2003-2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram.  
pada tanggal 2 Maret 2009

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 2 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ABDUL MALIK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 14

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2009  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2009 - 2013

I. UMUM

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649) tanggal 14 Agustus 1958, pada awal pembentukannya, penyelenggaraan Pemerintah masih tumpang tindih, yaitu berdasarkan Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah. Keadaan ini berlangsung sampai tanggal 17 Desember 1958, yang menandai terbentuknya Daerah Tingkat I NTB secara nyata, yang kemudian dijadikan sebagai lahirnya Provinsi NTB yang sampai saat ini memasuki usia 50 tahun.

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan 137 pulau-pulau kecil yang mengelilinginya, dihuni oleh beraneka ragam suku bangsa dengan adat istiadatnya yang juga berbeda, namun mempunyai cita-cita dan tujuan yang sama, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk melaksanakan dan mencapai tujuan dan cita-cita tersebut diperlukan suatu rencana yang dapat merumuskan secara lebih konkrit pencapaian tujuannya.

Berdasarkan Pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disingkat RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional. Selanjutnya pada ayat (3) huruf c dijelaskan bahwa RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Provinsi NTB Tahun 2009-2013, ditetapkan dengan maksud memberikan arah bagi pemerintah daerah dan masyarakat NTB serta dunia usaha (baik yang ada di daerah maupun luar daerah) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama, dalam berbagai program pembangunan daerah yang terpadu, fokus dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tujuan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2009-2013 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD Tahun 2009-2013, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan dokumen perencanaan detail lainnya.

Karena lampiran RPJM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, maka batang tubuh dari Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 - 2013 cukup terdiri dari 8 (delapan) pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan RPJM Daerah Provinsi, hubungan konsultasi dalam penyusunan RPJM Daerah Provinsi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah Provinsi dan RPJM Daerah Kabupaten dan Kota, dan ruang untuk melakukan perubahan terhadap RPJM Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Nusa Tenggara Barat dengan berlakunya RPJM Daerah Provinsi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur yang memuat kebijakan umum pembangunan daerah, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

RPJMD bukan hanya merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam program-program pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga merupakan pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan daerah. Artinya, RPJMD merupakan perwujudan komitmen pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya pembangunan yang akan dilaksanakan secara bersama dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

RPJMD tidak saja menjadi acuan utama untuk penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD tetapi juga dijadikan pedoman untuk menyusun RKPD dan KUA, PPAS serta RKA-SKPD yang merupakan bahan dasar penyusunan RAPBD, agar sasaran pembangunan daerah saling terkait dan saling menunjang dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran kerangka visi, misi dan program Kepala daerah.

RPJMD berisi informasi tentang sumberdaya yang diperlukan, dan indikator capaian mulai indikator keluaran sampai dengan dampak yang hendak dicapai dalam mewujudkan visi Kepala Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan konsultasi dan koordinasi dalam ketentuan ini adalah dalam rangka menciptakan sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2009 - 2013 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun 2009 - 2013. Karena itu, Bappeda Kabupaten dan Kota perlu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda Provinsi untuk penyusunan RPJMD Kabupaten dan Kota yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 4

Cukup jelas

## Pasal 5

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Tahun 2009- 2013 dan oleh Kepala Bappeda Kabupaten dan Kota terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten dan Kota. Hal ini merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan nasional dan daerah secara keseluruhan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan daerah. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dari hasil evaluasi secara keseluruhan tersebut. Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi yang dilakukan mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan substansi perencanaan, dimaksudkan untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa mendatang. Fokus utama evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diarahkan kepada hasil, manfaat, dan dampak dari rencana pembangunan.

## Pasal 6

Cukup jelas

## Pasal 7

Cukup jelas

## Pasal 8

Cukup jelas